

# LAPORAN MONITORING

**Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)  
Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender  
Tahun Anggaran 2023-2024**

**Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia**



**LAPORAN MONITORING**

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui  
Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender  
Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# Tim Monitoring

## A. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

### ***Sekretariat***

1. Aan Prianto
2. Anissa Putri
3. Ary Nugroho
4. Azhar Akbar
5. Danang Yulianto
6. Dhamaranti Rusmaliatin
7. Dhani Kurniawan
8. Elymanda Sari Surbakti
9. Euis Ulfah Nurlatifah
10. Faisal
11. Ilham Hadiana
12. Imam Mukhlis Affandi
13. Janrika Mutyarani
14. Lani Maulia Rini
15. Liza Octaviarne Sri Perdana
16. Melvin Marolop Simanjuntak
17. Mohammad Fadli
18. Nandhi Endrayanto
19. Ricka Yunita Prasetya
20. Syahdam Husein
21. Taruli Christovina
22. Teguh Pribadi

### ***Sistem Perimbangan Keuangan***

1. Achmad Amnan
2. Aradea Chandra

### ***Dana Transfer Umum***

1. Asep Agus Hermanto
2. Nurdianto Setiawan

### ***Dana Transfer Khusus***

1. Adi Fahmi
2. Muthi' Ah Khoirunnisa
3. Puji Eddi Nugroho

### ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***

1. Anna Mei Rani
2. Rita Wahyuningsih
3. Revita Maiowa

### ***Pembiayaan dan Perekonomian Daerah***

1. Riza Yafika

### ***Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan***

1. Maya Sari
2. Syafrudin Afif

## B. Tim SKALA

1. Akhmad Misbakhul Hasan
2. Ferderika Hungu
3. Ferry Yuniver
4. Indra Gunawan
5. Irene Arifajar
6. Jaka Yusuf
7. Lilis Suryani
8. Maudytia Rismalasari Prabowo
9. Ririn Afitri Tatu
10. Tasmiati Emsa
11. Tissa Soumokil
12. Zunea Uasni

# Daftar Isi

Daftar Tabel, Gambar, dan Grafik	ii
Daftar Singkatan	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
<b>BAB I:</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Jenis – jenis TKD Responsif Gender	2
1.3 TKD dan IPG Tahun Anggaran 2020-2023	5
1.4 Tujuan, Ruang Lingkup dan Lokus Monitoring	6
<b>BAB II:</b>	
<b>TAHAPAN DAN METODE MONITORING</b>	<b>9</b>
2.1 Tahapan Persiapan	9
2.2 Tahap Pelaksanaan Monitoring	10
2.3 Tahap Pelaporan	11
2.4 Metode Monitoring	11
<b>BAB III:</b>	
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	<b>16</b>
3.1 Skor Agregat dan Peringkat Provinsi dalam Implementasi HKPD Responsif Gender	16
3.2 Hasil Monitoring Implementasi HKPD Responsif Gender Tingkat Perovinsi	18
3.3 Skor dan Peringkat Kabupaten/Kota dalam Implementasi HKPD Responsif Gender	58
3.4 Hasil Monitoring Responsif Gender dan Potret TKD Kabupaten Kota	60
<b>BAB IV:</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Rekomendasi	85
<b>LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lokakarya	12
Tabel 2. Skala Skoring dan Penjelasan	14
Tabel 3. Komparasi Skor Agregat 8 Provinsi	17
Tabel 4. Statistik Deskriptif Skor Agregat 8 Provinsi	17
Tabel 5. TKD Responsif Gender Provinsi Kalimantan Utara TA. 2023-2024	19
Tabel 6. TKD Responsif Gender Provinsi Gorontalo TA. 2023-2024	24
Tabel 7. TKD Responsif Gender Provinsi Aceh TA. 2023-2024	30
Tabel 8. TKD Responsif Gender Provinsi Maluku TA. 2023-2024	35
Tabel 9. TKD Responsif Gender Provinsi NTB TA. 2023-2024	39
Tabel 10. TKD Responsif Gender Provinsi NTT TA. 2023-2024	43
Tabel 11. TKD Responsif Gender Papua TA. 2023-2024	48
Tabel 12. TKD Responsif Gender Papua Barat TA. 2023-2024	54
Tabel 13. Komparasi Skor Agregat 8 Pemerintah Kabupaten/Kota	59
Tabel 14. Statistik Deskriptif Skor Agregat 8 Kabupaten/Kota	60
Tabel 15. TKD Responsif Gender Kota Tarakan TA. 2023-2024	61
Tabel 16. TKD Responsif Gender Kabupaten Bone Bolango TA. 2023-2024	63
Tabel 17. TKD Responsif Gender Kabupaten Lombok Barat TA. 2023-2024	66
Tabel 18. TKD Responsif Gender Kota Ambon TA. 2023-2024	69
Tabel 19. TKD Responsif Gender Kabupaten Jayapura TA. 2023-2024	72
Tabel 20. TKD Responsif Gender Kota Kupang TA. 2023-2024	74
Tabel 21. TKD Responsif Gender Kota Banda Aceh TA. 2023-2024	77
Tabel 22. TKD Responsif Gender Kota Manokwari TA. 2023-2024	79

## Daftar Gambar

Gambar 1. Responden Pemerintah Daerah	6
Gambar 2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Monitoring	7

## Daftar Grafik

Grafik 1. Realisasi TKD dan IPG	5
Grafik 2. Skor Agregat 8 Pemerintah Provinsi	16
Grafik 3. Tren TKD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023-2024	19
Grafik 4. Tren TKD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023-2024	24
Grafik 5. Tren TKD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023-2024	30
Grafik 6. Tren TKD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023-2024	34
Grafik 7. Tren TKD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023-2024	38
Grafik 8. Tren TKD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023-2024	43
Grafik 9. Tren TKD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023-2024	48
Grafik 10. Tren TKD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023-2024	53
Grafik 11. Skor Agregat 8 Pemerintah Kabupaten/Kota	58
Grafik 12. Tren TKD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023-2024	60
Grafik 13. Tren TKD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023-2024	63
Grafik 14. Tren TKD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023-2024	66

Grafik 15. Tren TKD Kota Ambon Tahun Anggaran 2023-2024	69
Grafik 16. Tren TKD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023-2024	71
Grafik 17. Tren TKD Kota Kupang Tahun Anggaran 2023-2024	74
Grafik 18. Tren TKD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023-2024	76
Grafik 19. Tren TKD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023-2024	79

# Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APIP	: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BOP	: Bantuan Operasional
BOPPA	: Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak
BPS	: Biro Pusat Statistik
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DD	: Dana Desa
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DP2KBP3A	: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3AMD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
FGD	: Focus Group Discussion
HLS	: Harapan Lama Sekolah
HKPD	: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
IGD PONEK	: Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenensi Komprehensif
IKG	: Indeks Kesenjangan Gender
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LAKIP/LAKIN	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PAUD	: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
PK2UMK	: Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPA	: Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SARPRAS	: Sarana dan Prasarana
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SoTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kelola
SPALD-S	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TKD	: Transfer ke Daerah
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKBM	: Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UHH	: Usia Harapan Hidup
UU	: Undang-Undang

# Kata Pengantar



**Ludiro, SE, MM**  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Hasil Monitoring Implementasi Kebijakan HKPD Melalui TKD Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024 ini dapat diselesaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan ini merupakan mandatory yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pelaksanaan integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, baik di level pusat maupun daerah, diharapkan akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas yang lebih baik dan keadilan dalam pemberian manfaat pembangunan kepada semua warga Indonesia, yang didalamnya terdapat 5 pihak di masyarakat yang dibidik dalam Pengarusutamaan Gender, yaitu perempuan, disabilitas, lansia, ibu hamil (dan menyusui) serta anak – anak.

Laporan ini menyajikan analisis yang mendalam mengenai capaian dan tantangan dalam implementasi kebijakan HKPD responsif gender di berbagai daerah. Temuan-temuan dalam laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pengarusutamaan gender telah diintegrasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan fiskal. Kami berharap, dengan adanya laporan ini, pengarusutamaan gender dapat terus diperkuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat daerah.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim monitoring PUG DJPK, tim GEDSI SKALA, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan HKPD yang responsif gender.

Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa komitmen untuk menciptakan kebijakan yang adil dan setara bukanlah tugas yang ringan, namun merupakan tanggung jawab bersama. Marilah kita terus berinovasi dan bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Jakarta, 2 Juni 2025

# Ringkasan Eksekutif

Buku laporan ini menyajikan hasil monitoring bersama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan dan tim Program Kemitraan Australia – Indonesia SKALA di 8 (delapan) Provinsi dampingan SKALA dan juga salah satu kabupaten/kota terpilih di masing – masing provinsi tersebut untuk implementasi Transfer ke Daerah (TKD) yang responsif gender dan inklusif. Monitoring dilaksanakan selama bulan Mei dan Juni 2024 dan dilakukan secara partisipatif dan berbasis bukti, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi.

Monitoring ini fokus pada empat tema utama yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran; (2) Pelaksanaan; (3) Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan; (4) Kapasitas Sumbar Daya Manusia (SDM), Inovasi dan *Continuous Improvement/* Pengembangan Lanjutan.

Hasil monitoring menjelaskan bagaimana TKD dapat menyediakan instrument strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di Indonesia. Hasil monitoring menunjukkan bahwa, implementasi TKD responsif gender di daerah beragam. Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi kebijakan HKPD responsif gender, sementara Papua Barat menghadapi tantangan terbesar. Di sebagian besar daerah telah memenuhi area Perencanaan dan Penganggaran di mana hal ini menunjukkan perhatian yang baik pada tahap awal tata kelola anggaran. Sebaliknya, area Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* masih lemah dan bervariasi antar provinsi. Meskipun sebagian besar daerah merujuk dan memasukkan prinsip kesetaraan gender di dalam dokumen perencanaannya, namun tidak banyak yang menterjemahkan komitmen tersebut pada program sasaran, anggaran dan juga capaian keluaran (outcome) yang terukur.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya pemahaman tentang anggaran responsif gender, lemahnya kapasitas fiskal, juga kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya data terpilah gender serta sistem monitoring. Kalimantan Utara memperoleh nilai tertinggi karena faktor kepemimpinan politik yang kuat, koordinasi lintas sektor yang baik, dan inovasi lokal yang dapat menjalankan mandat nasional dalam hal ini upaya untuk menyediakan layanan dasar yang inklusif.

Untuk memperkuat TKD yang responsif gender, laporan ini merekomendasikan beberapa aksi tindak lanjut yaitu:

- **Pemerintah Pusat:** memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan TKD responsif gender, serta meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi di tingkat pusat.
- **Pemerintah Daerah:** memperkuat kelembagaan dan kapasitas Pokja PUG, memastikan alokasi TKD tepat sasaran mendukung kelompok rentan, meningkatkan sinergi antar-OPD, serta mengembangkan inovasi berbasis gender yang berkelanjutan.

## LAPORAN MONITORING

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# BAB I

# Pendahuluan



# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menandai babak baru pola relasi dan sinergi pendanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ada empat pilar yang menjadi landasan lahirnya UU HKPD ini, yakni mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, memperkuat pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*), meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua pilar yang disebutkan terakhir diejawantahkan oleh pemerintah dengan menetapkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah ditentukan penggunaannya (*budget earmarking*). Tujuannya adalah agar TKD lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya. Kebijakan HKPD pada akhirnya diharapkan mempunyai dampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, tanpa kecuali. Secara umum, monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi HKPD melalui TKD yang Responsif Gender dan Inklusif.

Pembangunan Responsif Gender dan Inklusif diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) beserta komposit pembentuknya yaitu Usia Harapan Hidup (Laki-laki (Lk) dan perempuan (Pr)), Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Lk/Pr), Harapan Lama Sekolah/HLS (Lk/Pr), Pengeluaran Per Kapita (Lk/Pr), serta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) beserta kompositnya, seperti Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan. Monitoring ini berupaya melihat upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender melalui peningkatan IPG dan juga menekan IKG.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran strategis dalam pengelolaan fiskal, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui Transfer Ke Daerah (TKD) termasuk dalam perumusan kebijakan untuk mendorong TKD yang lebih responsif gender. Berikut akan dijelaskan jenis – jenis TKD yang responsive gender tersebut.

### 1.2 Jenis – jenis TKD Responsive Gender

#### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Salah satu jenis DBH yang dimonitoring penggunaannya adalah DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Pajak Rokok. Pemerintah telah menetapkan kenaikan Cukai Hasil Tembakau untuk pengendalian konsumsi rokok di masyarakat untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung upaya penurunan stunting. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun

2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, penggunaan pajak rokok minimal 50% dialokasikan untuk mendanai layanan kesehatan bagi masyarakat. Lebih khusus lagi adalah untuk kegiatan pembinaan lingkungan sosial yang mendukung bidang kesehatan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui serta bayi juga melalui kegiatan posyandu.

#### **b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU *Specific Grant* terutama yang dialokasikan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Tiga bidang DAU *specific grant* ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang ditandai dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga berkontribusi terhadap penurunan Indeks Kesenjangan Gender (IKG) yang ditandai dengan peningkatan layanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan dan tingkat pendidikan perempuan usia 25 tahun ke atas.

#### **c. Dana Alokasi Khusus (DAK):**

1. **DAK Fisik.** Terdapat tiga jenis DAK Fisik yang masuk kategori responsif gender – termasuk juga dalam upaya penurunan stunting, yaitu:
  - a. DAK Fisik Kesehatan melalui penyediaan alat antropometri, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita kurus, serta pengadaan Kit Bina Keluarga Balita
  - b. DAK Fisik Air Minum dan,
  - c. DAK Fisik Sanitasi. Baik DAK Fisik Air Minum dan Sanitasi bertujuan untuk mengatasi masalah rendahnya akses sanitasi dan air minum layak yang berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
2. **DAK Non-Fisik.** Beberapa jenis DAK Non-Fisik yang berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender. Dana ini dikelola oleh kementerian teknis sesuai dengan bidangnya masing – masing, yaitu antara lain:
  - a. Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dikelola oleh – pada saat laporan ini ditulis – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dana BOS ini mencakup untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan). Untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), ketiga jenis BOS Pendidikan ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
  - b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). BOK ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
  - c. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diawasi pengelolaannya

oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara berjenjang. BOKB di antaranya meliputi biaya operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB), bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan termasuk untuk penurunan stunting.

- d. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dikelola dan diawasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dana P3A ini digunakan untuk Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen-PPA) Nomor 8 tahun 2023, ruang lingkup Dana P3A dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) yang terdiri atas: BOPPA Pelayanan, BOPPA Pencegahan, dan BOPPA Manajemen.
- e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) dikelola dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia. PK2UMK merupakan dana yang dialokasikan untuk dukungan dana kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan urusan daerah, terutama menyasar bagi perempuan pelaku koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah. PK2UMK dapat memfasilitasi pelatihan, pendampingan, layanan bantuan dan pendampingan hukum untuk meningkatkan peran, kualitas, dan peningkatan pengeluaran per kapita perempuan. Upaya ini akan berkontribusi pada pembentukan komposit IPG dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang merupakan komposit IKG.
- f. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dikelola oleh Kementerian Pertanian. DKPP merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang mendukung operasional bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu aspek kegiatan pembiayaan DKPP adalah untuk mendukung Penurunan Stunting yaitu kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan P2L ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.

#### **d. Dana Desa (DD):**

Beberapa aspek pembiayaan Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung penurunan stunting melalui pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, tindakan promotif dan pencegahan melalui rumah Desa sehat, dan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak. Berdasarkan Data Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT), dalam periode 2015 – 2022 pemanfaatan penggunaan Dana Desa telah membangun 42.300 posyandu, 1,5 juta unit air bersih, 444.000 unit mandi, cuci, kakus (MCK), dan 14.400 unit polindes atau pondok bersalin desa. Selain itu juga telah dibangun 45,8 juta meter drainase, 66.700 kegiatan PAUD, 76.600 unit sumur, dan 29.000 unit sarana olahraga.

### e. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal ditujukan untuk memberikan penghargaan dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kinerja tertentu, misalnya: kinerja penurunan stunting, kinerja penurunan kemiskinan ekstrem, kinerja pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 101 dalam UU HKPD, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada para pelaku usaha di daerahnya dalam bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Salah satu pertimbangan insentif tersebut adalah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

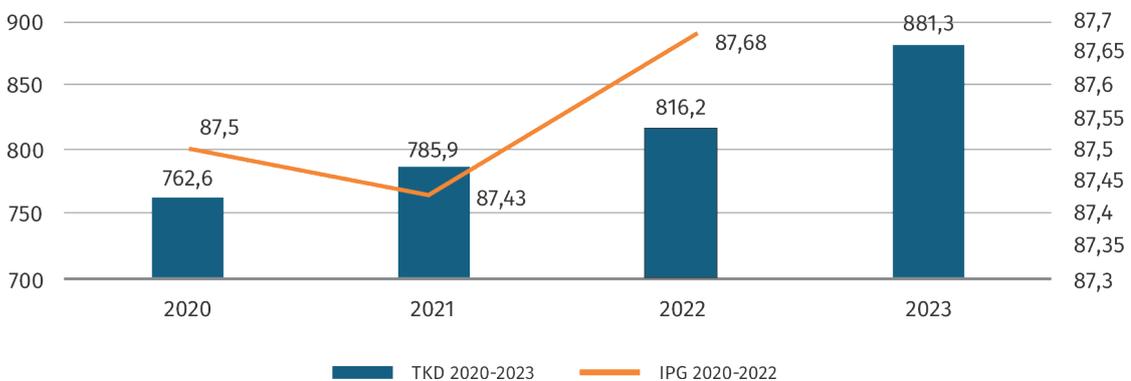
## 1.3 TKD dan IPG Tahun Anggaran 2020-2023

Sebagaimana table dan grafik 1, rata-Rata Pertumbuhan Transfer ke Daerah dari tahun 2020-2023 yaitu 5%, di mana pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,1%, pertumbuhan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 3,9%, dan pertumbuhan dari tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 8%. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2020 ke 2021 turun sebesar -0,08% dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik sebesar 0,29%, sehingga selama kurun waktu 2020-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,1%.

Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran TKD selama kurun waktu/ periode tertentu yang dipilih bertujuan untuk memberikan analisa awal tentang keterhubungan alokasi TKD yang disalurkan kepada pemerintah daerah bagi peningkatan IPG dan penurunan IKG di daerah. Demikian juga sampai sejauh mana kontribusinya? Serta, apakah alokasi berdampak langsung terhadap pembentukan IPG?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan suatu pemantauan dan evaluasi atas penyaluran TKD selama kurun waktu/ periode tertentu yang dipilih.

Grafik 1. Realisasi TKD 2020-2023 (Triliun RP) dan IPG 2020-2022



Sumber: Buku Saku APBN dan BPS, 2023

## 1.4 Tujuan, Ruang Lingkup dan Lokus Monitoring

### 1.4.1 Tujuan

Pelaksanaan monitoring implementasi kebijakan HKPD dan pengalokasian TKD dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan:

1. Melakukan skoring terhadap implementasi kebijakan HKPD dan TKD yang responsif gender pada aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengawasan serta kapasitas sumber daya manusia, inovasi dan *continuous improvement*.
2. Memetakan besaran TKD dan penggunaannya untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan perbaikan tata kelola TKD untuk percepatan kesetaraan gender di daerah.

### 1.4.2 Ruang Lingkup

Monitoring dilakukan terhadap implementasi kebijakan HKPD dan kinerja pengalokasian TKD Tahun Anggaran 2023-2024 yang berkontribusi terhadap pembangunan kesetaraan gender. Area monitoring meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan serta kapasitas sumber daya manusia, inovasi dan *continuous improvement*.

### 1.4.3 Lokasi Monitoring

Monitoring implementasi kebijakan HKPD dan pengalokasian TKD yang responsif gender dilakukan di 8 provinsi yang merupakan daerah dampingan SKALA, monitoring juga dilakukan di salah satu kabupaten/kota pada masing-masing provinsi tersebut dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kemudahan akses ke informan/responden terkait mengingat SKALA telah membangun komunikasi baik dengan pemerintah daerah di masing – masing lokasi.
- b. Lokasi mudah dijangkau dengan data dan informasi yang tersedia.
- c. Memperoleh gambaran umum atas daerah kabupaten dan daerah kota dari 8 provinsi daerah dampingan SKALA.

Gambar 1. Responden Pemerintah Daerah



1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
3. Provinsi Gorontalo
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Provinsi Maluku
7. Provinsi Papua Barat
8. Provinsi Papua
9. Kota Banda Aceh
10. Kota Tarakan
11. Kabupaten Bone Bolango
12. Kabupaten Lombok Barat
13. Kota Kupang
14. Kota Ambon
15. Kabupaten Manokwari
16. Kabupaten Jayapura

Pemilihan daerah monitoring juga didasarkan pada pertimbangan keragaman kapasitas fiskal suatu daerah. Klasifikasi kapasitas fiskal daerah tersebut, antara lain: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Berikut adalah Peta Kapasitas Fiskal Daerah lokasi monitoring:

Gambar 2: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Monitoring



Sumber: PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang salah satunya adalah untuk pertimbangan pengalokasian dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka sinergi pendanaan. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2, sebagian besar daerah lokasi monitoring mempunyai kapasitas fiskal sangat rendah, rendah, dan sedang. Hanya Provinsi Kaltara, Provinsi Papua, Kota Tarakan, dan Kabupaten Jayapura yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi.

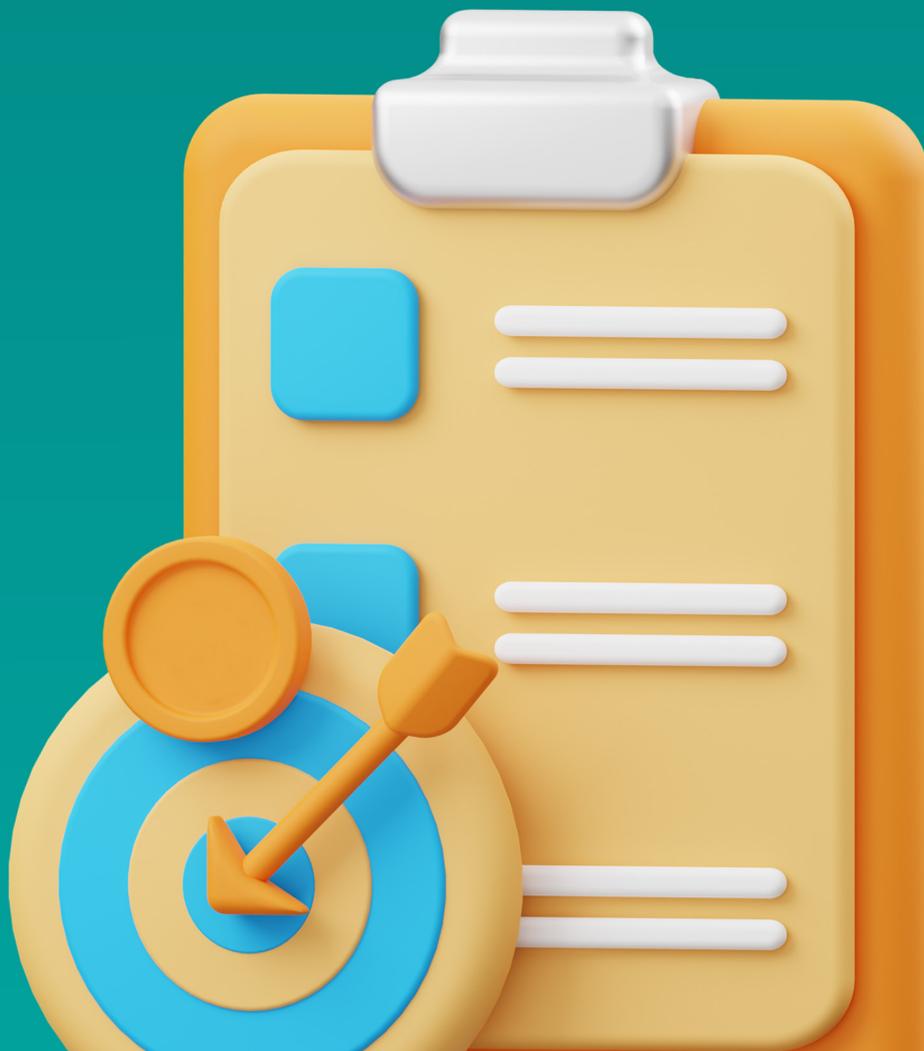
## LAPORAN MONITORING

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# BAB II

# Tahapan dan Metode Monitoring



# BAB II

## Tahapan dan Metode Monitoring

### 2.1 Tahapan Persiapan

#### 2.1.1. Penyusunan Instrumen Monitoring

Penyusunan perangkat monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang didukung oleh SKALA melalui Lokakarya di Bogor pada tanggal 1-3 Februari 2024 dan pada tanggal 14 –15 Maret 2024. Perangkat monitoring menggunakan kerangka logis (logic model) input-output-outcome terhadap struktur Program Pembangunan Kesetaraan Gender. Namun terdapat tantangan bila menggunakan perangkat tersebut, yaitu :

1. Belum adanya indikator kinerja yang dapat digunakan untuk keperluan monitoring untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
2. Belum ditentukannya immediate outcome yang bisa terkoneksi dengan outcome.
3. Belum tersedianya data target dan realisasi output.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka disepakati bersama antara tim monitoring DJPK yang terdiri lintas direktorat dalam DJPK, bahwa sebagai langkah awal pelaksanaan monitoring dipilih perangkat/instrumen berupa kuesioner/daftar pertanyaan yang terstruktur. Kuesioner ini meliputi 4 (empat) aspek atau area monitoring, yaitu:

- (1) Perencanaan dan Penganggaran;
- (2) Pelaksanaan Anggaran;
- (3) Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan; serta
- (4) Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan *Continuous Improvement*.

Kuesioner Monitoring terdiri dari 43 pertanyaan, meliputi 17 pertanyaan area monitoring Perencanaan dan Penganggaran, 10 pertanyaan area monitoring Pelaksanaan Anggaran, 8 pertanyaan area monitoring Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 8 pertanyaan area monitoring Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan *Continuous Improvement*. Instrumen monitoring (kuesioner) ini merupakan hasil pengembangan dari instrumen dan perangkat monitoring yang telah digunakan oleh DJPK pada pelaksanaan monitoring periode sebelumnya dan penyesuaian terhadap instrumen monitoring PUG yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selain kuesioner, DJPK pun menyiapkan lembar kunjungan lapangan (lembar observasi) yang digunakan oleh Tim Monitoring untuk mendokumentasikan data dan informasi terkait sarana prasarana (sarpras), kantor pelayanan, dan penerima manfaat.

## 2.1.2 Penetapan Tim Monitoring

Tim Monitoring berasal dari Tim PUG DJPK dengan memperhatikan konfigurasi antara unit pendukung (Sekretariat) dengan unit teknis (Direktorat). Pejabat struktural Eselon IV atau Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (AKPD) Muda memimpin Tim Monitoring. Keikutsertaan perwakilan dari direktorat di DJPK khususnya direktorat sangat diperlukan karena mempunyai pemahaman yang mendalam terkait kebijakan dan alokasi TKD maupun kebijakan HKPD secara keseluruhan. Tim Monitoring lapangan bertugas selain mengumpulkan (enumerator) juga menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan.

## 2.2 Tahap Pelaksanaan Monitoring

DJPK didukung oleh SKALA melaksanakan monitoring implementasi HKPD yang berkontribusi kepada PUG di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota antara tanggal 15 Mei hingga 7 Juni 2024. Tim Monitoring yang terdiri dari 4 orang dari DJPK dibantu oleh Tim SKALA Nasional dan SKALA Daerah mengunjungi setiap daerah (provinsi dan kab/kota di provinsi tersebut) selama 4 hari. Agenda pelaksanaan monitoring terdiri dari Koordinasi dengan Panitia Daerah (DJPb dan SKALA Daerah), Lokakarya/FGD, dan Kunjungan Lapangan/Observasi.

### 2.2.1. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Tim Monitoring memfasilitasi FGD dengan para pemangku kepentingan (responden) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan kuesioner. Anggota Tim Monitoring memfasilitasi setiap kelompok responden untuk mendiskusikan setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. FGD tersebut kemudian menghasilkan konsensus kesepakatan jawaban dari setiap pertanyaan di kuesioner. Hasil kesepakatan FGD kemudian dibahas dalam pleno untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi tambahan dari forum yang lebih luas sebagai representasi jawaban dari daerah. Selain itu, forum menyepakati bukti/dokumen yang harus disiapkan untuk mendukung jawaban sekaligus membahas persiapan lokasi kunjungan lapangan yaitu 8 provinsi dan 8 kabupaten/kota.



SKALA mendukung Tim Monitoring dalam pengumpulan data dan informasi ini mulai dari persiapan, pelaksanaan FGD, sampai dengan kunjungan lapangan.

### 2.2.2. Kunjungan Lapangan (Observasi)

Setelah FGD, Tim Monitoring kemudian mengunjungi lokasi yang telah ditentukan Pemda untuk mengumpulkan sekaligus mengkonfirmasi data dan informasi pendukung lainnya. Tim Monitoring menggunakan lembar observasi untuk mendokumentasikan data dan informasi terkait namun tidak terbatas pada aspek sarana prasarana (sarpras), kantor pelayanan, dan penerima manfaat. Selain itu, Tim Monitoring mengambil beberapa video testimoni dari narasumber kunci (*key person*) dan foto yang digunakan sebagai evidence pendukung yang memperkuat hasil FGD.

## 2.3. Tahap Pelaporan

Tim Monitoring menyusun laporan awal hasil monitoring implementasi HKPD melalui TKD responsif gender berdasarkan temuan masing-masing daerah. Laporan awal tersebut kemudian dikonsolidasikan dalam workshop/lokakarya yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Monitoring. Selain mengkonsolidasikan laporan awal, dalam workshop, Tim Monitoring melakukan verifikasi dan validasi hasil *desk review* atas pelaksanaan TKD Responsif Gender, skoring terhadap 4 aspek monitoring, dan elaborasi temuan kunjungan lapangan. Lokakarya ini kemudian menghasilkan laporan utuh hasil monitoring terkait implementasi HKPD melalui TKD yang responsif gender dan juga laporan per provinsi dan kabupaten/kota.

## 2.4. Metode Monitoring

Monitoring implementasi HKPD melalui TKD Responsif Gender ini dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

### a. Desk Review/studi literature

Tim Monitoring melakukan desk review terhadap TKD 16 daerah lokasi monitoring untuk memetakan besaran alokasi TKD dan jenis-jenis TKD Tahun Anggaran 2023-2024 yang potensial mendukung PUG dan berkontribusi terhadap indikator kesetaraan gender. Setelah dikombinasikan dengan data yang lain, hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan TKD Responsif Gender.

### b. Lokakarya/Focus Group Discussion (FGD)

Tim Monitoring melakukan diskusi group terarah (FGD) untuk memperoleh data dan informasi implementasi HKPD melalui TKD yang responsif gender melalui konsensus atau kesepakatan jawaban terhadap pertanyaan kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam FGD ini adalah kuesioner yang disiapkan oleh Tim Monitoring. Lokakarya/FGD dalam rangka Monitoring Implementasi Kebijakan HKPD melalui TKD Responsif Gender dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 6 Juni 2024 bertempat di aula gedung instansi vertikal Kementerian Keuangan dan didukung oleh SKALA.

Berikut adalah waktu dan lokasi pelaksanaan Lokakarya/FGD Monitoring di masing-masing daerah:

Tabel 1: Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lokakarya

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Daerah	Tempat Kegiatan
1	15 Mei 2024	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Aula KPPN Kupang
2	16 Mei 2024	Kota Kupang	Aula KPP Pratama Kupang
3	21 Mei 2024	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Aula Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	22 Mei 2024	Kabupaten Lombok barat	Aula Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	21 Mei 2024	Provinsi Gorontalo	Aula Kanwil DJPB Gorontalo
6	22 Mei 2024	Kabupaten Bone Bolango	Aula Kanwil DJPB Gorontalo
7	21 Mei 2024	Provinsi Maluku	Aula GKN Ambon
8	22 Mei 2024	Kota Ambon	Aula GKN Ambon
9	28 Mei 2024	Provinsi Aceh	Aula Lt. 5 Gd D Kanwil DJPB Aceh
10	29 Mei 2024	Kota Banda Aceh	Aula Lt. 5 Gd D Kanwil DJPB Aceh
11	29 Mei 2024	Provinsi Papua	Aula Kanwil DJPB Papua
12	30 Mei 2024	Kabupaten Jayapura	Aula Kanwil DJPB Papua
13	5 Juni 2024	Provinsi Papua Barat	Aula GKN Manokwari
14	6 Juni 2024	Kabupaten Manokwari	Aula GKN Manokwari
15	5 Juni 2024	Provinsi Kalimantan Utara	KPPN Tarakan
16	6 Juni 2024	Kota Tarakan	KPPN Tarakan

Peserta Lokakarya/FGD terdiri dari:

1. Perwakilan Program SKALA
2. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPPO), Kementerian PPN/Bappenas
3. Direktorat Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Kementerian Dalam Negeri
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nama instansi pemerintah daerah disesuaikan dengan responden yang dipilih berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pemerintah Daerah. Pelaksanaan FGD dibagi menjadi beberapa tahapan yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran peserta. Tahapan pelaksanaan lokakarya meliputi:

1. Penggalan informasi oleh enumerator di masing-masing grup diskusi;
2. Pengumpulan informasi dan kompilasi dokumen pendukung;
3. Penilaian (skoring) dari tiap pertanyaan pada kertas kerja kuesioner;

4. Tabulasi data penilaian dari masing-masing area monitoring dan; dan
5. Konsolidasi data penilaian seluruh Tim Monitoring.

### **c. Kunjungan Lapangan/Observasi**

Tim Monitoring mengunjungi lokasi pelayanan untuk melakukan observasi atas manfaat kebijakan HKPD dan alokasi TKD melalui wawancara dan pengambilan video testimoni dari narasumber kunci. Observasi ini diarahkan pada tiga lokus, yaitu:

- a) sarana prasarana/ infrastruktur daerah; dan/atau
- b) kantor pelayanan; dan/atau
- c) penerima manfaat

Kunjungan lapangan dilakukan setelah pelaksanaan FGD/lokakarya dengan pemilihan lokasi sampel diserahkan pada pemerintah daerah yang menjadi responden.

Pelaksanaan kunjungan lapangan/observasi dimulai dari:

1. Wawancara dengan pimpinan/ penanggung jawab di lokasi kunjungan dalam bentuk tanya jawab singkat;
2. Observasi lapangan dan dokumentasi;
3. Pengambilan video testimoni; dan
4. Input dan tabulasi penjelasan dan keterangan pada form observasi.

Hasil wawancara menjadi deskripsi dari observasi kunjungan lapangan yang meliputi proses, sistem layanan, manfaat, kendala/ tantangan, solusi, dan tindak lanjut atau rencana ke depan. Dokumentasi berupa foto menjadi bahan laporan observasi beserta video testimoni.

### **d. Skoring**

Tim Monitoring melakukan skoring dengan menggunakan skala Likert untuk setiap pertanyaan dalam Kuesioner Monitoring yang terdiri dari 43 pertanyaan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Penentuan skor dilakukan secara kolektif oleh Tim Monitoring setelah melakukan wawancara melalui Lokakarya/FGD serta kunjungan lapangan.

Skor monitoring diklasifikasikan berdasarkan skala 1 sampai 5, di mana skor 1 merupakan skor terendah dan skor 5 merupakan skor tertinggi. Berikut adalah kriteria skoring yang digunakan dalam monitoring ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2: Skala Skoring dan Penjelasan

Skor dan Skala Penilaian	Penjelasan
<b>Skor 5:</b> Sangat Baik	Responden mampu menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh Tim Monitoring dengan baik, mampu memberi contoh konkrit berbasis data dan fakta, serta menyertakan bukti (evidence) yang memadai, termasuk ditunjukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
<b>Skor 4:</b> Baik	Responden mampu menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh Tim Monitoring dengan baik, mampu memberi contoh yang konkrit berbasis data dan fakta, namun belum mampu dibuktikan masuk di dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.
<b>Skor 3:</b> Cukup	Responden mampu menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh Tim Monitoring dengan baik, mampu memberi contoh yang konkrit berbasis fakta, namun data kuantitatifnya belum memadai dan belum tercantum dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.
<b>Skor 2:</b> Kurang Baik	Responden mampu menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh Tim Monitoring dengan baik, namun tidak disertai dengan data, fakta, atau bukti (evidence) yang memadai.
<b>Skor 1:</b> Sangat Kurang Baik	Responden tidak mampu menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh Tim Monitoring karena ketiadaan data, tidak ada fakta, serta tidak ada bukti (evidence) pendukung apapun.

Pada laporan ini akan menyajikan total penilaian yang merupakan agregat skor di mana dalam skala Likert adalah total skor yang didapat dari penjumlahan skor masing-masing item pada skala Likert. Rumus yang digunakan adalah  $(\text{bobot skor} \times \text{jumlah indikator/pertanyaan}) / (\text{jumlah indikator/pertanyaan dalam satu dimensi})$ , karena itu metode ini akan menghasilkan koma di belakang angka. Penjelasan angka setelah koma dapat menunjukkan nuansa dan kecenderungan yang berbeda dibandingkan skor yang tunggal.

## LAPORAN MONITORING

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# BAB III

# Pembahasan dan Analisis



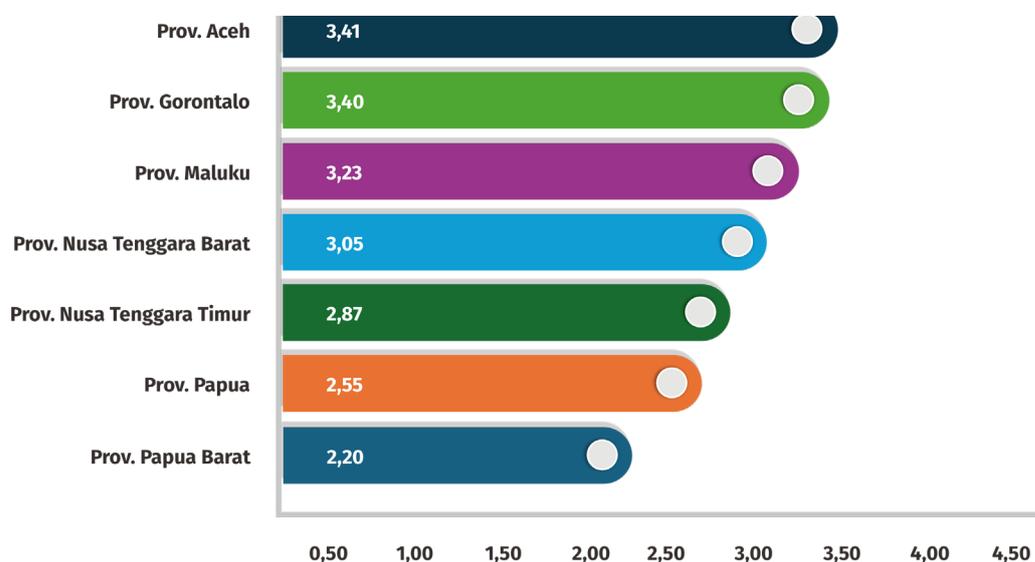
# BAB III

## Pembahasan dan Analisis

### 3.1 Skor Agregat dan Peringkat Provinsi dalam Implementasi HKPD Responsif Gender

Hasil penilaian terhadap 4 (empat) area monitoring dikalkulasikan dengan proporsi yang sama, dengan angka nol diperhitungkan *blank* (kosong) agar tidak mendistorsi angka rata-rata yang dihasilkan. Sebelum masuk pada pembahasan masing-masing area, berikut ini disajikan hasil penilaian atas keseluruhan area monitoring (agregat 8 pemerintah provinsi dan 8 kabupaten/kota). Hasil penilaian dibedakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, karena kewenangan dan rentang kendali administrasi yang dimiliki. Skor agregat 8 pemerintah provinsi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 4,16 dan terendah yaitu Provinsi Papua Barat dengan skor 2,20. Rata-rata skor agregat 8 pemerintah provinsi adalah sebesar 3,12 dan terdapat 4 pemerintah provinsi yang berada di atas rata-rata, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku. Sedangkan terdapat 4 pemerintah provinsi yang berada di bawah rata-rata, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Grafik 2. Skor Agregat 8 Pemerintah Provinsi



Keunggulan kompetitif dari masing-masing pemerintah provinsi terhadap 4 area monitoring, didominasi oleh skor area monitoring Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana tabel berikut, kecuali Pemerintah Provinsi Papua

yang memiliki skor sama besar pada area monitoring Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan dengan area monitoring Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu 2,75. Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki skor paling besar pada area monitoring Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 3: Komparasi Skor Agregat 8 Provinsi

Daerah	1. Perencanaan dan Penganggaran	2. Pelaksanaan Anggaran	3. Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan	4. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Continuous Improvement	Rata-rata Daerah
Prov. Kalimantan Utara	4,35	4,20	3,88	4,00	4,16
Prov. Aceh	4,13	3,00	3,63	2,25	3,41
Prov. Gorontalo	4,24	3,70	2,25	2,48	3,40
Prov. Maluku	3,91	3,67	2,67	2,48	3,23
Prov. Nusa Tenggara Barat	3,81	3,22	2,88	1,50	3,05
Prov. Nusa Tenggara Timur	3,47	3,13	2,71	1,63	2,87
Prov. Papua	2,73	1,89	2,75	2,75	2,55
Prov. Papua Barat	2,25	2,75	1,50	2,25	2,20
<b>Rata-Rata Area Monitoring</b>	<b>3,62</b>	<b>3,20</b>	<b>2,79</b>	<b>2,39</b>	<b>3,12</b>

Statistik deskriptif di antara 4 area monitoring dari skor agregat pemerintah provinsi ditunjukkan pada tabel berikut, di mana nilai rata-rata tertinggi dari area monitoring Perencanaan dan Penganggaran sebesar 3,61 sedangkan terendah yaitu area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* sebesar 2,39. Skor minimum tertinggi dari area Perencanaan dan Penganggaran sebesar 2,25 dan terendah adalah dari area Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Pengawasan dan Kapasitas SDM sebesar 1,50. Skor maksimum tertinggi yaitu dari area Perencanaan dan Penganggaran sebesar 4,35 dan skor maksimum terendah berasal dari area Pemantauan dan Evaluasi, yaitu 3,88.

Standar deviasi menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,77 dari area Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* dan terendah dari area Pelaksanaan Anggaran sebesar 0,70. Area Perencanaan dan Penganggaran merupakan area yang memiliki keunggulan relatif dari ketiga area lainnya, sedangkan area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* merupakan titik kritis yang perlu diperbaiki dan memiliki skor yang paling bervariasi di antara area monitoring lainnya. Area Pelaksanaan Anggaran memiliki variasi skor terendah.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Skor Agregat 8 Provinsi

	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan Anggaran	Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Continuous Improvement
Rata-Rata	3,61	3,19	2,78	2,49
Minimum	2,25	1,89	1,50	1,50
Maximum	4,35	4,20	3,88	4,00
Standar Deviasi	0,75	0,70	0,74	0,77

## 3.2. Hasil Monitoring Implementasi HKPD Responsif Gender Tingkat Provinsi

### 3.2.1. Provinsi Kalimantan Utara

#### a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Skor Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender cukup tinggi, yakni 4,35 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Kaltara menduduki peringkat pertama dari delapan provinsi lokasi dampingan SKALA yang dilakukan monitoring implementasi HKPD-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya skor Provinsi Kaltara pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

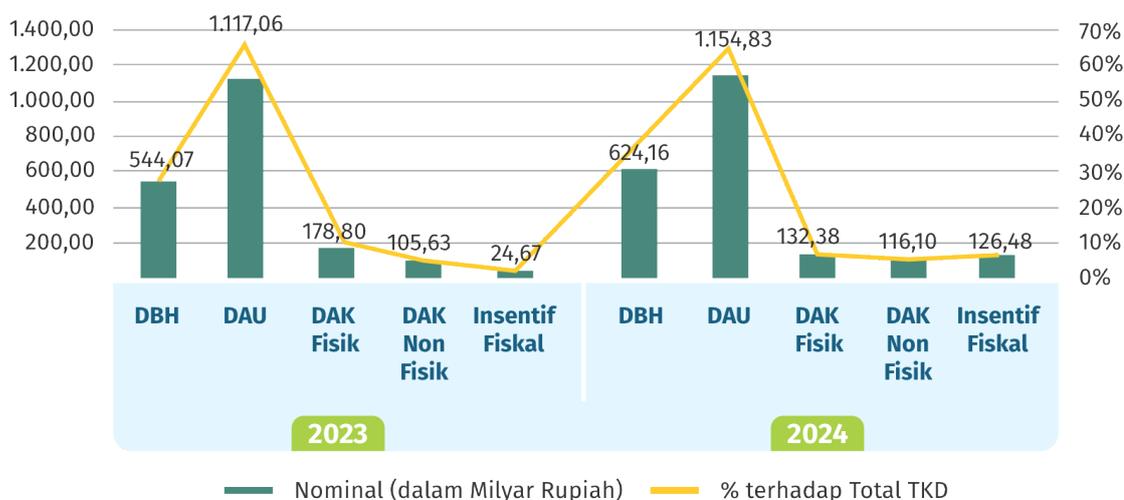
Pertama, Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kaltara telah berperspektif gender, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2021-2026. Pada Misi 1 menyebutkan bahwa orientasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan kemandirian daerah. Penjabaran atas misi ini tampak pada strategi ke-5, yaitu pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan arah kebijakan, antara lain: meningkatkan peran dan kualitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatkan peran gender dalam semua sektor pembangunan; dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kedua, narasi PUG juga dituangkan dalam RPJMD dan RKPD, baik pada bagian pendahuluan maupun detail dalam pembahasan. Pemerintah Provinsi Kaltara telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pokja PUG, menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, dan Profil Gender dengan *leading* sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Ketiga, dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, PUG secara spesifik belum dibahas, namun semua usulan terhadap materi maupun anggaran PUG hasil dari pembahasan internal pemerintah daerah dengan DPRD tidak ada penolakan.

Keempat, perencanaan dan penggunaan TKD yang mendukung pengarusutamaan gender, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, yang didukung dengan dokumen perencanaan dan DPA. Berikut adalah potret TKD Provinsi Kalimantan Utara TA. 2023-2024 sebagaimana di Grafik 3 dan Tabel 5.

Grafik 3: Tren TKD Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Tabel 5: TKD Responsif Gender  
Provinsi Kalimantan Utara TA. 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>544,07</b>	<b>28%</b>	<b>624,16</b>	<b>31%</b>	<b>584,11</b>	<b>29%</b>
DBH-Cukai Hasil Tembakau	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>1.117,06</b>	<b>57%</b>	<b>1.154,83</b>	<b>57%</b>	<b>1.135,94</b>	<b>57%</b>
Pendidikan	76,89	7%	116,54	10%	96,71	8%
Kesehatan	23,58	2%	10,30	1%	16,94	2%
Infrastruktur	133,87	12%	105,23	9%	119,55	11%
<b>DAK Fisik</b>	<b>178,80</b>	<b>9%</b>	<b>132,38</b>	<b>6%</b>	<b>155,59</b>	<b>8%</b>
Pendidikan	90,06	50%	58,96	45%	74,51	47%
Kesehatan	7,55	4%	6,39	5%	6,97	5%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>105,63</b>	<b>5%</b>	<b>116,10</b>	<b>6%</b>	<b>110,87</b>	<b>6%</b>
BOS	56,79	54%	60,62	52%	58,71	53%
BOK	4,41	4%	2,26	4%	3,33	4%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	2,09	2%	2,59	4%	2,34	3%
Pelayanan PPPA	0,38	0,4%	0,52	1%	0,45	1%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>24,67</b>	<b>1%</b>	<b>126,48</b>	<b>6%</b>	<b>75,58</b>	<b>4%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>1.970,23</b>		<b>2.040,12</b>		<b>2.005,17</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

## **b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender**

Provinsi Kaltara mendapat skor 4,20 point dari skala 1 sampai 5 pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender. Skor ini menempatkan Provinsi Kaltara menempati posisi terbaik dibanding dengan delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang mempengaruhi cukup maksimalnya skor pada aspek pelaksanaan anggaran antara lain:

Pada area pelaksanaan anggaran TKD yang mendukung PUG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan dari Kementerian/Lembaga pengampu DAK Fisik Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Sesuai dengan kewenangan, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan peningkatan SDM kepada para pegawai di dinas Kabupaten/Kota. Untuk jenis dana DAK Non-fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, digunakan dalam rangka keberlanjutan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang merupakan kebijakan nasional dan peningkatan SDM Dinas PPPA Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk pelaksanaan BOK di Dinas Kesehatan, pelaksanaan tahun 2023 terdapat anggaran yang tidak dapat terealisasi 100 persen. Hal ini sebagai akibat rentang waktu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang cukup lama, sehingga terjadinya eskalasi perubahan harga tersebut belum ada antisipasinya.

Untuk pelaksanaan DAU *Specific Grant*, terdapat anggaran yang direalisasikan untuk kegiatan pendukung PUG di antaranya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan UKP rujukan, UKM, dan UKM Rujukan. Selain itu, sumber pendanaan dari PAD yang turut digunakan dalam mendukung responsif gender ini berasal dari earmarking pajak rokok untuk layanan kesehatan, serta pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan besar yang ada di Kalimantan Utara untuk penanganan stunting. Salah satu kegiatan yang dilakukan berupa program Bapak Asuh Stunting.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melibatkan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Beberapa kegiatan tersebut, antara lain:

1. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (melibatkan perempuan kepala rumah tangga dan ibu-ibu pengelola UMKM pemula);
2. Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (melibatkan perempuan, anak, dan kelompok rentan), PATBM, dan Relawan SAPA129;<sup>2</sup>
3. Kabupaten/Kota Layak Anak.

---

<sup>2</sup> SAPA129 adalah layanan pengaduan cepat, aman, dan mudah diakses untuk perempuan dan anak yang mengalami atau mengetahui kekerasan, yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Kaltara pada Aspek ini cukup tinggi, yakni 3,88 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Kaltara juga menempati posisi tertinggi pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan tingginya skor pada aspek ini antara lain dengan penjelasan di bawah ini.

Bappeda dan Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara melakukan pemantauan rutin dan dibentuk tim yang beranggotakan perwakilan dari setiap Dinas. Namun demikian, dalam hal pengawasan pelaksanaan anggaran yang responsif gender belum terdapat pengawasan spesifik terkait PUG namun tema PUG sudah menjadi tema yang diterapkan dalam berbagai kegiatan. Masih diperlukan peningkatan terutama untuk menuangkan secara spesifik pengawasan PUG agar penilaian dan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya setiap OPD belum ada tagging khusus Anggaran Responsif Gender (ARG). Terlepas dari kekurangan tersebut monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Inspektorat tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

Pada praktek di lapangan, melalui hasil analisa, diskusi dan interview, terdapat praktek baik yang berjalan dengan individu yang menjadi pelopor dan penggerak PUG di provinsi Kalimantan Utara. Sebagai contoh, beberapa tokoh dari forum PUSPA<sup>3</sup> Kaltara menjadi motor penggerak dan juga PUSPA mendapat dukungan dari Pemda dalam pelaksanaan kegiatannya.

### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi Kaltara pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender sangat tinggi, yakni 4,00 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Kaltara menempati posisi pertama dan berselisih cukup jauh dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan tingginya skor pada aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*, antara lain:

Pemprov Kaltara memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG. Salah satu bentuk nyata berupa anggaran bantuan sosial kepada disabilitas. Sementara untuk penguatan SDM, Pemprov Kaltara juga sudah mengadakan pelatihan terkait pengarusutamaan gender kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan penguatan kapasitas SDM kepada dinas PPPA Kabupaten/Kota di wilayah Kaltara. Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki terkait PUG diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG masih terbatas karena

---

<sup>3</sup>Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan anak. PUSPA berfungsi sebagai wadah bagi berbagai lembaga masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Dasar kebijakan pembentukan PUSPA berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 13/2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang PPPA.

*focal point* masih ada di tingkat menengah dan belum di level pimpinan tertinggi.

Pemprov Kaltara melakukan pengembangan inovasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak yaitu SipayungEmaku dan HarianSapa, dan masuk dalam kompetisi inovasi tingkat nasional. PUSPA Kaltara pernah melaksanakan studi banding (*benchmarking*) ke PUSPA Yogyakarta.

Untuk pengalokasian anggaran telah memperhatikan implementasi PUG khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana PUG, termasuk dalam memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan besar di Kaltara dalam mendukung agenda PUG dan bantuan kepada kelompok rentan dan disabilitas.

#### **e. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang Responsif Gender di atas, beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, antara lain:

1. Perlu ada sosialisasi untuk eksekutif (Pimpinan dan Kepala Perangkat Daerah) terkait Implementasi PUG.
2. Dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk kerja-kerja Pokja PUG, seperti koordinasi dan rapat rutin, pengatan kapasitas, dan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PUG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
3. Dibutuhkan instrumen yang dapat meningkatkan komitmen dari pimpinan untuk pelaksanaan PUG yang lebih efektif dan berdampak di tataran layanan.
4. Perlunya Pelatihan dan FGD untuk seluruh Dinas terkait PUG secara berkala. PUSPA dapat menjadi penggerak PUG.
5. Mendorong belanja anggaran yang lebih berdampak pada dukungan terhadap sarana dan prasarana untuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti guiding block, pembangunan parkir khusus perempuan dan penyandang disabilitas.
6. Peningkatan pemanfaatan CSR untuk kegiatan Pelayanan Terkait PUG.

### **3.2.2. Provinsi Gorontalo**

#### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Gorontalo pada aspek ini adalah 4,24 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Gorontalo berada di peringkat dua dari delapan provinsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya skor Provinsi Gorontalo pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

Pertama, Visi Jangka Menengah Provinsi Gorontalo 2017-2022 masih mengikuti Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025 yakni Gorontalo Maju dan Mandiri. Visi ini disebut sudah responsif gender karena

mempunyai makna bahwa Pemerintah Gorontalo ingin meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin pertumbuhan ekonomi berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Inklusif disini diterjemahkan sebagai keperpihakan kepada petan dan nelayan kecil, koperasi dan UMKM, serta komitmen pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah untuk semua lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Kedua, baik dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 dan RPJMD 2023-2026 telah diuraikan target dan indikator pembangunan kesetaraan gender, meliputi Indeks Pembangunan Gender (IPG) beserta komposit pembentuknya seperti Usia Harapan Hidup (Lk/Pr), Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Lk/Pr), Harapan Lama Sekolah/HLS (Lk/Pr), Pengeluaran Per Kapita (Lk/Pr), serta Indeks Ketimpangan Gender (IKG)<sup>5</sup> beserta kompositnya, yaitu Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan.<sup>6</sup>

Ketiga, Pemerintah Gorontalo telah berupaya memenuhi prasyarat PUG meliputi menyusun Profil Gender pada tahun 2022<sup>7</sup>, merumuskan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) 2018-2022 yang telah dipayungi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo No. 89 Tahun 2018, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) setiap tahun melalui pelatihan PPRG yang diselenggarakan oleh Dinas PPPA, serta melakukan ujicoba penandaan anggaran responsif gender yang didukung oleh SKALA. Namun upaya ini belum optimal karena belum didukung oleh anggaran yang memadai untuk menjalankan RAD PUG, belum semua perangkat daerah menyusun GAP dan GBS, dan menurunnya kapasitas PUG perangkat daerah karena rotasi dan mutasi jabatan.

Keempat, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN sudah diperuntukkan sesuai dengan penggunaannya, meski belum maksimal. Misalnya,

- a. Earmarking Pajak Rokok yang digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi,
- c. DAK Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD, serta
- d. Dana Desa digunakan untuk penanganan stunting;
- e. DAK Non-Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) digunakan untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Berikut adalah potret TKD Provinsi Gorontalo TA. 2023-2024:

---

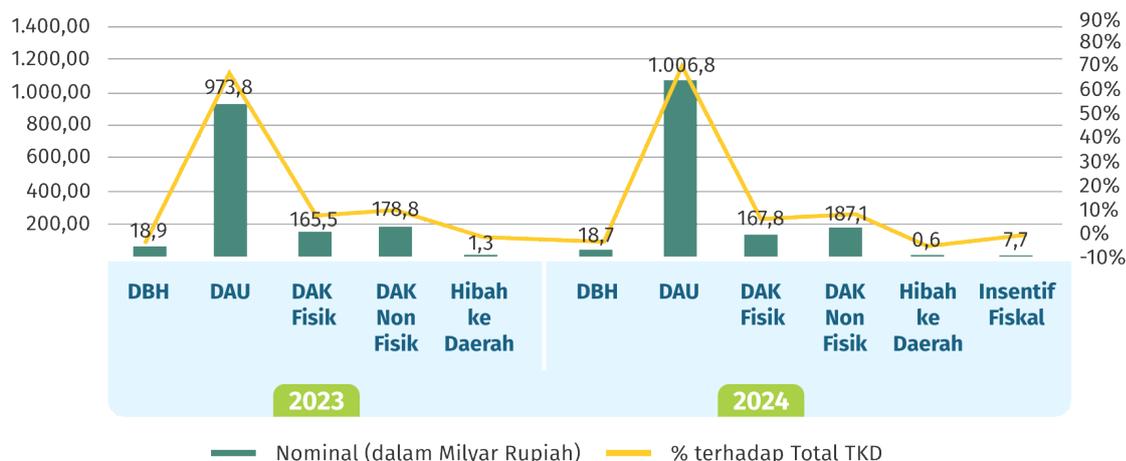
<sup>4</sup> Bab V RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, hal. V-1-14.

<sup>5</sup> Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah Indeks untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada dimensi Kesehatan Reproduksi (Kespro), Pemberdayaan (Pendidikan dan Partisipasi Politik), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

<sup>6</sup> Bab II RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, hal. II-37-42.

<sup>7</sup> <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/view/3650/1732>

Grafik 4: Tren TKD Provinsi Gorontalo  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

## b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender

Skor Provinsi Gorontalo pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender pada posisi sedang, yakni 3,70 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Gorontalo menempati posisi kedua terbaik pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya skor pada aspek pelaksanaan anggaran antara lain, karena rendahnya dukungan dana TKD untuk program/kegiatan/subkegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan kesetaraan gender (IPG dan IKG). Kalaupun ada pendanaan, sifatnya tidak berkelanjutan, tidak setiap tahun dianggarkan.

Provinsi Gorontalo mendapatkan Dana TKD sebesar Rp1,33 triliun pada 2023, di mana Rp973,8 milyar (72,8%) berupa DAU, Rp178,8 milyar (13,4%) DAK Non-Fisik, Rp165,5 milyar (12,4%) DAK Fisik, Rp18,8 milyar (1,4%) DBH, dan Rp1,2 milyar (0,1%) Hibah ke Daerah. Untuk mencapai target Usia Harapan Hidup (UHH) misalnya, Pemerintah Gorontalo hanya bisa mengandalkan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya (specific grant) Bidang Kesehatan sebesar Rp68,5 milyar dan DAK Non-Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp3,9 milyar. Pada 2023, Prov. Gorontalo tidak mendapatkan DAK Fisik Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi, serta DAK Non-Fisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Lihat tabel berikut:

Tabel 6: TKD Responsif Gender  
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>18,87</b>	<b>1%</b>	<b>18,66</b>	<b>1%</b>	<b>18,77</b>	<b>1%</b>
DBH-CHT	0,07	0,4%	0,06	0,3%	0,07	0,3%
<b>DAU</b>	<b>973,83</b>	<b>73%</b>	<b>1.006,77</b>	<b>73%</b>	<b>990,30</b>	<b>73%</b>
Pendidikan	136,77	14%	126,05	13%	131,41	13%
Kesehatan	68,56	7%	21,57	2%	45,07	5%

Pekerjaan Umum	40,60	4%	-	0%	20,30	2%
<b>DAK Fisik</b>	<b>165,50</b>	<b>12%</b>	<b>167,80</b>	<b>12%</b>	<b>166,65</b>	<b>12%</b>
Pendidikan	63,79	39%	33,29	20%	48,54	29%
Kesehatan	-	0%	76,27	45%	38,13	23%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>178,81</b>	<b>13%</b>	<b>187,09</b>	<b>13%</b>	<b>182,95</b>	<b>13%</b>
BOS	86,87	49%	-	0%	43,43	24%
BOK	3,96	2%	3,50	2%	3,73	2%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	2,02	1%	2,68	1%	2,35	1,3%
Pelayanan PPPA	0,38	0,2%	-	0%	0,19	0%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>1,29</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,60</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,94</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7,68</b>	<b>0,6%</b>	<b>3,84</b>	<b>0,3%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>1.338,31</b>		<b>1.388,60</b>		<b>1.363,45</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Tahun 2024, dana TKD Provinsi Gorontalo sebesar Rp1,38 triliun, meningkat tipis dibanding TKD 2023. Terjadi penurunan signifikan besaran DAU specific grant kesehatan dari 7% pada 2023 menjadi hanya 2,1% pada 2024. Namun DAK Fisik Bidang Kesehatan meningkat pesat dari Rp0,- pada 2023 menjadi Rp76,2 milyar pada tahun 2024. Dukungan anggaran yang tidak berkelanjutan juga terlihat pada DAK Non-Fisik untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPPA) yang dianggarkan hanya Rp375 juta pada 2023 namun hilang pada 2024. Lihat Tabel 6 di atas.

Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik grant bidang pendidikan digunakan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, termasuk aksesibilitas anak usia sekolah (Laki-laki dan Perempuan) terhadap pendidikan menengah dan kejuruan. Adapun DAU specific grant bidang kesehatan digunakan untuk pelayanan imunisasi lengkap bagi balita, persalinan di fasilitas kesehatan, akses sanitasi layak dan pengelolaan air minum. Adapun DAU block grant sebagian digunakan untuk mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pertemuan forum anak daerah, dan sosialisasi pengarusutamaan gender.

DAK Fisik Bidang Kesehatan Gorontalo telah digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan dengan standar kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta ramah terhadap perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak. Contoh konkrit TKD responsif gender Gorontalo adalah pembangunan tangga yang landai dan aksesibel bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, serta toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Non-Fisik berupa BOK dan BOKB telah digunakan untuk kegiatan sosialisasi, evaluasi screening layak hamil (pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko dan masalah kesehatan pada ibu hamil yang dapat dilakukan sebelum hamil dengan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi, atau selama masa kehamilan), evaluasi kematian ibu serta untuk kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Adapun DAK Non-Fisik untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan untuk kunjungan dan pelayanan psikologis bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sayangnya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak ini tidak setiap tahun diterima oleh Pemerintah Gorontalo.

Provinsi Gorontalo tidak menerima Dana Desa karena Dana Desa langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Namun, Pemerintah Gorontalo telah memberikan edukasi kepada desa-desa agar dapat dimanfaatkan di antaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrim yaitu membuat MCK Desa (1 dusun 1 MCK). Terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) belum dapat digunakan secara optimal untuk mendukung PUG karena anggaran terlalu kecil, hanya Rp735 ribu (2023) dan Rp577 ribu (2024).

Sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah yaitu earmarking Pajak Rokok yang digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya, di antaranya sosialisasi bahaya merokok untuk ibu, remaja dan anak, sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bahaya merokok bagi anak dan remaja, serta kawasan tanpa rokok.

Belum terdapat insentif/ kompensasi (pengurangan/potongan) Pajak dan Retribusi Daerah bagi kelompok rentan/ penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo, namun di beberapa kantor (contoh: Kantor Samsat) telah memberikan kemudahan pelayanan bagi kelompok rentan/ penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan lebih cepat saat membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat juga menyediakan ruang menyusui, kursi roda, serta sarana dan prasarana yang ramah bagi perempuan, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melibatkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yaitu ditempatkan di kantor Bappeda dan Dinas Sosial.

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Gorontalo pada aspek ini pada posisi rendah, yakni 2,25 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Gorontalo menempati posisi ketujuh pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini antara lain, belum berjalan fungsi Pokja PUG dan *Focal Point* PUG, termasuk Inspektorat Daerah yang merupakan salah satu Lembaga Penggerak PUG di daerah.

Pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di Provinsi Gorontalo telah diatur pada Pergub Gorontalo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo. Secara Ketentuan telah diatur bahwa Gubernur melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan, dengan dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra selaku koordinator penyelenggara pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo. Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD. Namun demikian secara pelaksanaan, apalagi semenjak pandemi Covid-19, pemantauan dan evaluasi kurang dilakukan secara optimal. Pun demikian peran dari Inspektorat Daerah, Kemendagri, dan BPK kurang spesifik terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran responsif gender.

Pasal 11 Pergub tersebut juga mengatur mengenai Focal Point PUG yang merupakan kelompok kerja dari aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing. Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang memahami tugas Pemberdayaan Perempuan yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG serta mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja. Focal point tersebut sudah berfungsi dan berjalan dengan baik.

#### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi Gorontalo pada aspek ini relatif rendah, yakni 2,38 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Gorontalo menempati posisi keempat pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* antara lain, pemisahan kelembagaan PPPA dari Dinas Sosial, keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM sehingga memengaruhi pengembangan inovasi PUG dan belum adanya strategi insentif untuk keberlanjutan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup terkait pemanfaatan TKD untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG). Hal tersebut didukung dengan telah dilaksanakannya penguatan kapasitas melalui pelatihan PPRG dan pembuatan GAP dan GBS saat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Namun, kegiatan penguatan kapasitas ini belum kontinu dan belum melibatkan seluruh Perangkat Daerah, terutama di bagian perencana.

Pemahaman dan kapasitas yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di Gorontalo belum sepenuhnya diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung PUG. Hal tersebut juga dibuktikan dengan belum adanya upaya membuat inovasi, skema/insentif untuk inovasi, penilaian dan kompetisi secara rutin untuk inovasi pemanfaatan TKD untuk PUG.

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Tim Monitoring PUG Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. RSUD ini adalah salah satu rumah sakit yang menjadi salah satu lokus dari tiga lokus yang masuk dalam zona integritas. Untuk sarana dan prasarana di rumah sakit masih memiliki keterbatasan. Namun, secara

responsif gender di pelayanan sudah ada pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan. Toilet juga sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, namun belum ada toilet anak. Sudah ada aturan untuk mendahulukan pasien lansia, ibu hamil termasuk untuk pendaftaran. Sudah ada kursi – kursi khusus yang diperuntukan untuk ibu hamil dan lansia, ruang menyusui, penanda pasien lansia dan ibu hamil untuk dilayani terlebih dahulu. Untuk pasien ibu hamil terdapat IGD PONEK (Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) yang ruangnya terletak di bagian belakang dan berdekatan dengan ruang bersalin sehingga dapat memudahkan.

Demikian juga, sudah ada tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas.

RSUD dr. Hasri Ainun Habibie telah menjalin hubungan dengan Yayasan Tuna Rungu agar dapat memudahkan pelayanan dengan pasien tuna rungu. Namun sampai dengan saat ini RSUD belum memiliki standar untuk disabilitas Netra. RSUD telah memiliki regulasi untuk meringankan biaya pasien tidak mampu termasuk melalui pelayanan BPJS. Visi ke depan rumah sakit ini menjadi rumah sakit ramah disabilitas dan menjadi contoh rumah sakit lain.

Pada tahun 2021 RSUD mendapatkan anggaran Rp7 miliar DAK Fisik, namun tidak mendapatkan anggaran untuk periode 2022-2023. Pada tahun 2024 mendapatkan anggaran Rp63 miliar dan dialokasikan khusus untuk pembangunan ruangan gawat darurat sebanyak Rp30 miliar dan sisanya untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjang lain. Sarana prasarana rumah sakit masih belum sepenuhnya memadai, misalnya fasilitas untuk rawat inap, terdapat 122 tempat tidur. Gedung rawat inap yang ditempati merupakan gedung khusus IGD dan intensif yang diubah menjadi Gedung Rawat Inap. Rata – rata pasien masuk perhari kurang lebih 200 pasien. Direncanakan 3 target pengembangan yaitu: Ruang HD, Ruang Kemoterapi dan Ruang ICCU.

Untuk SDM rumah sakit cukup memadai, yaitu sebanyak 429 tenaga kerja dengan rincian 20 Dokter Spesialis dan 3 Dokter Sub-Spesialis. Tenaga kesehatan di RSUD ini beberapa kali ikut serta dalam program beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

Untuk pembangunan dan pengembangan, RSUD didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, dan juga DPRD. Visi rumah sakit di tahun 2023 adalah digital hospital. RSUD berhasil memenangkan Top Digital Implementation dengan predikat bintang 4. Layanan ini meningkat sebanyak 140% dari tahun 2022-2023. RSUD juga sangat aktif di social media seperti Website, facebook dan Instagram.

## **f. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen RPJMD Teknokratik dan dokumen RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah, termasuk visi-

- misi kepala daerah terpilih, penggunaan data terpilah gender dalam analisis permasalahan dan strategi daerah, penyusunan program prioritas daerah, dan estimasi anggarannya;
2. Mengintegrasikan isu gender dalam dokumen-dokumen tahunan daerah, seperti RKPD, Renja-PD, KUA-PPAS, dan APBD;
  3. Memastikan earmark Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Transfer ke Daerah (TKD) digunakan untuk program dan kegiatan yang responsif gender, seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi anak usia sekolah (laki-laki dan perempuan), pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan akses dan mutu kesehatan, khususnya yang berkontribusi terhadap Usia Harapan Hidup (UHH), Kesehatan Reproduksi bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi perempuan dan kelompok rentan;
  4. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) PDRD dan TKD yang responsif gender di daerah, selain digunakan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Gorontalo, dapat juga digunakan oleh provinsi untuk monev kabupaten dan kota di seluruh Gorontalo;
  5. Mengembangkan program dan kegiatan inovatif di tingkat provinsi yang mendukung PUG dan skema insentif bagi Perangkat Daerah atau Kabupaten/ Kota yang mengimplementasikan HKPD Responsif Gender sebagai upaya keberlanjutan.

### **3.2.3. Provinsi Aceh**

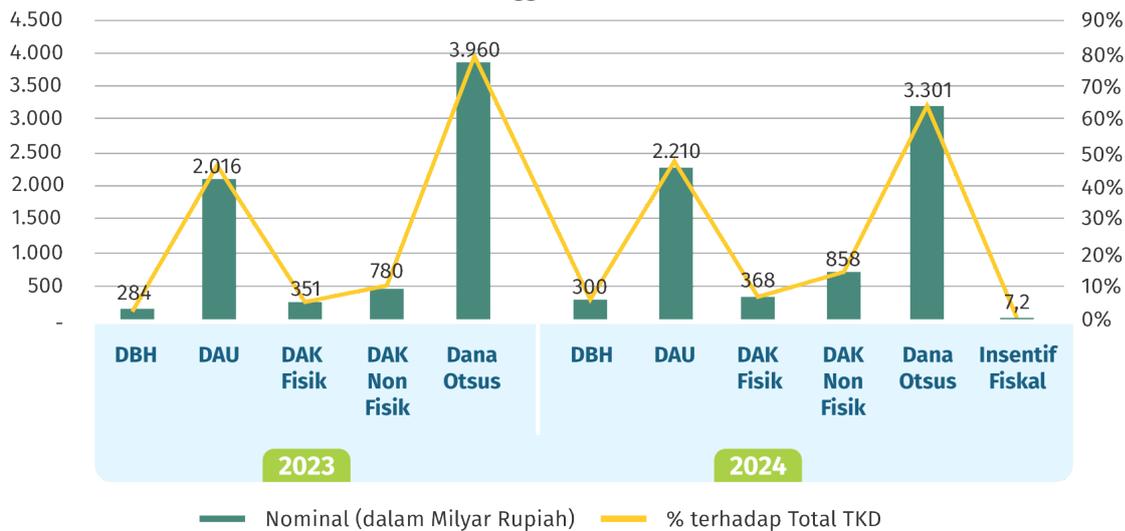
#### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Aceh pada aspek ini adalah 4,13 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Aceh berada di peringkat ketiga dari delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya yang dimonitor. Provinsi Aceh berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Provinsi Gorontalo yang masing-masing mendapatkan skor tertinggi pertama dan kedua. Faktor-faktor yang memengaruhi tingginya skor Provinsi Aceh pada aspek perencanaan dan penganggaran, antara lain:

Visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Aceh telah mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender, seperti yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi isu strategis yang diangkat dalam perencanaan pembangunan. Aspek gender juga menjadi salah satu syarat dalam pengajuan dan pembahasan anggaran, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Nomor 6 Tahun 2022 merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Provinsi Aceh mendapatkan alokasi anggaran melalui TKD rata-rata sebesar Rp7,2 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024). TKD ini berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Hibah Ke Daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Insentif Fiskal. Berikut adalah potret TKD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023-2024:

Grafik 5: Tren TKD Provinsi Aceh  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar anggaran yang berasal dari TKD tersebut belum melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diterima Pemprov. Aceh sebesar Rp18,8 milyar setiap tahun belum digunakan untuk upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Demikian juga dengan perencanaan DAK Fisik maupun DAK Non-Fisik yang belum melalui analisis gender. Provinsi Aceh sendiri tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik untuk Air Minum dan Sanitasi dan dana ini sangat penting untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Aceh. Berikut adalah rincian TKD Provinsi Aceh yang potensial untuk merencanakan dan diimplementasikan lebih responsif gender:

Tabel 7: TKD Responsif Gender  
Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rata-rata	
<b>DBH</b>	<b>283,53</b>	<b>4%</b>	<b>300,06</b>	<b>4%</b>	<b>291,79</b>	<b>4%</b>
DBH-CHT	19,25	7%	18,43	6%	18,84	6%
<b>DAU</b>	<b>2.015,96</b>	<b>27%</b>	<b>2.209,71</b>	<b>31%</b>	<b>2.112,83</b>	<b>29%</b>
Pendidikan	186,73	9%	226,42	10%	206,57	10%
Kesehatan	78,95	4%	41,19	2%	60,07	3%
Pekerjaan Umum	47,26	2%	23,85	1%	35,55	2%
<b>DAK Fisik</b>	<b>351,42</b>	<b>5%</b>	<b>368,06</b>	<b>5%</b>	<b>359,74</b>	<b>5%</b>
Pendidikan	236,50	67%	251,13	68%	243,82	68%
Kesehatan	36,30	10%	31,32	9%	33,81	9%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>779,96</b>	<b>11%</b>	<b>858,40</b>	<b>12%</b>	<b>819,18</b>	<b>11%</b>
BOS	328,01	42%	345,53	40%	336,77	41%
BOK	8,97	1%	4,61	1%	6,79	1%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%

BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	3,47	0,4%	6,77	1%	5,12	1%
Pelayanan PPPA	0,38	0,05%	0,41	0,05%	0,39	0,05%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>1,59</b>	<b>0,02%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0,80</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	-	<b>0%</b>	<b>7,21</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,60</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>3.960</b>	<b>54%</b>	<b>3.301</b>	<b>47%</b>	<b>3.630,65</b>	<b>50%</b>
<b>Dana Desa</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>7.392,46</b>		<b>7.044,73</b>		<b>7.218,59</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

## b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender

Pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, skor Provinsi Aceh pada posisi sedang, yakni 3,00 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Aceh menempati posisi keenam pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya skor pada aspek pelaksanaan anggaran antara lain:

Pelaksanaan anggaran yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG), Provinsi Aceh belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penekanan pada kewajiban penyusunan anggaran dan komitmen politik dari pimpinan daerah. Biasanya, pelaksanaan anggaran yang responsif gender hanya difokuskan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sementara OPD lainnya, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, hanya berperan sebagai pendukung, meskipun sudah ada anggaran yang responsif gender. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran responsif gender belum sepenuhnya terlihat maksimal, meskipun banyak OPD yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut secara tidak langsung.

DP3A Provinsi Aceh telah memaksimalkan penggunaan anggaran dari DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) sebesar Rp375 juta pada 2023 dan Rp406 juta pada 2024. Anggaran ini digunakan untuk penguatan kelembagaan UPT PPPA serta untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Namun demikian, kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Provinsi Aceh masih relatif tinggi.

Pemerintah Aceh juga telah mengimplementasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hal ini terlihat dari tingkat serapan anggaran ini yang cukup tinggi. Namun demikian, Pemerintah Aceh masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta penguatan ekonomi bagi perempuan. Dukungan terhadap penguatan pelaku ekonomi kecil dan UMKM tercermin dari alokasi DAK Non-Fisik untuk peningkatan koperasi dan UMKM sebesar Rp3,47 milyar pada 2023 dan naik signifikan pada 2024 sebesar Rp6,77 milyar.

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Aceh pada Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan yang Responsif Gender cukup tinggi, yakni 3,63 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Aceh menempati posisi kedua pada aspek ini. Bila dibandingkan dengan delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya, Provinsi Aceh hanya berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara. Faktor yang menyebabkan skor Provinsi Aceh cukup tinggi pada aspek ini antara lain:

Pemerintah Provinsi Aceh, melalui Bappeda dan Inspektorat Daerah, telah melakukan pemantauan rutin yang melibatkan perwakilan dari berbagai dinas. Namun, pemantauan ini masih terbatas pada dua OPD utama yang dianggap sebagai sektor penggerak, dan tidak terdapat penandaan khusus pada anggaran yang responsif gender di setiap OPD. Meskipun demikian, pemantauan dan evaluasi oleh Bappeda dan Inspektorat tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dari sisi pusat, Kemendagri juga melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan anggaran, meskipun perhatian pemerintah daerah terhadap hal ini masih kurang.

### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan Peningkatan Berkelanjutan**

Skor Provinsi Aceh pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 2,25 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Aceh menempati posisi keenam pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini dengan penjelasan berikut ini:

Pemahaman tentang PUG di Provinsi Aceh cukup baik, tetapi upaya peningkatan kapasitas dan penyegaran untuk pelaksanaan PUG masih terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang PUG di kalangan Perangkat Daerah. Apresiasi terhadap unit atau individu yang sensitif terhadap isu PUG juga masih minim. Salah satu inovasi yang patut diapresiasi adalah Aplikasi SIGAP yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Aplikasi ini dapat memberikan data secara real-time dan menjadi acuan bagi beberapa pemerintah daerah, meskipun pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan anggaran yang terbatas.

### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan lapangan dilakukan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Dinas P3A Provinsi Aceh, yang berlokasi dalam satu kompleks perkantoran dengan fasilitas yang memadai. UPTD P3A telah memiliki SOP untuk pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti layanan konseling dan rujukan. Selain itu, UPTD juga menyediakan akomodasi yang layak dan dapat diakses secara inklusif bagi klien. Publikasi terkait gender dan laporan berkala tersedia lengkap dan terkini. UPTD P3A juga menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak layanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat rentan menghadapi beberapa tantangan, tetapi pendanaan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang PPA telah dimanfaatkan sesuai dengan juknis dari Kementerian PPA. Untuk tahun

2023, lebih dari 150 klien telah dilayani, dan untuk mendukung kelangsungan operasional, tersedia dana dari PAD selain DAK Non Fisik PPA.

#### **f. Rekomendasi**

1. Meningkatkan peran koordinasi, bimbingan dan pengawasan melalui peran inspektorat untuk implementasi PUG.
2. Untuk implementasi anggaran yang responsif gender dan inklusif, pemma memerlukan petunjuk teknis. Untuk itu Pemerintah Pusat (DJPK, Bappenas, Kemendagri, dan KL Teknis) diharapkan menyusun petunjuk teknis yang rinci terkait komponen TKD (DAK, DAU, DBH) responsif gender dan inklusif.
3. Mengusulkan DJPK memasukkan tingkat implementasi anggaran responsif gender sebagai salah satu kriteria dalam penilaian pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah.
4. Perlunya penambahan Bidang PPA dalam DAK Fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana UPTD PPA, serta DAK Non Fisik untuk operasional UPTD PPA, yang dapat diusulkan oleh Kementerian PPA untuk periode 2025-2029.

#### **3.2.4. Provinsi Maluku**

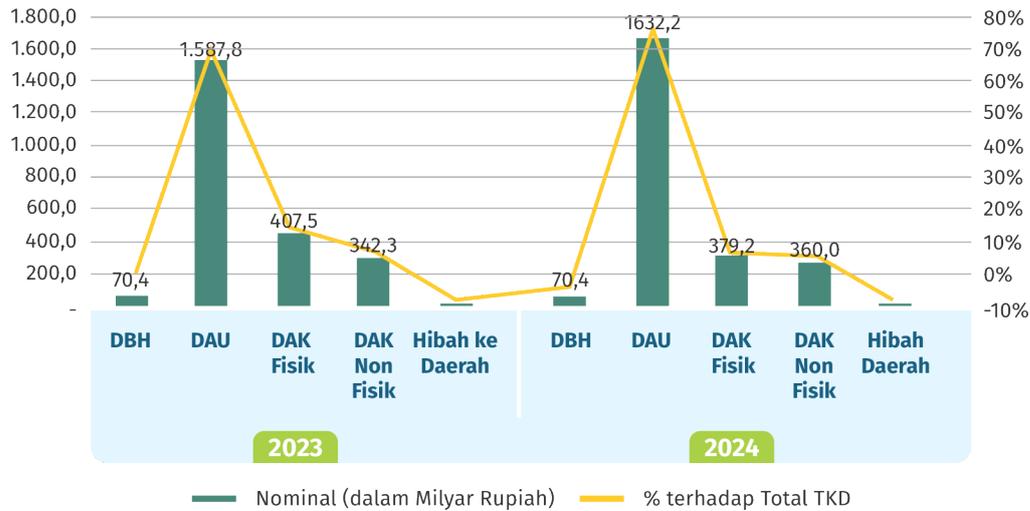
##### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Maluku pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada posisi sedang, yakni 3,91 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Maluku berada di peringkat keempat dari delapan provinsi lokasi monitoring. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor Provinsi Maluku pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

Visi dan Misi Gubernur Maluku telah mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam misi keenam yang berfokus pada 'Meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.' PUG telah menjadi topik penting dalam rapat eksekutif dan legislatif pemerintah daerah. Dalam hal penganggaran, PUG telah dipertimbangkan, dengan keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses tersebut. SK Pokja PUG telah dibentuk, namun implementasinya belum berjalan optimal meskipun telah diterbitkan KEP-200/2018. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kurang familiar dengan PUG, sehingga saat ini PUG lebih banyak dikaitkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Konsekuensinya, Anggaran Responsif Gender (ARG), Gender Analysis Pathway (GAP), dan Gender Budget Statement (GBS) belum sepenuhnya diimplementasikan.

Provinsi Maluku mendapatkan TKD sebesar Rp2,39 triliun pada 2023 dan Rp2,44 triliun pada 2024. TKD ini terdiri dari DBH yang rata-rata sebesar Rp70,4 milyar, DAU Rp1,6 triliun, DAK Fisik Rp393,3 milyar, dan DAK Non-Fisik Rp351,1 milyar. Provinsi Maluku tidak mendapatkan Dana Hibah ke Daerah, Insentif Fiskal, maupun Dana Desa dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, anggaran TKD yang diterima oleh Provinsi Maluku sebenarnya bisa dikelola lebih responsif gender. Berikut adalah potret TKD Provinsi Maluku TA. 2023-2024 di Grafik 6.

Grafik 6 Tren TKD Provinsi Maluku  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Tidak ada alokasi DBH CHT untuk Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memperoleh DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yakni DAU Pendidikan yang rata-rata sebesar Rp164,9 milyar, DAU Kesehatan Rp61,3 milyar, dan DAU Infrastruktur Dasar (PU) Rp74,1 milyar. Demikian juga DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp212,3 milyar dan Bidang Kesehatan Rp28,1 milyar. Provinsi Maluku tidak mendapatkan DAK Fisik Air Minum dan Sanitasi pada dua tahun terakhir.

Adapun TKD berupa DAK Non-Fisik yang dapat didorong untuk percepatan pemenuhan indikator Pengarusutamaan Gender (PUG), antara lain: BOS Pendidikan yang rata-rata sebesar Rp187,8 milyar, BOK sebesar Rp6,9 milyar, Peningkatan Koperasi dan UMKM sebesar Rp2,8 milyar, dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp390 juta.

Tabel 8 menjelaskan rincian TKD yang potensial untuk didorong lebih responsif gender.



Tabel 8: TKD Responsif Gender  
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>70,43</b>	<b>3%</b>	<b>70,43</b>	<b>3%</b>	<b>70,43</b>	<b>3%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>1.578,79</b>	<b>66%</b>	<b>1.632,18</b>	<b>67%</b>	<b>1.605,49</b>	<b>66%</b>
Pendidikan	185,98	12%	143,90	9%	164,94	10%
Kesehatan	82,87	5%	39,88	2%	61,38	4%
Pekerjaan Umum	81,14	5%	67,16	4%	74,15	5%
<b>DAK Fisik</b>	<b>407,51</b>	<b>17%</b>	<b>379,16</b>	<b>16%</b>	<b>393,33</b>	<b>16%</b>
Pendidikan	206,02	51%	218,61	58%	212,32	54%
Kesehatan	24,02	6%	32,18	8%	28,10	7%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>342,30</b>	<b>14%</b>	<b>360,01</b>	<b>15%</b>	<b>351,15</b>	<b>15%</b>
BOS	187,35	55%	188,26	52%	187,80	54%
BOK	9,75	3%	4,12	1%	6,94	2%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	2,52	1%	3,24	1%	2,88	1%
Pelayanan PPPA	0,44	0,1%	0,34	0%	0,39	0%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>2.399,03</b>		<b>2.441,78</b>		<b>2.420,41</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

## b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender

Skor Provinsi Maluku pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender pada posisi sedang, yakni 3,67 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Maluku menempati posisi keempat pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya skor pada aspek pelaksanaan anggaran ini, antara lain, karena rendahnya dukungan dana TKD untuk program/kegiatan/subkegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan kesetaraan gender (IPG dan IKG), seperti DAK Fisik Air Minum dan Sanitasi, serta DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Realisasi anggaran yang responsif gender, khususnya yang bersumber dari DAK Non Fisik untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Anggaran rata-rata sebesar Rp390 juta tersebut digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan, terutama UPTD PPPA.

Selain itu, Provinsi Maluku juga menjalankan program berbasis gender melalui Dinas Sosial, yang didanai oleh DAU, dengan salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE menargetkan kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan anak-anak di panti asuhan. Program ini memberikan kesempatan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan. Pada tahun 2023, realisasi dan pemanfaatan anggaran yang responsif gender cukup baik. Beberapa anggaran yang telah teralokasi dengan baik antara lain:

- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK): 92,5%
- Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 97,8%

DP3A dan Dinas Sosial juga telah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan NGO, seperti Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) serta komunitas disabilitas lainnya di Maluku, dalam pelaksanaan program-program responsif gender ini.

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Maluku pada Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan yang Responsif Gender pada posisi rendah, yakni 2,67 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Maluku menempati posisi keenam pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini antara lain:

Pemantauan terhadap penganggaran yang berbasis gender tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun setiap tahun oleh BAPPEDA, DP3A, dan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Laporan ini mencakup target, indikator, dan capaian dalam implementasi PUG. Meskipun telah dibentuk Pokja PUG yang melibatkan beberapa OPD, implementasi pemantauan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sinergi antar OPD. Keterbatasan pemahaman di berbagai OPD mengenai ARG menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender.

Harapannya, ke depan semua anggota Pokja dapat lebih memahami dan memiliki persepsi yang seragam mengenai ARG, sehingga tidak hanya Dinas P3A dan Dinas Sosial yang memiliki pemahaman ini, tetapi juga seluruh OPD terkait.

### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan Peningkatan Berkelanjutan**

Skor Provinsi Maluku pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender juga relatif rendah, yakni 2,38 point dari skala 1 sampai 5. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* antara lain:

Pemahaman tentang PUG di Maluku masih terbatas, hanya BAPPEDA, Dinas P3A, dan Dinas Sosial yang memahami sepenuhnya konsep PUG. Meskipun telah ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas P3A, pelatihan ini belum sepenuhnya efektif karena hanya menasar beberapa bidang tertentu, sehingga pemahaman terkait PUG belum merata di seluruh OPD. Pada tahun 2016, proyek percontohan untuk 10 OPD terkait gender budgeting dan analisis GAP telah

dilaksanakan, namun tidak berjalan maksimal karena isu PUG belum menjadi prioritas utama pada saat itu.

Saat ini, untuk meningkatkan kapasitas SDM, dengan dukungan SKALA, Dinas P3A mengadakan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang bertujuan untuk mensosialisasikan PUG kepada OPD. Namun, meskipun sudah ada upaya ini, belum ada kompetisi atau stimulan yang mendorong inovasi dalam pemanfaatan TKD (Transfer ke Daerah) untuk PUG.

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan lapangan dilakukan ke Dinas P3A Provinsi Maluku dengan wawancara yang melibatkan pihak terkait. Dinas P3A Provinsi Maluku memiliki UPTD yang fokus pada pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada saluran pengaduan SAPA 129 yang terhubung langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di luar kegiatan pelayanan, unit lain di bawah Dinas P3A juga terlibat dalam kegiatan pencegahan kekerasan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas P3A adalah kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, yang membuat penjangkauan kepada korban kekerasan menjadi lebih sulit.

#### **f. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, antara lain:

1. Sosialisasi yang lebih luas perlu dilakukan kepada seluruh pihak terkait agar pemahaman mengenai PUG lebih merata.
2. Mengingat Maluku adalah provinsi kepulauan, perlu mempertimbangkan faktor geografis dalam pengalokasian anggaran, misalnya standar biaya yang berbeda untuk menempuh perjalanan antar kabupaten/kota yang terletak di pulau terpencil.
3. Organisasi penyandang disabilitas, misalnya PERTUNI perlu lebih banyak dilibatkan. Juga melibatkan kelompok dengan ragam disabilitas yang berbeda. Aspirasi mereka tidak tersampaikan karena hanya melibatkan perwakilan disabilitas tertentu.
4. OMS PUSPA perlu memperbaiki kualitas database OMS untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran.
5. Dinas P3A diharapkan dapat memiliki kantor yang lebih layak serta rumah aman untuk mendukung pelayanan korban kekerasan berbasis gender yang lebih baik.
6. Masukan untuk Pemerintah Pusat untuk perbaikan petunjuk teknis terkait TKD:
  - a. Perlu adanya fleksibilitas penggunaan anggaran, termasuk pergeseran anggaran untuk mendukung kegiatan responsif gender.
  - b. Perlu adanya dana pendamping untuk DAK Non Fisik atau fleksibilitas penggunaannya dalam perjalanan dinas.

### 3.2.5. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

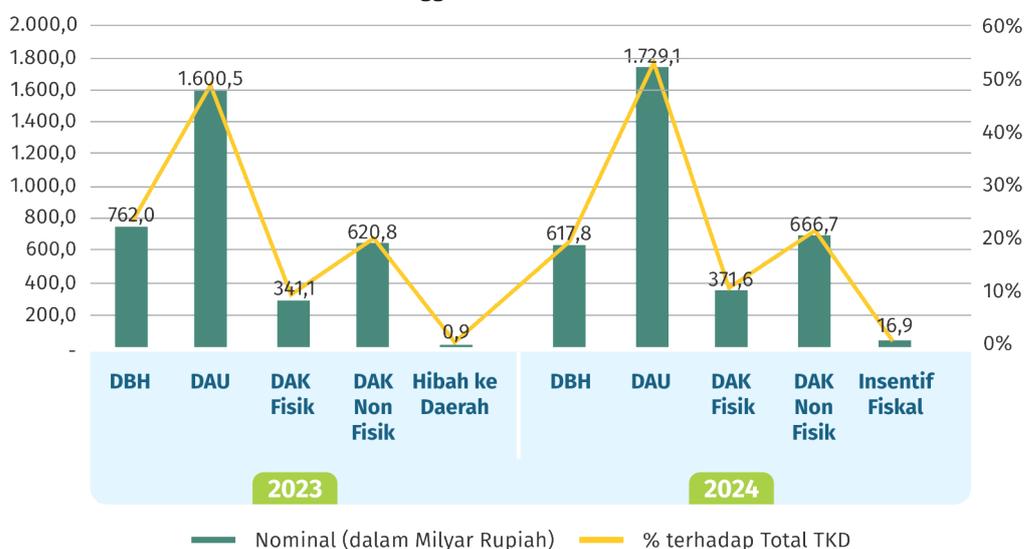
#### a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Skor Provinsi NTB pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di tingkat sedang, yakni 3,81 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi NTB berada di peringkat kelima dari delapan provinsi lokasi dampingan SKALA yang dilakukan monitoring. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor Provinsi NTB pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencantumkan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, yang tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Dalam dokumen ini, salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), meskipun pencapaian NTB dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah. Meskipun demikian, IPG NTB tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Dalam perencanaan anggaran, Provinsi NTB telah melakukan tagging pada Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2023 dan mengimplementasikan Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS). Hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk berbagai program, seperti DBH CHT untuk kesehatan, DAK Fisik untuk sektor pendidikan dan kesehatan, DAK Non-Fisik untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dana desa juga digunakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, meskipun DAU belum mengalokasikan anggaran PUG mengingat terbatasnya alokasi DAU.

Provinsi NTB mengelola anggaran TKD pada 2023 dan 2024 rata-rata sebesar Rp3,3 triliun. Alokasi terbesar berupa DAU rata-rata sebesar Rp1,6 triliun (49%), DBH Rp689,9 milyar (21%), DAK Non-Fisik Rp643,7 (19%), dan DAK Fisik Rp356,3 milyar (11%). NTB juga menerima Hibah Ke Daerah dan Insentif Fiskal, meski nominalnya tidak signifikan. Grafik 7 adalah potret TKD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023-2024:

Grafik 7: Tren TKD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Provinsi mengelola 10% DBH-Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang rata-rata sebesar Rp466,3 milyar atau Rp46,6 milyar dari total DBH-CHT untuk kesehatan ibu dan anak,  *earmark* DAU Kesehatan rata-rata sebesar Rp69 milyar, DAK Fisik Kesehatan Rp55,1 milyar, dan DAK Non-Fisik berupa BOK sebesar Rp10,5 milyar dan untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang rata-rata sebesar Rp390 juta. Berikut adalah rincian TKD yang potensial didorong untuk program yang responsif gender:

Tabel 9: TKD Responsif Gender  
Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>761,99</b>	<b>23%</b>	<b>617,80</b>	<b>18%</b>	<b>689,90</b>	<b>21%</b>
DBH-CHT	473,60	62%	459,18	74%	466,39	68%
<b>DAU</b>	<b>1.600,49</b>	<b>48%</b>	<b>1.729,15</b>	<b>51%</b>	<b>1.664,82</b>	<b>49%</b>
Pendidikan	131,64	8%	116,94	7%	124,29	7%
Kesehatan	94,03	6%	45,26	3%	69,65	4%
Pekerjaan Umum	16,51	1%	11,90	1%	14,20	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>341,14</b>	<b>10%</b>	<b>371,61</b>	<b>11%</b>	<b>356,38</b>	<b>11%</b>
Pendidikan	186,11	55%	183,13	49%	184,62	52%
Kesehatan	32,81	10%	77,45	21%	55,13	15%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>620,84</b>	<b>19%</b>	<b>666,71</b>	<b>20%</b>	<b>643,77</b>	<b>19%</b>
BOS	329,34	53%	336,58	50%	332,96	52%
BOK	16,02	3%	5,03	1%	10,53	2%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	3,29	1%	6,85	1%	5,07	1%
Pelayanan PPPA	0,44	0,1%	0,34	0,1%	0,39	0,1%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>0,89</b>	<b>0,03%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0,45</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>16,89</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,45</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>3.325,35</b>		<b>3.402,16</b>		<b>3.363,76</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah



Foto Bersama dalam Lokakarya Monitoring di NTB, 21-22 Mei 2024

## **b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi NTB pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender sebesar 3,22 point dari skala 1 sampai 5. Skor ini termasuk sedang. Temuan di lapangan menunjukkan:

Realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender di Provinsi NTB menunjukkan hasil yang kurang optimal. Program yang berkaitan dengan penganggaran responsif gender, seperti DAK Fisik untuk penanganan stunting dan DAK Non-fisik untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, telah dilaksanakan, namun dengan hasil yang terbatas. Dinas Perindustrian NTB juga telah menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk memberdayakan kelompok UMKM dengan mengintegrasikan prinsip PUG. Meski demikian, sebagian besar realisasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sudah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip responsif gender. Namun demikian, hasil dari wawancara, alokasi anggaran untuk penanggulangan stunting dan kesehatan ibu dan anak mengalami peningkatan yang signifikan di Provinsi NTB.

## **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi NTB pada aspek ini pada posisi sedang, yakni 2,88 point dari skala 1 sampai 5. Faktor yang menyebabkan skor pada aspek ini cukup baik, antara lain:

Proses pemantauan dan evaluasi di NTB dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan melibatkan Pokja PUG. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui rapat yang melibatkan OPD dan membahas rencana kerja dan anggaran. Meskipun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kompetensi SDM dan anggaran yang terbatas. Beberapa pegawai yang bertugas sebagai *focal point* PUG juga mengalami mutasi tanpa adanya penggantian yang memadai.

Menurut data dari Bappeda NTB, keterbatasan SDM menjadi tantangan terbesar dalam perencanaan dan evaluasi implementasi PUG. Oleh karena itu, kerjasama dengan mitra pembangunan seperti SKALA telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pokja PUG.

Pada tahun 2023, kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung PUG di NTB mencakup koordinasi kebijakan PUG dengan anggaran sebesar Rp2,2 miliar serta advokasi kebijakan PUG dengan anggaran sebesar Rp180 juta.

## **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi NTB pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 1,50 point dari skala 1 sampai 5. Ini merupakan skor terendah dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini, antara lain:

Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki pemahaman yang mendalam untuk pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendukung PUG, meskipun focal point sudah memiliki pengetahuan dasar tentang PUG. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam implementasi PPRG belum dilakukan secara rutin. Untuk mendukung keberlanjutan penerapan PPRG, NTB perlu menyusun rencana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

NTB telah mengembangkan beberapa inovasi, seperti revitalisasi Posyandu, sekolah terbuka untuk anak korban perkawinan, serta program pelatihan pemanfaatan hama Enceng Gondok. Selain itu, NTB juga memiliki layanan aspirasi dan pengaduan online, yaitu NTB Care. Namun, inisiatif ini belum berjalan secara maksimal.

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan lapangan dilakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB untuk memantau penerapan PUG. Di RSUD, telah diterapkan pemisahan loket pendaftaran untuk perempuan, laki-laki, dan lansia, dengan layanan tambahan untuk lansia, seperti pengantaran obat dan penjemputan pasien. RSUD juga sudah melaksanakan PPRG dengan menerapkan GAP dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PUG. Selain itu, RSUD Provinsi NTB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas.

RSUD menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2023 dan 2024, yang digunakan untuk membeli alat kesehatan, seperti alat kardiovaskular dan peralatan untuk penanganan ibu dan anak. Alat-alat ini direncanakan berdasarkan kebutuhan berdasarkan data kasus yang tercatat di RSUD, seperti kanker payudara dan bayi prematur.

#### **f. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi NTB, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dan peran pimpinan dalam implementasi PUG di tingkat daerah.
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan PPRG, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, serta pengaturan pola mutasi pegawai agar tidak mengganggu kelangsungan program.
3. Penguatan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) daerah untuk melakukan pengawasan lebih efektif terhadap penerapan PPRG dan penggunaan anggaran responsif gender.
4. Penguatan regulasi terkait penerapan PUG agar mendapatkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Pusat.

### **3.2.6. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)**

#### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 3,47 point dari skala 1 sampai 5. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya skor Provinsi NTT pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

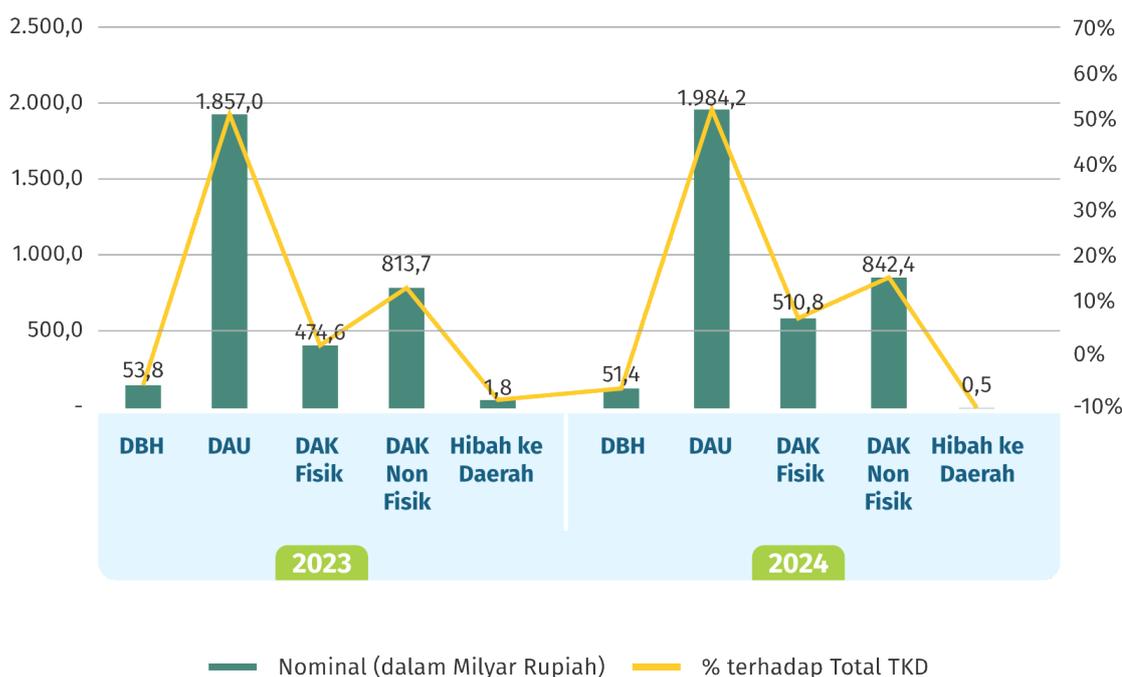
Provinsi NTT telah memasukkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam Visi-Misi Kepala Daerah. Namun, pemahaman dan implementasi PUG masih terbatas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Rencana aksi untuk PUG masih berada pada tahap awal, yaitu pembentukan Tim Focal Point PUG, dengan Profil Gender yang terakhir disusun pada tahun 2020. Profil Gender untuk tahun 2023 masih dalam proses penyusunan.

DP3A Provinsi NTT juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas OPD lain dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Analysis (GBA). Namun, kegiatan ini terhambat oleh keterbatasan anggaran, dan hampir tiga tahun terakhir tidak ada alokasi anggaran untuk kelanjutan pelatihan tersebut. Tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) baru dapat dilakukan oleh Dinas P3A seiring dengan adanya tagging ARG di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kemendagri.

Sebagian penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di NTT sudah mendukung upaya responsif gender, seperti alokasi Dana Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk sektor UKM esensial, akreditasi rumah sakit, dan peningkatan kapasitas di sektor yang tidak langsung terkait dengan penanganan stunting.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, meskipun beberapa provinsi sudah mulai mengintegrasikan PUG dalam perencanaan anggaran, termasuk Provinsi NTT. Namun Provinsi NTT masih menghadapi tantangan besar dalam alokasi anggaran yang lebih responsif gender. Berikut adalah potret TKD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023-2024:

Grafik 8: Tren TKD Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Provinsi NTT memiliki sumber pendanaan cukup besar dan potensial untuk percepatan pencapaian indikator Pembangunan kesetaraan gender, baik Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Rata-rata anggaran TKD TA. 2023-2024 sebesar Rp3,2 triliun. Anggaran TKD terbesar berasal dari DAU yang rata-ratanya mencapai Rp1,9 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024). TKD terbesar kedua adalah DAK Non-Fisik sebesar Rp828 milyar, disusul DAK Fisik sebesar Rp492,7 milyar, DBH sebesar Rp52,6 milyar, dan Hibah Ke Daerah yang hanya Rp1,1 milyar. Secara rinci, TKD Provinsi NTT yang potensial untuk didorong lebih responsif gender, sebagai berikut:

Tabel 10: TKD Responsif Gender  
Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>53,79</b>	<b>2%</b>	<b>51,41</b>	<b>2%</b>	<b>52,60</b>	<b>2%</b>
DBH-CHT	6,44	12%	5,86	11%	6,15	12%
<b>DAU</b>	<b>1.857,02</b>	<b>58%</b>	<b>1.984,24</b>	<b>59%</b>	<b>1.920,63</b>	<b>58%</b>
Pendidikan	305,66	16%	192,63	10%	249,14	13%
Kesehatan	96,14	5%	46,26	2%	71,20	4%
Pekerjaan Umum	81,04	4%	43,45	2%	62,24	3%
<b>DAK Fisik</b>	<b>474,65</b>	<b>15%</b>	<b>510,76</b>	<b>15%</b>	<b>492,71</b>	<b>15%</b>
Pendidikan	209,39	44%	222,51	44%	215,95	44%
Kesehatan	22,29	5%	26,32	5%	24,31	5%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%

<b>DAK Non Fisik</b>	<b>813,71</b>	<b>25%</b>	<b>842,43</b>	<b>25%</b>	<b>828,07</b>	<b>25%</b>
BOS	519,74	64%	528,84	63%	524,29	63%
BOK	17,94	2%	10,54	1%	14,24	2%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	3,35	0,4%	1,81	0,2%	2,58	0,3%
Pelayanan PPPA	0,38	0,05%	0,34	0,04%	0,36	0,04%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>1,75</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,55</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,15</b>	<b>0,04%</b>
Insentif Fiskal	-	0%	-	0%	-	0%
Dana Otsus	-	0%	-	0%	-	0%
Dana Desa	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Total TKD</b>	<b>3.200,91</b>		<b>3.389,39</b>		<b>3.295,15</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Berdasarkan table di atas, 10 persen dari anggaran DBH CHT yang rata-rata sebesar Rp 6,1 milyar dapat digunakan untuk menunjang Kesehatan ibu dan anak. Sebagian anggaran DAU juga sudah di *earmark* – ditentukan penggunaannya untuk pendidikan Rp 249,1 milyar, kesehatan Rp 71,2 milyar, dan infrastruktur dasar Rp 62,2 milyar. Sumber lain adalah dari DAK Fisik maupun DAK Non-Fisik sebagaimana rincian di atas. Khusus DAK Non-Fisik Bidang Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi NTT mengelola rata-rata sebesar Rp 360 juta.

#### **b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender**

Provinsi NTT mendapat skor 3,13 point dari skala 1 sampai 5 pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender. Skor ini menempatkan Provinsi NTT menempati posisi kelima dibanding dengan delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang mempengaruhi skor pada aspek pelaksanaan anggaran antara lain:

Pelaksanaan anggaran responsif gender di Provinsi NTT telah mulai dijalankan, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, dana DAK Fisik untuk tahun 2023 digunakan untuk pembangunan sekolah yang mencakup fasilitas toilet dan sanitasi yang ramah gender, pembangunan asrama, serta perabotan yang memperhatikan kebutuhan laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas. Namun, realisasi dan pemanfaatan anggaran ini perlu diperiksa lebih lanjut dalam dokumen yang dikumpulkan.

#### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi NTT pada Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan yang Responsif Gender relative rendah, yakni 2,71 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi NTT juga hanya menempati posisi kelima pada aspek ini dibanding delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini antara lain:

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKD yang berkontribusi pada PUG dilakukan secara berkala oleh berbagai pihak, termasuk Inspektorat

Daerah, Inspektorat Jenderal (Irjen), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan terkait pemahaman PUG di OPD. Salah satu contoh adalah pengadaan kendaraan roda dua yang tidak memperhatikan kebutuhan perempuan, dengan kendaraan yang dibeli menggunakan transmisi manual, sehingga banyak kendaraan dinas yang tidak dapat digunakan oleh perempuan.

Selain itu, meskipun Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP melakukan review terhadap GAP dan GBS yang disusun OPD, mereka tidak secara spesifik memeriksa PUG dalam anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi PUG perlu diperkuat agar lebih terfokus pada implementasi prinsip kesetaraan gender.

#### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi NTT pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender juga sangat rendah, yakni 1,63 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi NTT menempati posisi buncit kedua. Faktor yang menyebabkan skor pada aspek ini sangat rendah, antara lain:

Provinsi NTT telah menginisiasi '*coaching corner*' PUG di Dinas P3A untuk pendampingan OPD dalam penyusunan GAP dan GBS. Kompetisi pengarusutamaan gender juga telah dilaksanakan, seperti lomba Posyandu tingkat provinsi. Akan tetapi inovasi ini belum terlihat dampaknya. Selain itu, inovasi – inovasi lain masih terbatas pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun anggaran 2023, NTT menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk bidang kesehatan, dengan total anggaran 4,35 miliar rupiah untuk pengadaan alat kesehatan kardiovaskular dan 16,8 miliar rupiah untuk layanan stroke di RSUD Yohanes. Selain itu, Provinsi NTT juga mendapatkan DAK Non-fisik sebesar 375 juta rupiah, dengan penyerapan anggaran mencapai 83,72% atau sekitar 313,94 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti bantuan operasional korban kekerasan, pencegahan kekerasan, dan penguatan UPTD PPA.

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan lapangan ke UPTD PPA Provinsi NTT menunjukkan bahwa terdapat enam standar pelayanan utama yang disediakan, termasuk pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, pendampingan korban, dan mediasi. Kasus yang sering ditangani oleh UPTD PPA antara lain adalah pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ingkar janji nikah, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

UPTD PPA NTT menerima dana dari DAK Bantuan Operasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BOPPA) sebesar 375 juta rupiah pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi penerima manfaat, biaya shelter, rawat inap, serta biaya pelayanan psikolog dan hukum.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia masih kurang memadai, seperti kamar yang tidak layak, akses yang sulit untuk penyandang disabilitas, serta keterbatasan dana dan SDM dalam menyediakan pelayanan yang optimal.

#### **f. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi NTT, antara lain:

1. Fleksibilitas pagu anggaran untuk memudahkan distribusi dana antar menu anggaran, dengan dukungan penuh dari APBD dalam kegiatan terkait PUG.
2. Kebutuhan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana dan kewajiban pelaporan yang berkaitan dengan PUG.
3. Pembaruan secara berkala terhadap peraturan dan petunjuk teknis yang mengatur implementasi PUG termasuk mendorong peran aktif Dinas P3A Provinsi NTT untuk sosialisasi lebih luas tentang PUG kepada seluruh OPD untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.
4. Meningkatkan interkoneksi aplikasi pelaporan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi PUG.
5. Mengusulkan penambahan menu DAK Fisik untuk pembangunan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya penanganan yang lebih baik kekerasan berbasis gender di NTT.

### **3.2.7. Provinsi Papua**

#### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Papua pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 2,73 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Papua menduduki peringkat kedua terbawah di atas Papua Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya skor Provinsi Papua pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Papua telah memuat perspektif kesetaraan gender pada RPJMD Tahun 2019-2023. Perspektif ini tercantum dalam misi ke-5 yaitu “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu dengan Fokus Pembangunan Daerah untuk memastikan terwujudnya Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera”. Selain itu, perspektif kesetaraan gender juga tercantum dalam sasaran 30 yaitu “Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung, mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan PUG dalam strategi pembangunan” dan sasaran 35 yaitu “Meningkatnya PUG dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak”. Provinsi Papua juga memiliki peraturan untuk implementasi PUG yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di provinsi Papua.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran untuk mendukung PUG di Provinsi Papua cukup baik, terutama Provinsi Papua

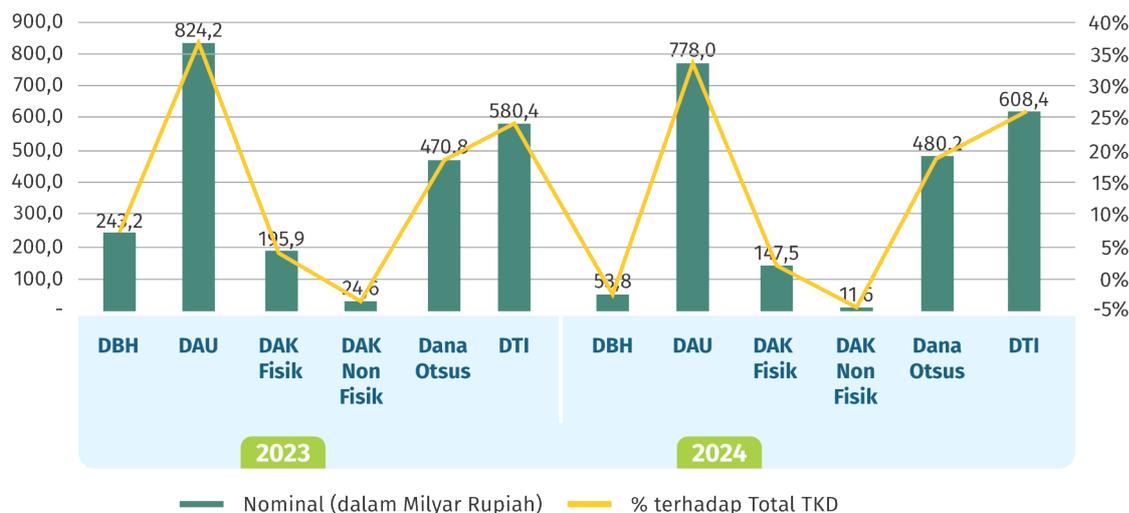
melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik). Namun, pelaksanaan PUG di Provinsi Papua masih memerlukan perbaikan dalam beberapa hal. Misalnya, PUG belum menjadi perhatian legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah. Perhatian pimpinan terhadap kebijakan strategis untuk mendukung PUG belum optimal. Selain itu, narasi PUG masih dalam tahap pemahaman di masing-masing level teknis OPD. Pada rencana aksi daerah Provinsi Papua masih sebatas rencana aksi dinas PPA. Provinsi Papua telah menyusun profil gender pada tahun 2010-2015 namun belum memadai karena tidak memenuhi analisa sebagaimana menjadi muatan Profil Gender.

Dari segi penganggaran, untuk penyusunan APBD provinsi Papua belum mempertimbangkan pengarusutamaan gender. Tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) secara top-down dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sudah dilakukan untuk memenuhi data Kemendagri dan syarat penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) namun tagging ARG tersebut hanya dilakukan oleh OPD Dinas P3A. GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) hanya diimplementasikan oleh beberapa OPD saja.

Dalam pengalokasian dana Transfer Ke Daerah (TKD), Provinsi Papua sudah merencanakan dan menggunakan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi, DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD, DAU telah mempertimbangkan responsif gender namun belum di dukung dengan GBS. Berikut adalah potret TKD Provinsi Papua TA. 2023-2024:



Grifik 9: Tren TKD Provinsi Papua  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel berikut, terlihat bahwa total TKD Provinsi Papua pada TA. 2023-2024 rata-rata mencapai Rp2,2 triliun. TKD terbesar berasal dari DAU dengan rata-rata sebesar Rp801,1 milyar. TKD terbesar kedua adalah Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang masing-masing sebesar 27% dan 22% dari total TKD. Baru disusul DAK Fisik (8%), DBH (6%), dan DAK Non-Fisik (1%) dari total TKD Provinsi Papua.

Tabel 11: TKD Responsif Gender  
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>243,18</b>	<b>10%</b>	<b>53,85</b>	<b>3%</b>	<b>148,51</b>	<b>6%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>824,24</b>	<b>35%</b>	<b>778,05</b>	<b>37%</b>	<b>801,14</b>	<b>36%</b>
Pendidikan	35,57	4%	6,53	1%	21,05	3%
Kesehatan	51,65	6%	20,61	3%	36,13	4%
Pekerjaan Umum	58,48	7%	53,65	7%	56,06	7%
<b>DAK Fisik</b>	<b>195,90</b>	<b>8%</b>	<b>147,46</b>	<b>7%</b>	<b>171,68</b>	<b>8%</b>
Pendidikan	6,08	3%	-	0%	3,04	2%
Kesehatan	119,90	61%	22,97	16%	71,44	38%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>24,56</b>	<b>1%</b>	<b>11,60</b>	<b>1%</b>	<b>18,08</b>	<b>1%</b>
BOS	3,02	12%	3,14	27%	3,08	20%
BOK	14,79	60%	2,87	25%	8,83	42%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	1,79	7%	2,33	20%	2,06	14%
Pelayanan PPPA	0,38	2%	0,34	3%	0,36	2%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

<b>Insentif Fiskal</b>	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Dana Otsus</b>	<b>1.051,20</b>	<b>45%</b>	<b>1.088,62</b>	<b>52%</b>	<b>1.069,91</b>	<b>49%</b>
<b>Dana Otsus Papua</b>	<b>470,84</b>	<b>20%</b>	<b>480,25</b>	<b>23%</b>	<b>475,54</b>	<b>22%</b>
a. Penerimaan Umum	209,26	44%	215,21	45%	212,23	45%
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	261,58	56%	265,04	55%	263,31	55%
<b>Dana Tambahan Infrastruktur</b>	<b>580,36</b>	<b>25%</b>	<b>608,37</b>	<b>29%</b>	<b>594,37</b>	<b>27%</b>
<b>Dana Desa</b>	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Total TKD</b>	<b>2.339,07</b>		<b>2.079,57</b>		<b>2.209,32</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Pada table di atas, jenis TKD yang potensial didorong lebih responsif gender, antara lain: DAU *specific grant* – atau telah ditentukan penggunaannya berupa DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (PU). DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan. DAK Non-Fisik berupa BOS Pendidikan, BOK, Peningkatan Koperasi & UMKM, serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). Khusus DAK Non-Fisik P3A, Pemerintah Provinsi Papua rata-rata hanya mengelola Rp360 juta.

#### **b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender**

Provinsi Papua mendapat skor 1,89 point dari skala 1 sampai 5 pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender. Berikut adalah potret pelaksanaan anggaran responsif gender dan kendalanya di Provinsi Papua, sebagai berikut:

Pelaksanaan anggaran yang mendukung pengarusutamaan gender di Provinsi Papua telah menunjukkan kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran TKD meliputi DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. DAK Fisik tersebut dimanfaatkan oleh Provinsi Papua untuk pembangunan/renovasi Rumah Sakit dan Puskesmas, penyediaan sumber air minum yang sehat dan promosi untuk sanitasi rumah yang lebih baik.

Pada DAK Non-fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dimanfaatkan untuk pemberian makanan sehat, promosi, dorongan pemanfaatan pekarangan yang menghasilkan makanan sehat, penambahan makanan dan vitamin bagi panti-panti. Sedangkan, DAK Non-fisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD yang digunakan untuk penanganan stunting sudah terealisasi sebesar 3,08M sampai dengan bulan Mei 2024. Namun demikian tidak banyak outcome yang bisa diceritakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi Papua kurang adanya keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, misalnya pengambilan keputusan yang masih didominasi oleh kelompok laki-laki, minimnya kehadiran perempuan pada program penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG di Provinsi Papua masih membutuhkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak.

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Papua pada Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan yang Responsif Gender 2,75 point dari skala 1 sampai 5. Skor ini menempatkan Provinsi Papua lebih baik dibanding Provinsi Gorontalo, Maluku, NTT, dan Papua Barat. Faktor yang menyebabkan skor bagus pada aspek ini antara lain:

Dalam monitoring pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengawasan, Provinsi Papua khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) banyak melakukan kegiatan yang mendorong pelaksanaan PUG serta pemantauan dan evaluasi karena dorongan dari Pemerintah Pusate ke Pemerintah Daerah dalam rangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Dinas P3A yang memiliki peran sebagai kelompok kerja PUG telah melaksanakan tugasnya untuk mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG. Beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 sudah dilakukan dan berkontribusi dalam pelaksanaan PUG, misalnya Pelayanan KB, Penurunan Stunting, Pendampingan Ibu Hamil, Penetapan Kelompok Kegiatan Keluarga Remaja dan Lansia, dan lain-lain.

Pada pelaksanaan PUG di Provinsi Papua terdapat beberapa kendala, di antaranya pemahaman yang berbeda antar OPD tentang PUG. Usaha yang telah dilakukan pelaksanaan bimbingan teknis. Selain itu, mindset beberapa dinas yang masih menganggap bahwa isu PUG adalah urusan Dinas P3A saja.

Dinas P3A Papua aktif menyampaikan laporan anggaran termasuk kegiatan yang responsif gender. Dinas P3A juga telah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Namun demikian, pelaporan anggaran atas kegiatan yang responsif gender dan pencantuman implementasi PUG dalam LAKIN belum diikuti oleh seluruh dinas-dinas di Provinsi Papua.

Inspektorat Daerah belum melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan PPRG di setiap SKPD. Hal ini beberapa di antaranya disebabkan oleh pemahaman tenaga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tentang pengawasan dokumen APBD yang masih kurang. Namun demikian, Inspektorat Daerah telah melakukan pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah mulai tahun 2023 kepada 35 SKPD.

Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender belum dilakukan. Ke depan diharapkan terdapat aturan yang jelas terkait dengan hal ini.

### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi Papua pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender bagus, yakni 2,75 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Papua menempati posisi kedua setelah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meski selisihnya cukup signifikan. Faktor yang menyebabkan skor pada aspek ini bagus, antara lain:

Dari segi kapasitas SDM, Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki pemahaman dan kapasitas terkait pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG, namun masih hanya terbatas pada level teknis. Pemahaman dan kapasitas terkait PUG yang dimiliki Pemda Provinsi Papua belum ditindaklanjuti dan diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG. Hal ini dikarenakan peserta yang hadir rapat atau pelatihan tidak melaporkan kepada pimpinan atau sudah melaporkan namun belum ditindaklanjuti oleh pimpinan. Pemerintah Daerah sudah mengikuti bimbingan teknis terkait penguatan kapasitas pemanfaatan dana otonomi khusus namun belum mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas Analisa Gender, GAP/GBS, Data terpilah, dan Gender Tagging dalam pemanfaatan TKD.

Dalam mendukung perkembangan PUG di Provinsi Papua, DP3A melakukan inisiatif upaya pendampingan/ *door to door* atau asistensi kepada pemenuhan ketentuan PPRG kepada 13 SKPD dan melibatkan akademisi Universitas Cendrawasih. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua adalah benchmarking dengan melibatkan mitra dengan pendanaan dari non-APBD di Sorong dengan narasumber dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi Papua juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Panti khusus Tunanetra dan Disabilitas yang berlokasi di Kabupaten Biak yang didanai dari Dana Otsus. Namun demikian, Provinsi Papua belum memiliki skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG dan belum memiliki penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala.

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan/observasi lapangan dan wawancara di Provinsi Papua dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Papua. UPTD P3A memiliki SOP yang telah merespon kebutuhan spesifik kelompok rentan baik untuk Orang Asli Papua (OAP) dan bukan OAP berupa layanan konseling dan rujukan tindak lanjut berkoordinasi dengan kepolisian dan fasilitas medis. Rumah aman tersedia di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua dengan pertimbangan isu keamanan. Namun, kondisinya tidak memadai. UPTD P3A telah melakukan pencatatan penanganan kekerasan melalui sistem SIMFONI.

UPTD P3A menghadapi tantangan dalam mengelola layanan, di antaranya adalah tidak adanya sarana transportasi dinas untuk sistem rujukan, kurangnya biaya operasional berupa penyediaan makan, dan biaya pemulihan kesehatan di fasilitas kesehatan karena tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini melalui pendanaan mandiri dari pegawai. Untuk meningkatkan sistem layanan kepada penerima manfaat terutama masyarakat rentan, diusulkan agar Bantuan Operasional Perlindungan

---

<sup>8</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI). Sistem ini dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Perempuan dan Anak (BOPPA) dan Dana Otsus dapat ditingkatkan dengan memperhatikan data laporan kekerasan yang semakin meningkat. Juga Dana Otsus diharapkan dapat memberikan subsidi layanan kesehatan bagi korban kekerasan.

#### **f. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Papua, antara lain:

1. Memperkuat peran DP3A sebagai motor penggerak untuk implementasi PUG di tingkat provinsi mengadvokasi Pimpinan Daerah untuk mendorong OPD lain untuk memberi perhatian pada implementasi PUG.
2. Memperkuat Inspektorat Daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan implementasi PUG.
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk kebijakan dan panduan yang jelas terkait dengan monitoring dan evaluasi kebijakan HKPD dalam konteks otonomi khusus yang mendorong PUG di daerah.

### **3.2.8. Provinsi Papua Barat**

#### **a. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**

Skor Provinsi Papua Barat pada aspek Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 2,25 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Papua Barat menduduki peringkat terbawah dibanding dengan daerah SKALA lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya skor Provinsi Papua Barat pada aspek perencanaan dan penganggaran ini, antara lain:

Pada saat monitoring dilakukan, Provinsi Papua Barat belum memiliki Kepala Daerah secara definitif sehingga tidak terdapat visi dan misi sebagai salah satu dasar atau acuan dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender juga belum tertuang dalam dokumen RPJMN dan RKPD Provinsi Papua Barat. Namun demikian, penganggaran yang responsif gender telah termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat terutama pada aspek pelayanan umum bahwa salah satu layanan urusan pemerintah wajib berfokus pada pembangunan gender. Indikator yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan gender tersebut yaitu IPG dengan menekankan pada status dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah.

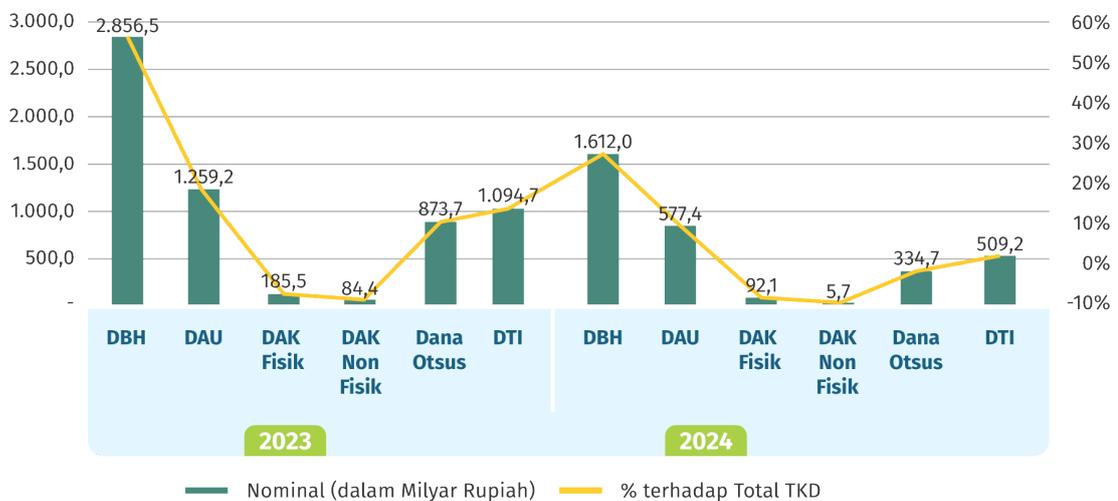
Untuk mencapai pembangunan gender di Provinsi Papua Barat telah memiliki landasan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengurusutamaan Gender. Pada saat kegiatan monitoring, tengah disusun rencana aksi dan pemetaan program kegiatan yang responsif gender dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Provinsi Papua Barat.

Proses monitoring menemukan, dukungan implementasi PUG belum menjadi perhatian pada diskusi perencanaan dan penganggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat.

Pada tahun 2023, Provinsi Papua Barat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGENA) yang dapat digunakan oleh seluruh OPD di Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota untuk memantau profil gender atau keberhasilan pembangunan gender di Provinsi Papua Barat. Pada aplikasi SIGENA akan dilengkapi informasi gender budget statement dari seluruh OPD di Provinsi Papua Barat. Saat ini, implementasi tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) belum terlaksana di Provinsi Papua Barat, ARG cenderung hanya pada program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Selanjutnya, penggunaan Transfer ke Daerah seperti DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD, dan DAU belum sepenuhnya responsif gender. Berdasarkan penjelasan para responden, dalam penggunaan TKD tersebut belum dapat difokuskan pada program kegiatan yang responsif gender dikarenakan masih kurangnya kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimum di daerah. Papua Barat menerima DAK Non-fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk layanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut adalah potret TKD Provinsi Papua Barat TA. 2023-2024:

Grafik 10: Tren TKD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Provinsi Papua Barat tidak memperoleh alokasi DBH CHT, selain itu responden juga belum mampu menjelaskan penggunaan PAD dari earmark Pajak Rokok di Provinsi Papua Barat. Dalam proses perencanaan (musrenbang) yang dilaksanakan bulan April, disampaikan bahwa telah terdapat keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh anak. Namun pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi, responden belum dapat menyajikan bukti atau dokumen pendukung yang menunjukkan keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua Barat.

Tabel 12: TKD Responsif Gender  
Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>2.856,47</b>	<b>45%</b>	<b>1.612,00</b>	<b>51%</b>	<b>2.234,24</b>	<b>48%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>1.259,20</b>	<b>20%</b>	<b>577,40</b>	<b>18%</b>	<b>918,30</b>	<b>19%</b>
Pendidikan	48,49	4%	7,39	1%	27,94	3%
Kesehatan	59,07	5%	12,03	2%	35,55	3%
Pekerjaan Umum	197,03	16%	83,35	14%	140,19	15%
<b>DAK Fisik</b>	<b>185,54</b>	<b>3%</b>	<b>92,09</b>	<b>3%</b>	<b>138,82</b>	<b>3%</b>
Pendidikan	-	0%	-	0%	-	0%
Kesehatan	34,05	18%	18,03	20%	26,04	19%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>84,43</b>	<b>1%</b>	<b>5,73</b>	<b>0%</b>	<b>45,08</b>	<b>1%</b>
BOS	1,51	2%	0,29	5%	0,90	3%
BOK	9,93	12%	1,92	33%	5,92	23%
BOKB	-	0%	-	0%	-	0%
Peningkatan KUMK	1,68	2%	2,32	40%	2,00	21%
Pelayanan PPPA	0,44	1%	0,34	6%	0,39	3%
Hibah Ke Daerah	-	0%	-	0%	-	0%
Insentif Fiskal	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Dana Otsus</b>	<b>1.968,45</b>	<b>31%</b>	<b>843,89</b>	<b>27%</b>	<b>1.406,17</b>	<b>29%</b>
<b>Dana Otsus Papua</b>	<b>873,72</b>	<b>14%</b>	<b>334,68</b>	<b>11%</b>	<b>604,20</b>	<b>12%</b>
a. Penerimaan Umum	388,32	44%	145,67	44%	266,99	44%
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	485,40	56%	189,01	56%	337,21	56%
<b>Dana Tambahan Infrastruktur</b>	<b>1.094,73</b>	<b>17%</b>	<b>509,21</b>	<b>16%</b>	<b>801,97</b>	<b>17%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>6.354,09</b>		<b>3.131,11</b>		<b>4.742,60</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

## **b. Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender**

Provinsi Papua Barat mendapat skor 2,75 point dari skala 1 sampai 5 pada Aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender. Skor ini menempatkan Provinsi Papua Barat berada pada posisi kedua terbawah dari delapan provinsi lokasi dampingan SKALA lainnya. Berikut adalah potret pelaksanaan anggaran responsif gender dan kendalanya di Provinsi Papua Barat:

Anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dimanfaatkan pada kegiatan penanganan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Meskipun demikian, pelayanan dirasa belum maksimal.

Anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Non-fisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana telah digunakan untuk pengelolaan gizi masyarakat, pemberian pelatihan edukasi gizi, konseling menyusui serta Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU digunakan untuk pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti. Namun, DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi dan DAK Non Fisik Bantuan Operasional PAUD belum difokuskan pada kegiatan yang responsif gender. Transfer ke Daerah lainnya yang responsif gender seperti Dana Desa dan DBH CHT tidak dialokasikan ke Provinsi Papua Barat.

Komponen pendapatan selain Transfer ke Daerah seperti PAD dalam APBD Provinsi Papua Barat telah diperuntukkan pada kegiatan yang responsif gender seperti pemberian bantuan kepada kelompok disabilitas berupa alat bantu yang terdiri dari tongkat, motor modifikasi dan alat bantu dengar, pemberian bantuan kepada korban tindak kekerasan berupa peralatan rumah tangga yang dapat digunakan untuk membuka kegiatan usaha rumahan.

Selain itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia juga diberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako). Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan tenda yang dapat digunakan kelompok usaha UKM dalam menjalankan usahanya serta pelatihan keterampilan marketing dengan sasaran peserta perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan program operasi pasar di mana masyarakat yang termasuk kategori miskin hanya perlu membayar setengah dari harga barang yang dibeli di pasar.

Program kegiatan lainnya yang juga responsif gender yaitu dukungan kepada industri rumahan seperti pelatihan membatik, pembuatan keripik buah Pala, pembuatan jaring dan pelatihan pembuatan kapal. Dalam menentukan kebutuhan kelompok rentan di Provinsi Papua Barat telah dilakukan koordinasi dengan komunitas penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, seperti pemberian mesin pendingin kepada kelompok penyandang disabilitas yang menjalankan usaha rumahan.

### **c. Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan**

Skor Provinsi Papua pada Aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan yang Responsif Gender relatif rendah, yakni 1,50 point dari skala 1 sampai 5. Skor ini menempatkan Provinsi Papua Barat menempati posisi terendah dibandingkan daerah SKALA lainnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya skor pada aspek ini, antara lain:

Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Inspektorat Daerah belum memiliki program khusus terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran berbasis gender. Namun demikian, Kelompok Kerja PUG Provinsi Papua Barat telah dibentuk dan beranggotakan pegawai yang bertindak sebagai focal point dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sayangnya kelompok kerja PUG Provinsi Papua Barat tidak aktif karena peran serta partisipasi dari masing-masing anggota kelompok belum optimal sehingga pelaksanaan program pemantauan dan evaluasi atas kegiatan PUG juga belum berjalan.

Pada tahun 2023, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Provinsi Papua Barat baru melaksanakan penandaan kegiatan yang terkait dengan PUG pada Dinas P3A. Meskipun belum diketahui keterkaitan upaya yang telah dilakukan, kegiatan monitoring mencatat temuan Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Barat di tahun 2023 mengalami penurunan 0,0006 poin dari sebelumnya 0,5367 di tahun 2022.

Provinsi Papua Barat masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang terkait dengan implementasi PUG. Beberapa di antaranya yaitu Pemprov belum melakukan penyusunan laporan khusus untuk anggaran responsif gender, belum mencantumkan implementasi pengarusutamaan gender dalam laporan kinerja (LAKIN), serta belum melibatkan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran responsif gender serta pelaksanaan kegiatannya di daerah. Selain Pemerintah Provinsi, peran dari Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan serta pemeriksaan terkait anggaran responsif gender juga belum optimal, yaitu belum adanya pengawasan secara khusus dari Kemendagri, BPK, serta BPKP terkait anggaran responsif gender.

### **d. Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement***

Skor Provinsi Papua Barat pada Aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* yang Responsif Gender relatif bagus, yakni 2,25 point dari skala 1 sampai 5. Provinsi Papua Barat menempati posisi keempat dan lebih bagus dibanding Provinsi NTT dan NTB. Faktor yang menyebabkan skor pada aspek ini cukup bagus, antara lain:

Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat telah mengetahui dan memahami tentang adanya lokasi TKD yang diperuntukkan untuk PUG. Dalam meningkatkan melakukan analisa gender, GAP/GBS, data terpilah, *gender tagging* dalam pemanfaatan TKD, Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Pelatihan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan diikuti oleh *focal point* PUG. Pelatihan tersebut menyasar pegawai level menengah dan bawah, sedangkan

kebijakan/program belum mengacu kepada pemahaman dan kapasitas melainkan masih menjadi prerogatif pimpinan.

Provinsi Papua Barat meluncurkan inovasi Aplikasi SI GENA Papua Barat yang sudah dapat digunakan serta aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Gender (Si-Pande) yang pada saat dilaksanakan wawancara masih dalam tahap pengembangan. Pemberian insentif atas inovasi pemanfaatan TKD untuk PUG belum ada dikarenakan adanya kendala terbatasnya anggaran. Pada tahun 2023, dalam rangka pembelajaran inovasi dari pemda lain, Provinsi Papua Barat melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Tengah dengan agenda Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi. Provinsi Papua Barat masih berfokus dalam meningkatkan SDM untuk pemahaman yang lebih baik implementasi PUG.

9

#### **e. Hasil Kunjungan Lapangan (Observasi)**

Kunjungan/observasi lapangan serta wawancara dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). UPTD P3A Provinsi Papua Barat didirikan pada tahun 2020. Jumlah laporan kekerasan terhadap anak yang diterima UPTD PPPA dapat mencapai 5 kasus per minggunya. Kantor UPTD P3A Provinsi Papua Barat telah memiliki SOP dalam pelayanannya. Untuk menjangkau layanan UPTD P3A, masyarakat dapat datang langsung ke lokasi kantor untuk melapor atau melalui channel layanan SAPA129. Hingga saat ini terdapat dua mekanisme dalam penanganan kasus oleh UPTD PPPA Provinsi Papua Barat, yaitu korban dirujuk dari UPTD Kab/Kota atau korban langsung melapor melalui UPTD Provinsi.

Saat ini UPTD P3A belum memiliki rumah aman/panti, sehingga tidak jarang korban harus mengeluarkan uang sendiri untuk keperluan akomodasi. Bagi korban yang kurang mampu, UPTD P3A menampungnya di rumah salah satu petugas atau dititipkan di rumah aman UPTD P3A Kabupaten Manokwari. Berdasarkan informasi dari Kepala UPTD, UPTD P3A Provinsi telah mendapatkan tanah dan bangunan dari Kemen PPPA yang direncanakan akan dibangun menjadi rumah aman. Dalam perekaman dan pemantauan kasus yang ditangani, UPTD PPPA Provinsi Papua Barat menggunakan Aplikasi SIMFONI dari Kementerian PPPA.

Tantangan terbesar dalam operasional UPTD P3A adalah keterbatasan dana dan kondisi geografis. Para petugas menyampaikan kesulitan menjangkau korban karena lokasi geografis dengan dana transportasi yang terbatas. Estimasi biaya penanganan kasus per korban adalah 1 juta rupiah. Sebagai tambahan informasi, anggaran Dinas PPPA pada tahun 2024 adalah sebesar 340 juta dan berasal dari DAK Non-fisik, yang dibagi menjadi:

- a. 58% untuk pelayanan
- b. 17% untuk manajemen
- c. 25% untuk pencegahan

---

<sup>9</sup>Adalah aplikasi yang berfungsi untuk memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Provinsi Papua Barat. Aplikasi dapat diakses di sini: <https://sigena.dispppa.papuaratprov.go.id/>

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara, belum terdapat sinergi penganggaran dan pendanaan antar OPD di Provinsi Papua Barat. Misalnya saat korban membutuhkan visum, Dinas Kesehatan tidak dapat membantu.

#### f. Rekomendasi

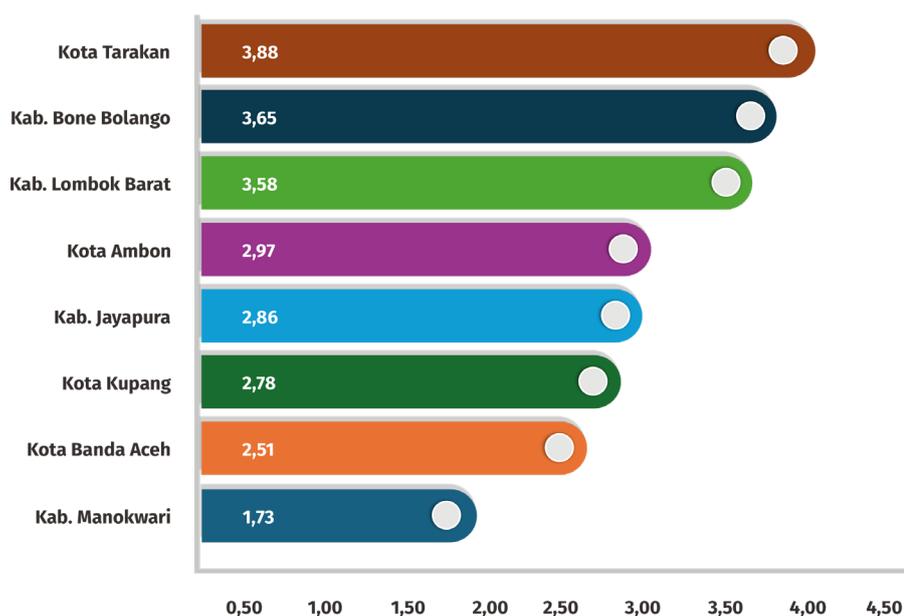
Berdasarkan hasil monitoring dan penilaian pada empat aspek tatakelola TKD yang responsif gender di atas, beberapa yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi terkait pemanfaatan TKD untuk PUG yang mengundang Kepala Daerah untuk mendapatkan komitmen dari para pimpinan.
2. Penguatan kapasitas SDM di lingkup SKPD dan OPD di Provinsi untuk implementasi PUG.
3. Kebutuhan petunjuk teknis dan atau panduan dari Pemerintah Pusat untuk tagging Anggaran Responsif Gender (ARG).

### 3.3. Skor dan Peringkat Kabupaten/Kota dalam Implementasi HKPD Responsif Gender

Skor agregat 8 Pemerintah Kabupaten/Kota tertinggi adalah Kota Tarakan dengan skor 3,88 dan terendah yaitu Kabupaten Manokwari dengan skor 1,73. Rata-rata skor agregat 8 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar 3,01. Terdapat tiga Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di atas rata-rata, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan terdapat 5 Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Jayapura, Kota Kupang, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Manokwari.

Grafik 11 – Skor Agregat 8 Pemerintah Kabupaten/ Kota



Keunggulan kompetitif dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap 4 area monitoring, didominasi oleh skor area monitoring Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tabel berikut, kecuali Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang memiliki skor besar pada area monitoring Perencanaan dan Penganggaran, yaitu 4,35. Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki skor paling besar pada area monitoring Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement*.

Tabel 13 – Komparasi Skor Agregat 8 Pemerintah Kabupaten/Kota

Daerah	1. Perencanaan dan Penganggaran	2. Pelaksanaan Anggaran	3. Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan	4. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Continuous Improvement	Rata-rata Daerah
Kota Tarakan	4,06	4,20	3,38	3,63	3,88
Kab. Bone Bolango	4,00	4,10	3,00	3,00	3,65
Kab. Lombok Barat	4,35	3,80	3,75	1,50	3,58
Kota Ambon	3,93	4,00	2,29	1,43	2,97
Kab. Jayapura	2,87	2,67	2,50	3,38	2,86
Kota Kupang	2,86	3,83	3,00	1,63	2,78
Kota Banda Aceh	2,71	3,00	1,63	2,38	2,51
Kab. Manokwari	1,31	3,33	1,25	1,25	1,73
<b>Grand Total</b>	<b>3,28</b>	<b>3,62</b>	<b>2,60</b>	<b>2,29</b>	<b>3,01</b>

Statistik deskriptif di antara 4 area monitoring dari skor agregat pemerintah kabupaten/kota ditunjukkan pada tabel berikut, di mana nilai rata-rata tertinggi dari area monitoring Pelaksanaan Anggaran sebesar 3,62 sedangkan terendah yaitu area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* sebesar 2,27. Skor minimum tertinggi dari area Pelaksanaan Anggaran sebesar 2,67 dan terendah adalah dari area Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Pengawasan dan Kapasitas SDM sebesar 1,25. Skor maksimum tertinggi yaitu dari area Perencanaan dan Penganggaran sebesar 4,35 dan skor maksimum terendah berasal dari area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement*, yaitu 3,63. Standar deviasi menunjukkan nilai tertinggi sebesar 1,02 dari area Perencanaan dan Penganggaran dan terendah dari area Pelaksanaan Anggaran sebesar 0,56. Area Pelaksanaan Anggaran merupakan area yang memiliki keunggulan relatif dari ketiga area lainnya, sedangkan area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* merupakan titik kritis yang perlu diperbaiki. Meskipun area Perencanaan dan Penganggaran memiliki skor maksimum tertinggi di antara area monitoring lain, namun bervariasi di antara kabupaten/kota yang menjadi sampel, ditunjukkan dengan standar deviasi yang paling tinggi. Area Pelaksanaan Anggaran memiliki skor yang relatif terendah variasi nya di antara kabupaten/ kota sampel.

Tabel 14 – Statistik Deskriptif Skor Agregat 8 Kabupaten/ Kota

	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan Anggaran	Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Continuous Improvement
Rata-Rata	3,26	3,62	2,60	2,27
Minimum	1,31	2,67	1,25	1,25
Maximum	4,35	4,20	3,75	3,63
Standar Deviasi	1,02	0,56	0,86	0,95

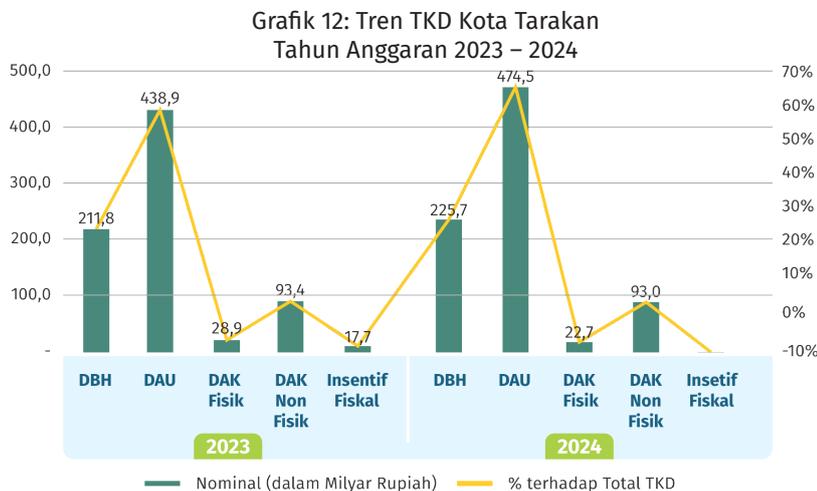
### 3.4. Hasil Monitoring HKPD Responsif Gender dan Potret TKD Kabupaten/Kota

Skor dan peringkat implementasi HKPD melalui TKD yang responsif gender pada 4 area monitoring di masing-masing Kabupaten/Kota tidak lepas dari komitmen pimpinan daerah dalam mengelola dana TKD. Berikut adalah potret dana TKD dan potensinya untuk mendukung PUG.

#### a. Kota Tarakan

Kota Tarakan memperoleh skor dan peringkat tertinggi dibanding Kabupaten/ Kota lainnya. Agregat skor Kota Tarakan 3,88 dari skala 1 sampai 5 yang merupakan akumulasi dari: 4,06 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 4,20 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 3,38 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 3,63 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kota Tarakan menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp804,73 milyar pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp218,71 milyar (27%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp456,69 milyar (57%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp25,76 milyar (25,7%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp93,24 (12%), Hibah Ke Daerah Rp1,5 milyar (0,2%), dan Insentif Fiskal sebesar Rp8,83 milyar (2%) dari rerata Total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023-2024.



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tarakan. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kota Tarakan tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU *Spesific Grant* Bidang Pendidikan Rp21,94 milyar (5%), Kesehatan Rp13,64 milyar (3%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp5,27 milyar (1%) dari Total DAU. DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp7,10 milyar (27%), Kesehatan Rp3,97 milyar (16%) dari Total DAK Fisik juga potensial untuk mendorong PUG. Kota Tarakan tidak mendapat DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi. Berikut adalah Tabel TKD Kota Tarakan TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG.

Tabel 15 – TKD Responsif Gender  
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>211,76</b>	<b>27%</b>	<b>225,66</b>	<b>28%</b>	<b>218,71</b>	<b>27%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>438,92</b>	<b>55%</b>	<b>474,45</b>	<b>58%</b>	<b>456,69</b>	<b>57%</b>
Pendidikan	29,05	7%	14,84	3%	21,94	5%
Kesehatan	17,37	4%	9,92	2%	13,64	3%
Pekerjaan Umum	7,30	2%	3,24	1%	5,27	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>28,85</b>	<b>4%</b>	<b>22,68</b>	<b>3%</b>	<b>25,76</b>	<b>3%</b>
Pendidikan	8,10	28%	6,10	27%	7,10	27%
Kesehatan	2,35	8%	5,59	25%	3,97	16%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>93,45</b>	<b>12%</b>	<b>93,04</b>	<b>11%</b>	<b>93,24</b>	<b>12%</b>
BOS Pendidikan	46,38	50%	46,70	50%	46,54	50%
BOK	10,42	11%	7,87	8%	9,14	10%
BOKB	2,15	2%	2,16	2%	2,15	2%
Peningkatan KUMK	-	0%	-	0%	-	0%
Pelayanan PPPA	-	0%	0,41	0%	0,20	0%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>3,00</b>	<b>0,4%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,2%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>17,66</b>	<b>2%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>8,83</b>	<b>1%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>793,63</b>		<b>815,83</b>		<b>804,73</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Adapun besaran DAK Non-Fisik untuk PUG berupa BOS Pendidikan Rp46,54 milyar (50%), BOK Rp9,14 (10%), BOKB Rp2,15 milyar (2%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,- serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp 200 juta. Insentif Fiskal sebesar Rp8,83 milyar dapat juga didorong untuk mendukung PUG meski tidak terlalu signifikan.

Secara umum, Kota Tarakan mendapat penilaian maksimal karena beberapa faktor: Visi dan misi Walikota Tarakan telah mencakup kesetaraan gender dalam pembangunan melalui Misi 9, yang berfokus pada peningkatan kualitas kesetaraan gender dan peran milenial dalam Pembangunan; Pengarusutamaan gender tercantum dalam RPJMD dan RKPD, meski belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG termasuk belum ada Perwali terkait PUG; APBD Kota Tarakan telah mempertimbangkan PUG dengan melakukan tagging ARG pada anggaran program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, meski pelaksanaannya masih terbatas; dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berupa DAK Fisik, dan BOK di Kota Tarakan telah disesuaikan dengan pengarusutamaan gender, termasuk pengalokasian untuk kegiatan yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan.

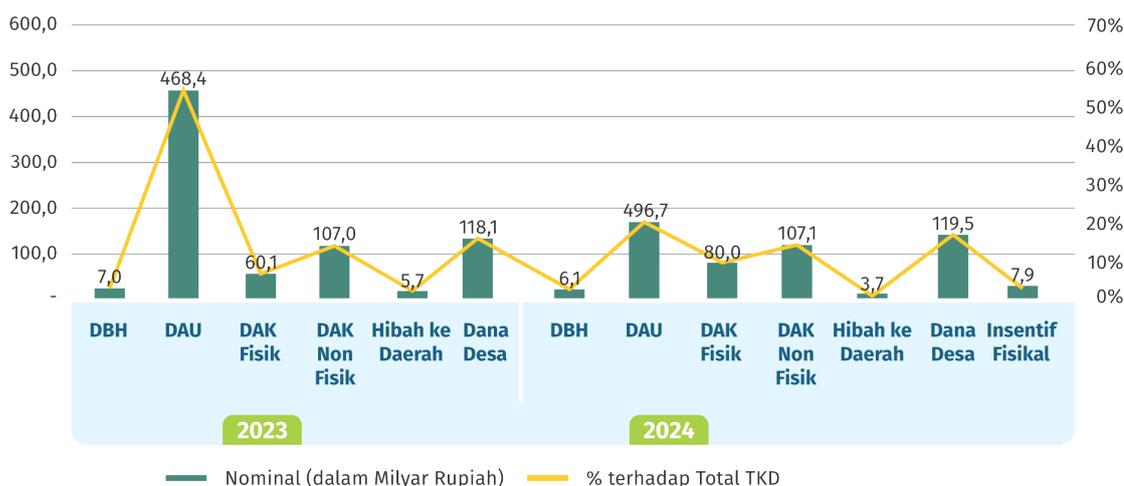
Pemahaman PUG terutama implementasi penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sudah dilakukan meski masih dalam tahap pelatihan dan sosialisasi. Pemerintah Kota Tarakan telah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran melalui Musrenbang dan Konsultasi Publik. Selain itu, Pemerintah Kota Tarakan juga melakukan monitoring dan evaluasi PUG secara internal yang dilakukan oleh Inspektorat. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK, meski masih sangat terbatas. Kota Tarakan melakukan inovasi seperti loket khusus untuk disabilitas, pemenuhan sarana prasarana PUG, dan kunjungan untuk perekaman KTP lansia. Namun, insentif untuk dukungan PUG belum maksimal.

#### **b. Kabupaten Bone Bolango**

Kabupaten Bone Bolango memperoleh agregat skor 3,65 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat kedua teratas dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kabupaten Bone Bolango tersebut merupakan akumulasi skor dari: 4,00 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 4,10 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 3,00 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 3,00 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kabupaten Bone Bolango menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp793,59 milyar pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp6,53 milyar (1%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp482,54 milyar (61%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp70,07 milyar (9%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp107 (13%), Hibah Ke Daerah Rp4,70 milyar (1%), dan Insentif Fiskal sebesar Rp3,95 milyar (1%) dan Dana Desa sebesar Rp118,79 milyar (15%) dari rerata Total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kabupaten Bone Bolango TA. 2023-2024.

Grafik 13: Tren TKD Kabupaten Bone Bolango  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bone Bolango. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kabupaten Bone Bolango tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan Rp43,37 milyar (9%), Kesehatan Rp37,35 milyar (8%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp10,95 milyar (10%) dari Total DAU. Besaran dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp13,55 milyar (19%), Kesehatan Rp17,28 milyar (23%) dari total DAK Fisik. Kabupaten Bone Bolango tidak mendapat DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi. Berikut adalah Tabel TKD Kabupaten Bone Bolango TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 16 – TKD Responsif Gender  
Kabupaten Bone Bolango TA. 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>6,97</b>	<b>1%</b>	<b>6,10</b>	<b>1%</b>	<b>6,53</b>	<b>1%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>468,39</b>	<b>61%</b>	<b>496,70</b>	<b>61%</b>	<b>482,54</b>	<b>61%</b>
Pendidikan	55,05	12%	31,69	6%	43,37	9%
Kesehatan	44,64	10%	30,06	6%	37,35	8%
Pekerjaan Umum	11,09	2%	10,80	2%	10,95	2%
<b>DAK Fisik</b>	<b>60,10</b>	<b>8%</b>	<b>80,05</b>	<b>10%</b>	<b>70,07</b>	<b>9%</b>
Pendidikan	8,05	13%	19,05	24%	13,55	19%
Kesehatan	6,92	12%	27,64	35%	17,28	23%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>106,95</b>	<b>14%</b>	<b>107,05</b>	<b>13%</b>	<b>107,00</b>	<b>13%</b>
BOS Pendidikan	28,49	27%	27,87	26%	28,18	26%
BOK	24,99	23%	25,57	24%	25,28	24%

BOKB	4,84	5%	5,37	5%	5,11	5%
Peningkatan KUMK	-	0%	-	0%	-	0%
Pelayanan PPPA	0,44	0,4%	0,41	0,4%	0,42	0,4%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>5,66</b>	<b>1%</b>	<b>3,73</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,70</b>	<b>1%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	-	<b>0%</b>	<b>7,89</b>	<b>1%</b>	<b>3,95</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>118,12</b>	<b>15%</b>	<b>119,45</b>	<b>15%</b>	<b>118,79</b>	<b>15%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>766,20</b>		<b>820,98</b>		<b>793,59</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Adapun besaran DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG antara lain: BOS Pendidikan Rp28,18 milyar (26%), BOK Rp25,28 (24%), BOKB Rp5,11 milyar (5%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,- serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp 0,44 milyar (0,4%). Yang tidak kalah penting adalah kontribusi Dana Desa yang sebesar Rp118,79 milyar (15%) dan Insentif Fiskal Rp3,95 milyar yang juga bisa didorong untuk mendukung PUG.

Kabupaten Bone Bolango mendapat penilaian baik karena beberapa faktor, antara lain, Bupati Bone Bolango memasukkan perspektif kesetaraan gender dalam visi dan misi, dengan pengarusutamaan gender menjadi fokus dalam penganggaran dan perlindungan perempuan serta anak. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menerbitkan tiga Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pengarusutamaan gender, yaitu:

- Perda No 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Perda No 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- Perda No 9 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.
- PUG juga telah dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2023, dengan program-program yang didanai melalui DAU Spesific Grant Tahun 2023 dan TKD lainnya.

Kabupaten Bone Bolango memiliki aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mendukung kegiatan terkait gender dan anak. Implementasi GAP dimulai sejak 2019, dengan pelatihan untuk auditor PPRG dan pelatihan bagi focal point PUG di setiap Perangkat Daerah. Anggaran responsif gender dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan, pengawasan kualitas air, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang ramah gender. DAK Non-Fisik digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis, advokasi, dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk bantuan untuk korban kekerasan rumah tangga dan pemerkosaan. Dana desa digunakan untuk pelatihan pengarusutamaan gender di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas dalam Musrenbang dan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis gender. Program-program yang mendukung PUG seperti program STOP Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Sekolah Perempuan dan Keluarga, dan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak.

Terkait pemantauan dan evaluasi PUG dilakukan oleh masing-masing dinas, dengan dukungan pelatihan dari Provinsi Gorontalo. Evaluasi dilakukan setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan penilaian dan kompetisi terkait inovasi pemanfaatan TKD untuk PUG di setiap Perangkat Daerah, dengan penilaian terhadap berbagai kriteria, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun belum terdapat skema insentif.

### c. Kabupaten Lombok Barat

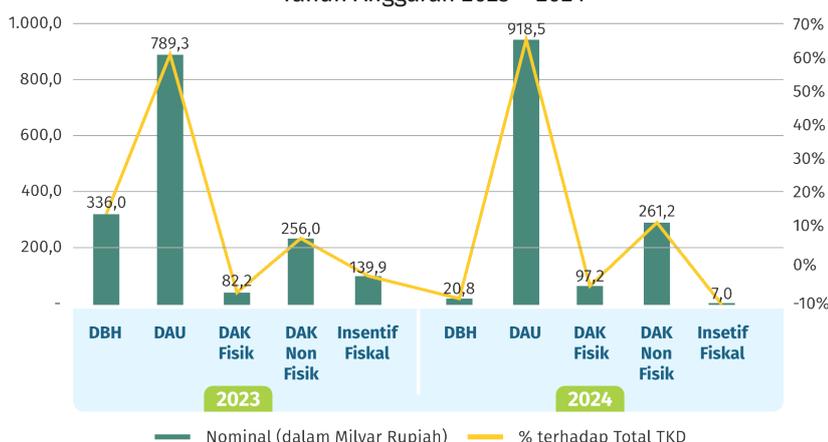
Kabupaten Lombok Barat memperoleh agregat skor 3,58 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat ketiga dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kabupaten Lombok Barat tersebut merupakan akumulasi skor dari: 4,35 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 3,80 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 3,75 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 1,50 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kabupaten Lombok Barat menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp1,37 triliun pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp28,39 milyar (2%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp853,90 milyar (62%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp89,73 milyar (7%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp258,56 milyar (19%), Hibah Ke Daerah Rp1,50 milyar (0,1%), dan Insentif Fiskal sebesar Rp3,52 milyar (0,1%) dan Dana Desa sebesar Rp141 milyar (10%) dari rerata total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kabupaten Lombok Barat TA. 2023-2024:



Kegiatan Lokakarya Monitoring Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Maluku, Ambon, 21-22 Mei 2024

Grifik 14: Tren TKD Kabupaten Lombok Barat  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lombok Barat. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kabupaten Lombok Barat tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan Rp63,24 milyar (7%), Kesehatan Rp74,15 milyar (9%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp5,80 milyar (1%) dari total DAU. Besaran dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp19,32 milyar (22%), Kesehatan Rp23,57 milyar (26%), Air Minum Rp13,69 milyar (15%), dan Sanitasi Rp8,67 milyar (10%). Berikut adalah Tabel TKD Kabupaten Lombok Barat TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 17 – TKD Responsif Gender  
Kabupaten Lombok Barat TA. 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>36,01</b>	<b>3%</b>	<b>20,78</b>	<b>1%</b>	<b>28,39</b>	<b>2%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>789,29</b>	<b>60%</b>	<b>918,50</b>	<b>63%</b>	<b>853,90</b>	<b>62%</b>
Pendidikan	50,16	6%	76,33	8%	63,24	7%
Kesehatan	77,71	10%	70,59	8%	74,15	9%
Pekerjaan Umum	7,30	1%	4,29	0%	5,80	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>82,22</b>	<b>6%</b>	<b>97,25</b>	<b>7%</b>	<b>89,73</b>	<b>7%</b>
Pendidikan	19,10	23%	19,54	20%	19,32	22%
Kesehatan	21,72	26%	25,42	26%	23,57	26%
Air Minum	11,88	14%	15,49	16%	13,69	15%
Sanitasi	6,37	8%	10,97	11%	8,67	10%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>255,95</b>	<b>20%</b>	<b>261,17</b>	<b>18%</b>	<b>258,56</b>	<b>19%</b>
BOS Pendidikan	101,44	40%	101,51	39%	101,47	39%
BOK	32,00	13%	31,27	12%	31,64	12%
BOKB	8,04	3%	7,50	3%	7,77	3%
Peningkatan KUMK	0,46	0%	0,61	0%	0,53	0%

Pelayanan PPPA	0,60	0%	0,41	0%	0,50	0%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>3,00</b>	<b>0,2%</b>	-	<b>0%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,1%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	-	<b>0%</b>	<b>7,03</b>	<b>0,5%</b>	<b>3,52</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>139,90</b>	<b>11%</b>	<b>142,09</b>	<b>10%</b>	<b>141,00</b>	<b>10%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>1.306,38</b>		<b>1.447,32</b>		<b>1.376,85</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Adapun besaran DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG antara lain: BOS Pendidikan Rp101,47 milyar (39%), BOK Rp31,64 (12%), BOKB Rp7,77 milyar (3%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,53 milyar, serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp 0,60 milyar (0,4%). Yang tidak kalah penting adalah kontribusi Dana Desa yang sebesar Rp141 milyar (10%) dan Insentif Fiskal Rp3,52 milyar yang juga bisa didorong untuk mendukung PUG.

Skor dan peringkat Kabupaten Lombok Barat relatif tinggi karena beberapa faktor, antara lain, perspektif kesetaraan gender dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024, khususnya pada Misi 4 yang mencakup Program Pengarusutamaan Gender. Kabupaten Lombok Barat belum menyusun rencana aksi PUG, meskipun pengarusutamaan gender menjadi topik pembahasan dalam rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif. Pengarusutamaan gender sudah menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Anggaran Responsif Gender (ARG) sudah ada dalam dokumen RKA dan program OPD. Kabupaten Lombok Barat memiliki POKJA yang melibatkan Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), BPKAD, dan Inspektorat, tetapi implementasi GAP/GBS masih kurang maksimal, dengan hanya 12 dari 32 OPD yang menerapkan GAP.



Kegiatan Lokakarya Monitoring Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 15-16 Mei 2024

DAK Fisik untuk Penanganan Stunting dan DAK Nonfisik untuk Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mempertimbangkan responsif gender. Dana Desa digunakan untuk BLT dan penanggulangan stunting dengan realisasi 96%. DAK Fisik 2023 untuk penguatan skrining stunting telah terealisasi 98,74%. DAK Non-fisik untuk Perlindungan Perempuan dan Anak 2023 telah terealisasi 90%, meskipun ada item yang tidak teralisasi, seperti tes DNA. Selain TKD, Kabupaten Lombok Barat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, seperti kapasitas petugas dan fasilitas puskesmas. Pengurangan atau potongan pajak dan retribusi untuk kelompok rentan diatur tanpa membedakan gender, dan kelompok perempuan terlibat signifikan di sektor kesehatan.

Pemantauan anggaran responsif gender dilakukan secara umum oleh Inspektorat dan Dinas PPPA, meskipun evaluasi belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM. Pemantauan dan evaluasi PUG oleh Dinas PPA terbatas pada anggaran Dana Alokasi Khusus. Keterbatasan SDM, anggaran, dan regulasi menjadi kendala utama dalam implementasi PUG, terutama dalam partisipasi perempuan. Kegiatan pelatihan PPRG belum dilakukan sejak 2020, namun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di tahun 2024 telah direncanakan.

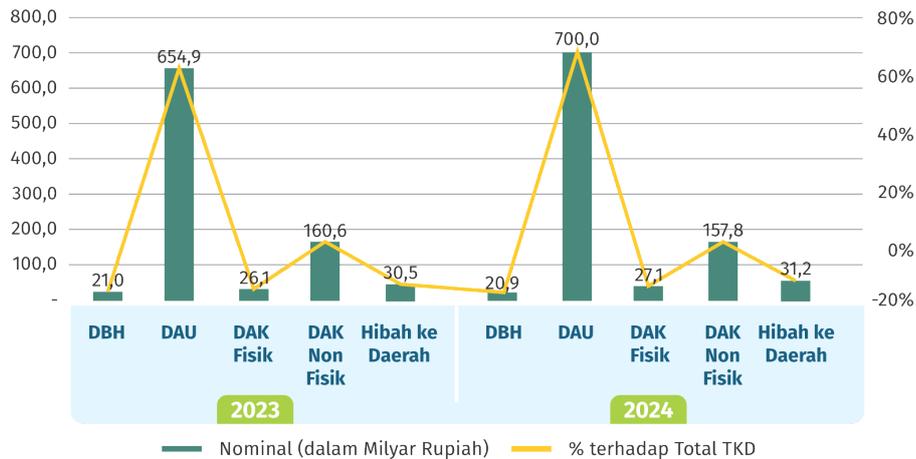
Inovasi PUG yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, antara lain: Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK): Menanggulangi Perkawinan Anak; Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jacket): Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah; Standardisasi Fasilitas Kesehatan: Menyediakan fasilitas kesehatan ramah disabilitas; Rumah Tunggu: Menyediakan rumah tunggu bagi ibu yang akan melahirkan di daerah terpencil.

#### **d. Kota Ambon**

Kota Ambon memperoleh agregat skor 2,97 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat ke-empat dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kota Ambon tersebut merupakan akumulasi skor dari: 3,93 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 4,00 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 2,29 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 1,43 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kota Ambon menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp916,19 milyar pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp20,97 milyar (2%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp677,44 milyar (74%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp26,61 milyar (3%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp159,19 milyar (17%), Hibah Ke Daerah Rp1,12 milyar (0,1%), dan Dana Desa sebesar Rp30,86 milyar (3%) dari rerata total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kota Ambon TA. 2023-2024:

Grafik 15: Tren TKD Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Ambon. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kota Ambon tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU *Spesific Grant* Bidang Pendidikan sebesar Rp49,27 milyar (7%), Kesehatan Rp27,41 milyar (4%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp4,52 milyar (1%) dari total DAU. Selain itu juga dari besaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp12,72 milyar (47%), Kesehatan Rp11,62 milyar (44%), Air Minum Rp0,54 milyar (2%), dan Sanitasi Rp130 juta (0,1%). Berikut adalah Tabel TKD Kota Ambon TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 18 – TKD Responsif Gender Kota Ambon Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>21,00</b>	<b>2%</b>	<b>20,95</b>	<b>2%</b>	<b>20,97</b>	<b>2%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>654,89</b>	<b>73%</b>	<b>699,98</b>	<b>75%</b>	<b>677,44</b>	<b>74%</b>
Pendidikan	50,99	8%	47,55	7%	49,27	7%
Kesehatan	47,27	7%	7,55	1%	27,41	4%
Pekerjaan Umum	7,30	1%	1,75	0%	4,52	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>26,10</b>	<b>3%</b>	<b>27,12</b>	<b>3%</b>	<b>26,61</b>	<b>3%</b>
Pendidikan	8,38	32%	17,06	63%	12,72	47%
Kesehatan	17,72	68%	5,52	20%	11,62	44%
Air Minum	-	0%	1,08	4%	0,54	2%
Sanitasi	-	0%	0,25	1%	0,13	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>160,58</b>	<b>18%</b>	<b>157,80</b>	<b>17%</b>	<b>159,19</b>	<b>17%</b>
BOS Pendidikan	59,70	37%	58,71	37%	59,21	37%
BOK	27,23	17%	26,18	17%	26,71	17%
BOKB	3,24	2%	3,46	2%	3,35	2%
Peningkatan KUMK	0,41	0,3%	0,42	0,3%	0,41	0,3%

Pelayanan PPPA	0,60	0,4%	0,41	0,3%	0,50	0,3%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	-	<b>0%</b>	<b>2,24</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,12</b>	<b>0,1%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>30,48</b>	<b>3%</b>	<b>31,24</b>	<b>3%</b>	<b>30,86</b>	<b>3%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>893,05</b>		<b>939,32</b>		<b>916,19</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Besaran DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG antara lain: BOS Pendidikan Rp59,21 milyar (37%), BOK Rp26,71 (17%), BOKB Rp3,35 milyar (2%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp 0,41 milyar (0,3%), serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp0,60 milyar (0,3%) dari Total DAK Non-Fisik. Yang tidak kalah penting adalah kontribusi Dana Desa yang sebesar Rp30,86 milyar (3%) yang juga bisa didorong untuk mendukung PUG di level desa.

Perspektif kesetaraan gender sudah tercantum dalam visi misi Walikota Ambon, dan PUG telah menjadi topik dalam rapat eksekutif dan legislatif. Penganggaran sudah mempertimbangkan PUG dan melibatkan organisasi Masyarakat sipil, namun banyak Perangkat Daerah yang belum familiar dengan PUG. Secara kelembagaan, SK Pokja PUG telah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Ambon: KEP-610/2018 tentang Pokja PUG, tetapi implementasi ARG, GAP, dan GBS masih belum berjalan dengan baik.

Anggaran responsif gender telah mengikuti petunjuk teknis (juknis) dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari KPPPA, meskipun belum optimal. Realisasi anggaran DAK Non-fisik untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah banyak digunakan untuk makan korban dan penampungan korban. Namun, Kota Ambon belum memiliki rumah aman atau rumah rehabilitasi.

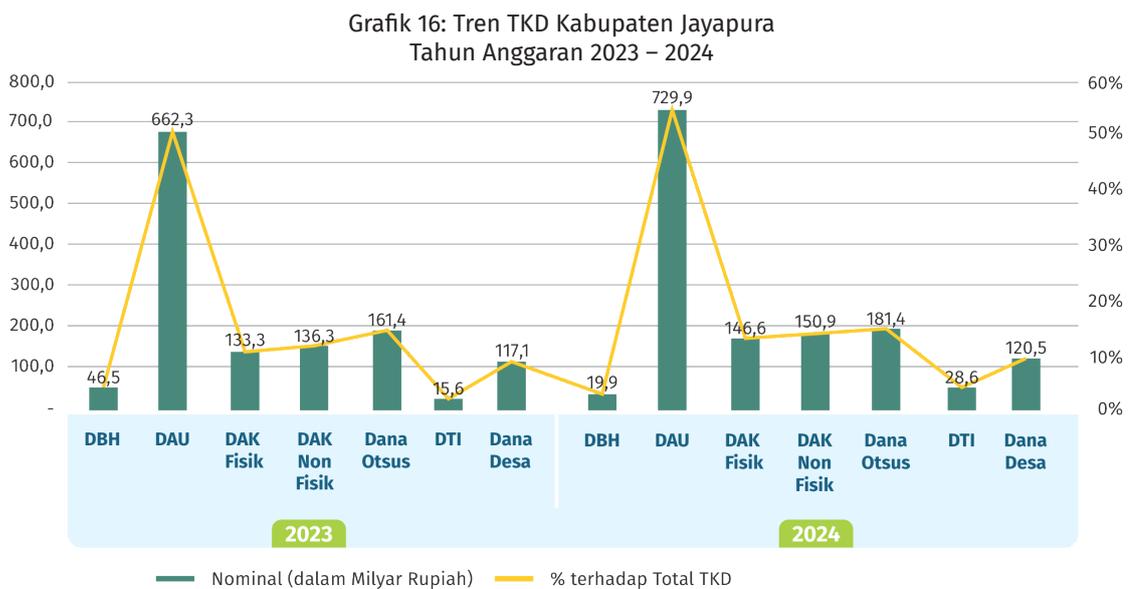
Evaluasi penganggaran berbasis gender dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun bersama BAPPEDA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD), mencakup target, indikator, dan capaian PUG. Monitoring pengarusutamaan gender dilakukan oleh pokja yang terdiri dari beberapa OPD terkait, namun koordinasi dan sinergi antar OPD masih perlu ditingkatkan. Pemahaman mengenai PUG belum merata di semua OPD. Hanya BAPPEDA dan Dinas DP3AMD yang memiliki pemahaman yang baik mengenai PUG. Pelatihan terkait analisis gender, GAP/GBS, dan gender tagging sebagian besar hanya diberikan kepada DP3AMD, padahal pelatihan ini perlu diberikan kepada seluruh Dinas.

Implementasi inovasi dan insentif terkait PUG belum dilakukan secara optimal. Keterbatasan anggaran menjadi kendala, sehingga Pemda Kota Ambon belum melakukan benchmarking dengan daerah lain mengenai TKD untuk mendukung PUG. Secara keseluruhan, meskipun pengarusutamaan gender mulai mendapat perhatian di Kota Ambon, masih terdapat banyak tantangan, terutama dalam hal pemahaman yang merata, koordinasi antar Dinas, dan keterbatasan anggaran.

### e. Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura memperoleh agregat skor 2,86 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat kelima dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kabupaten Jayapura tersebut merupakan akumulasi skor dari: 2,87 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 2,67 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 2,50 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 3,38 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kabupaten Jayapura menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp1,3 triliun pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp33,24 milyar (3%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp696,16 milyar (53%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp140,01 milyar (11%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp143,63 milyar (11%), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp171,44 milyar (13%), Dana Tambahan Infrastruktur Rp22,17 milyar (1,7%), dan Dana Desa sebesar Rp118,84 milyar (9%) dari rerata total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kabupaten Jayapura TA. 2023-2024:



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jayapura. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kabupaten Jayapura tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU *Spesific Grant* Bidang Pendidikan sebesar Rp68,88 milyar (10%), Kesehatan Rp54,40 milyar (8%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp24,67 milyar (4%) dari Total DAU. Selain itu juga dari besaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp39,87 milyar (28%) dan Kesehatan Rp17,15 milyar (12%) dari total DAK Fisik. Kabupaten Jayapura tidak mendapatkan DAU Bidang Air Minum dan Sanitasi pada dua tahun terakhir. Berikut adalah Tabel TKD Kabupaten Jayapura TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 19 – TKD Responsif Gender  
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>46,58</b>	<b>4%</b>	<b>19,90</b>	<b>1%</b>	<b>33,24</b>	<b>3%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>662,36</b>	<b>52%</b>	<b>729,96</b>	<b>53%</b>	<b>696,16</b>	<b>53%</b>
Pendidikan	60,20	9%	77,57	11%	68,88	10%
Kesehatan	60,01	9%	48,79	7%	54,40	8%
Pekerjaan Umum	25,78	4%	23,56	3%	24,67	4%
<b>DAK Fisik</b>	<b>133,33</b>	<b>10%</b>	<b>146,691</b>	<b>11%</b>	<b>140,01</b>	<b>11%</b>
Pendidikan	37,17	28%	42,572	29%	39,87	28%
Kesehatan	23,06	17%	11,243	8%	17,15	12%
Air Minum	-	0%	0,000	0%	-	0%
Sanitasi	-	0%	0,000	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>136,34</b>	<b>11%</b>	<b>150,926</b>	<b>11%</b>	<b>143,63</b>	<b>11%</b>
BOS Pendidikan	57,61	42%	59,904	40%	58,76	41%
BOK	32,74	24%	39,679	26%	36,21	25%
BOKB	3,45	3%	3,701	2%	3,58	2%
Peningkatan KUMK	-	0%	-	0%	-	0%
Pelayanan PPPA	-	0%	-	0%	-	0%
Ketahanan Pangan & Pertanian	0,59	0,4%	-	0%	0,30	0,2%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>177,10</b>	<b>14%</b>	<b>210,12</b>	<b>15%</b>	<b>193,61</b>	<b>15%</b>
<b>Dana Otsus Papua</b>	<b>161,43</b>	<b>13%</b>	<b>181,46</b>	<b>13%</b>	<b>171,44</b>	<b>13%</b>
a. Penerimaan Umum	71,74	44%	84,57	47%	78,16	46%
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	89,68	56%	96,89	53%	93,28	54%
<b>Dana Tambahan Infrastruktur</b>	<b>15,68</b>	<b>1,2%</b>	<b>28,66</b>	<b>2,1%</b>	<b>22,17</b>	<b>1,7%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>117,10</b>	<b>9%</b>	<b>120,58</b>	<b>9%</b>	<b>118,84</b>	<b>9%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>1.272,81</b>		<b>1.378,17</b>		<b>1.325,49</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu 2023-2024, diolah

Adapun besaran DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG antara lain: BOS Pendidikan Rp58,76 milyar (41%), BOK Rp36,21 (25%), dan BOKB Rp3,58 milyar (2%) dari Total DAK Non-Fisik. Kabupaten Jayapura tidak mendapatkan DAK Non-Fisik Bidang Peningkatan Koperasi dan UMKM serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). Ada juga Dana Desa sebesar Rp118,84 milyar (9%) dari Total TKD yang bisa didorong untuk mendukung PUG di level Desa.

Secara umum, skor dan peringkat Kabupaten Jayapura dalam implementasi HKPD Responsif Gender ini cukup baik, antara lain, perspektif kesetaraan gender tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, dengan sasaran 1.6 untuk meningkatkan kesetaraan gender, diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Perlindungan perempuan, anak, difabel, dan kelompok marginal menjadi prioritas dalam program pembangunan 2023-2026. Namun demikian, PUG belum menjadi topik utama dalam pembahasan anggaran daerah antara eksekutif dan legislatif. Kabupaten Jayapura belum menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG dan Profil Gender.

PUG belum dipertimbangkan dalam penyusunan APBD secara formal. Tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) hanya dilakukan untuk dua program (stunting dan kemiskinan). DAK Fisik untuk kesehatan, air minum, dan sanitasi penanganan stunting sudah dialokasikan sesuai juknis tetapi belum ada bukti penerapan PPRG. Dana Desa digunakan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, namun belum terkait langsung dengan PPRG. DAK Non Fisik untuk BOK dan BOP-PAUD direncanakan untuk tahun 2024 dan 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak menerima anggaran DAK Fisik untuk stunting dan air minum, dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak menggunakan DAU dan Dana Otsus. Kabupaten Jayapura mendapatkan dukungan dari lembaga donor seperti Wahana Visi Indonesia, UNICEF, USAID, dan LBH APIK untuk mendukung PUG.

Kabupaten Jayapura belum melakukan evaluasi terhadap anggaran responsif gender secara spesifik. Pemantauan dilakukan oleh Bappeda dan Inspektorat Daerah, namun Pokja PUG yang dibentuk pada 2016 tidak aktif, tidak ada koordinasi antar OPD terkait kegiatan responsif gender sejak 2019. Keterbatasan budaya dan adat yang membatasi partisipasi perempuan menjadi kendala. Keterbatasan dalam pembentukan Pokja PUG dan UPTD PPA menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan responsif gender. Namun demikian, Kelompok Perempuan di Kabupaten Jayapura banyak terlibat dalam kegiatan seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemulihan korban KDRT, serta pemberian layanan kesehatan dan mediasi.

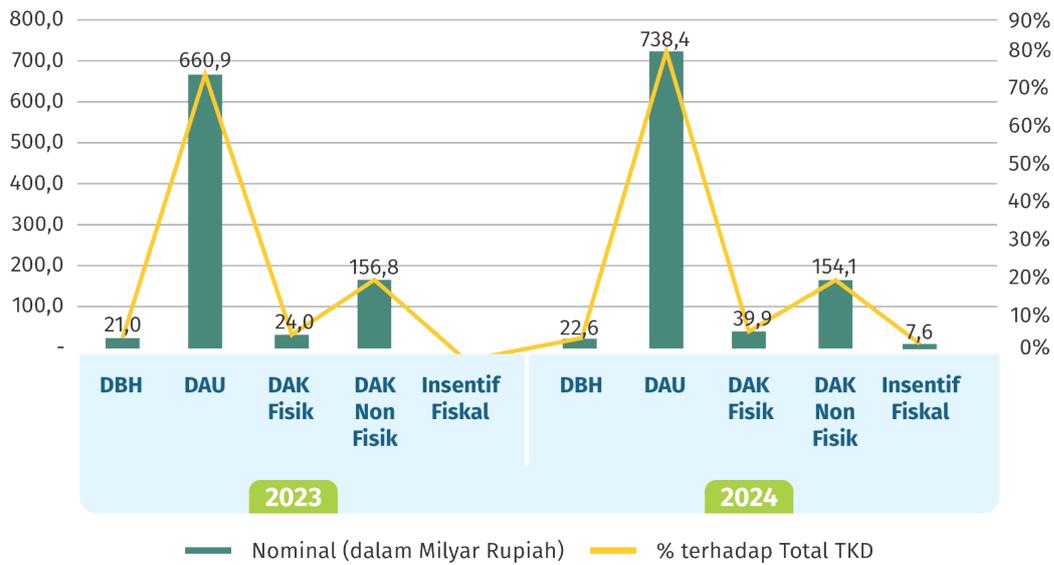
Inovasi PUG yang telah dikembangkan, antara lain: Aplikasi "Kami Sehati" untuk pemantauan kesehatan ibu dan "Sayang Bunda" untuk deteksi dini HIV dan IMS adalah contoh inovasi yang didanai melalui DAK Non Fisik. Kabupaten Jayapura melakukan benchmarking ke daerah lain terkait layanan pemberdayaan dan penanganan kasus perempuan dan anak ke Kabupaten Banyuwangi. Anggaran khusus dialokasikan untuk program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pembuatan Batik dan Kue Sagu, serta untuk operasional program kesehatan ibu seperti "Sayang Bunda" dan "Kami Sehati".

#### **f. Kota Kupang**

Kota Kupang memperoleh agregat skor 2,78 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat ke enam dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kota Kupang tersebut merupakan akumulasi skor dari: 2,86 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 3,83 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 3,00 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 1,63 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kota Kupang menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp912,74 milyar pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp21,84 milyar (2%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp699,65 milyar (77%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp31,97 milyar (3%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp155,47 milyar (17%), Hibah Ke Daerah Rp0,-, dan Insentif Fiskal Rp3,82 (0,4%) dari rerata total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kota Kupang TA. 2023-2024:

Grafik 17: Tren TKD Kota Kupang  
Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, ada potensi dana TKD tersebut digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Kupang. Jenis TKD tersebut antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kota Kupang tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU Specific Grant Bidang Pendidikan sebesar Rp 51,71 milyar (7%), Kesehatan Rp45,11 milyar (7%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp9,01 milyar (1%) dari Total DAU. Selain itu juga dari besaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp 12,32 milyar (41%), Kesehatan Rp 11,60 milyar (36%), Air Minum Rp 0,77 milyar (2%), dan Sanitasi Rp 2,50 milyar (10%) dari rerata total DAK Fisik. Berikut adalah Tabel TKD Kota Kupang TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 20 – TKD Responsif Gender  
Kota Kupang Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>21,09</b>	<b>2%</b>	<b>22,58</b>	<b>2%</b>	<b>21,84</b>	<b>2%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>660,92</b>	<b>77%</b>	<b>738,37</b>	<b>77%</b>	<b>699,65</b>	<b>77%</b>
Pendidikan	40,02	6%	63,40	9%	51,71	7%
Kesehatan	50,23	8%	39,99	5%	45,11	7%
Pekerjaan Umum	10,59	2%	7,43	1%	9,01	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>24,03</b>	<b>3%</b>	<b>39,90</b>	<b>4%</b>	<b>31,97</b>	<b>3%</b>
Pendidikan	11,75	49%	12,89	32%	12,32	41%
Kesehatan	7,78	32%	15,41	39%	11,60	36%
Air Minum	0,50	2%	1,04	3%	0,77	2%
Sanitasi	4,00	17%	1,00	3%	2,50	10%

<b>DAK Non Fisik</b>	<b>156,84</b>	<b>18%</b>	<b>154,10</b>	<b>16%</b>	<b>155,47</b>	<b>17%</b>
BOS Pendidikan	65,87	42%	65,89	43%	65,88	42%
BOK	21,53	14%	17,73	12%	19,63	13%
BOKB	6,05	4%	5,69	4%	5,87	4%
Peningkatan KUMK	0,42	0,3%	0,42	0,3%	0,42	0%
Pelayanan PPPA	-	0%	0,52	0,3%	0,26	0%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	-	<b>0%</b>	<b>7,65</b>	<b>1%</b>	<b>3,82</b>	<b>0,4%</b>
<b>Dana Otsus</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Dana Desa</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>862,88</b>		<b>962,60</b>		<b>912,74</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Adapun besaran DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG antara lain: BOS Pendidikan Rp65,88 milyar (42%), BOK Rp19,63 (13%), BOKB Rp5,87 milyar (4%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,42 milyar (0,4%), serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp0,26 milyar (0,1%) dari Total DAK Non-Fisik. Insentif Fiskal, meski nominalnya tidak terlalu signifikan, hanya sebesar Rp3,82 milyar (0,4%) juga dapat didorong berkontribusi terhadap PUG di daerah.

Skor dan peringkat Kota Kupang yang relatif baik disebabkan beberapa faktor, antara lain: PUG sudah tercantum dalam Visi-Misi Kepala Daerah, RPJMD, RKPD, dan Profil Gender. Namun, pemahaman tentang PUG masih terbatas pada Dinas P3A saja. Pemerintah Kota Kupang belum memiliki Rencana Aksi Daerah PUG sebelum 2024, di antaranya karena keterbatasan anggaran. RAD PUG akan disusun dan dilaksanakan pada tahun 2024. Dinas P3A Kota Kupang telah melakukan peningkatan kapasitas OPD lain terkait Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Analysis (GBA), namun pelaksanaannya belum diarahkan untuk Anggaran Responsif Gender (ARG).

TKD Kota Kupang sudah mempertimbangkan responsif gender, tetapi perlindungan perempuan dan anak masih sangat terbatas. Kota Kupang mendapatkan DAK Non-Fisik PPA pada 2021, namun hanya 50% yang disalurkan. Dana yang digunakan sebesar Rp187,35 juta, tetapi laporan tahap 1 tidak disampaikan tepat waktu, sehingga penyaluran tahap 2 tertunda. Pada 2024, Kota Kupang kembali menerima DAK Non-fisik PPA sebesar Rp520 juta, yang telah disalurkan 50% untuk penyewaan rumah aman bagi korban. Realisasi kontrak DAK Fisik bidang kesehatan sebesar Rp7,65 miliar digunakan untuk penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting, serta penyediaan alat kesehatan. Realisasi kontrak DAK Fisik bidang sanitasi sebesar 3,4 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S).

Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang responsif gender dilakukan oleh Bappeda. Namun, pelaporan dan evaluasi sering terlambat. Anggaran untuk perlindungan perempuan dapat dilihat di KUA PPAS dan RKPD, namun pelaksanaan tagging anggaran dilakukan oleh masing-masing OPD. Inspektorat

belum melakukan pengawasan spesifik terhadap gender, hanya melakukan pengawasan rutin. Pengawasan PUG dilakukan oleh DP3A.

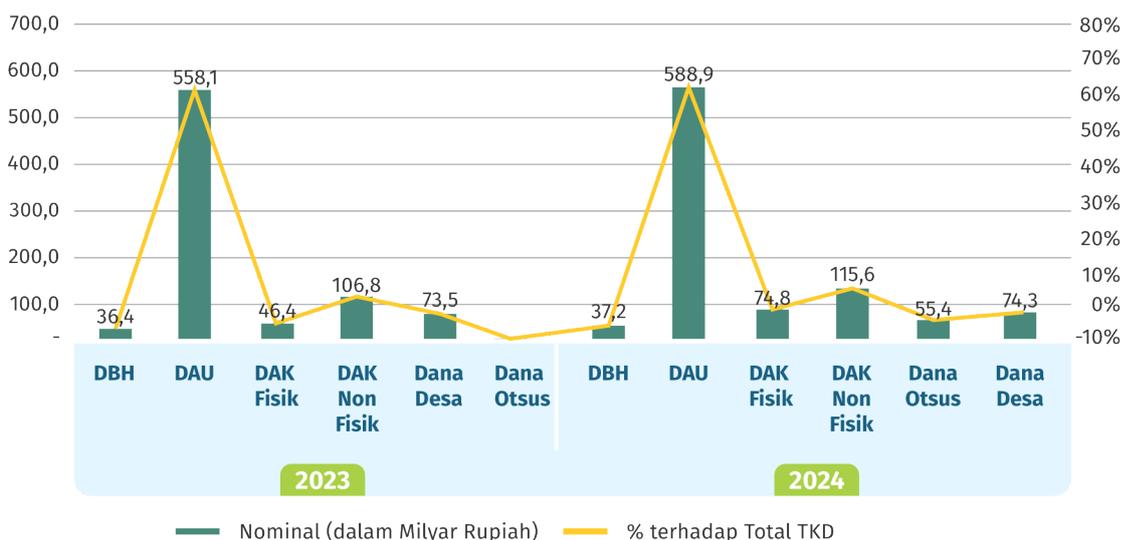
Kota Kupang juga telah melaksanakan beberapa inovasi seperti kelurahan dan tempat ibadah ramah anak serta pembekalan calon pengantin untuk meminimalisir stunting. Rencana untuk membentuk Kampung KB di 51 kelurahan pada 2024.

### g. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh memperoleh agregat skor 2,51 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat ke tujuh dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kota Banda Aceh tersebut merupakan akumulasi skor dari: 2,71 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 3,00 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 1,63 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 2,38 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kota Banda Aceh menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp883,73 milyar pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp36,80 milyar (4%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp573,51 milyar (65%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp60,60 milyar (7%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp111,13 milyar (13%), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp55,41 milyar (6% dari Total TKD dan hanya diterima pada TA. 2024), dan Dana Desa sebesar Rp73,91 milyar (8%) dari rerata Total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kota Banda Aceh TA. 2023-2024:

Grafik 18: Tren TKD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, potensi TKD yang dapat digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Banda Aceh, antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kota Banda Aceh tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir; DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan sebesar Rp22,40 milyar (4%), Kesehatan Rp26,62 milyar (5%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp3,65 milyar (1%) dari Total DAU; DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp9,15 milyar (15%), Kesehatan Rp22,49 milyar (15%), Air Minum Rp6,96 milyar (11%), dan Sanitasi Rp7,84 (14%) dari rerata Total DAK Fisik. Berikut adalah Tabel TKD Kota Banda Aceh TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG.

Tabel 21 – TKD Responsif Gender  
Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>36,43</b>	<b>4%</b>	<b>37,18</b>	<b>4%</b>	<b>36,80</b>	<b>4%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>558,11</b>	<b>68%</b>	<b>588,91</b>	<b>62%</b>	<b>573,51</b>	<b>65%</b>
Pendidikan	12,47	2%	32,32	5%	22,40	4%
Kesehatan	32,89	6%	20,35	3%	26,62	5%
Pekerjaan Umum	7,30	1%	-	0%	3,65	1%
<b>DAK Fisik</b>	<b>46,38</b>	<b>6%</b>	<b>74,83</b>	<b>8%</b>	<b>60,60</b>	<b>7%</b>
Pendidikan	5,67	12%	12,63	17%	9,15	15%
Kesehatan	3,70	8%	41,28	55%	22,49	32%
Air Minum	5,19	11%	8,74	12%	6,96	11%
Sanitasi	7,88	17%	7,81	10%	7,84	14%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>106,77</b>	<b>13%</b>	<b>115,61</b>	<b>12%</b>	<b>111,19</b>	<b>13%</b>
BOS Pendidikan	41,40	39%	44,60	39%	43,00	39%
BOK	10,89	10%	13,54	12%	12,21	11%
BOKB	3,46	3%	2,67	2%	3,07	3%
Peningkatan KUMK	0,42	0,4%	-	0%	0,21	0%
Pelayanan PPPA	0,60	1%	0,52	0,4%	0,56	1%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>55,41</b>	<b>6%</b>	<b>27,71</b>	<b>3%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>73,48</b>	<b>9%</b>	<b>74,34</b>	<b>8%</b>	<b>73,91</b>	<b>8%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>821,18</b>		<b>946,29</b>		<b>883,73</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Selain itu, ada pula TKD yang bersumber dari DAK Non-Fisik yang potensial untuk didorong mendukung PUG, antara lain: BOS Pendidikan Rp43 milyar (39%), BOK Rp12,21 (11%), BOKB Rp3,07 milyar (3%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,21 milyar (0,2%), serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp0,56 milyar (1%) dari Total DAK Non-Fisik. Kota Banda Aceh juga mendapatkan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp27,71 (3%) dan Dana Desa sebesar Rp73,91 milyar (8%) dari rerata Total TKD yang dapat didorong berkontribusi terhadap PUG.

Skor dan peringkat Kota Banda Aceh relatif rendah dikarenakan beberapa sebab, antara lain, perspektif kesetaraan gender telah dimasukkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Pembahasan anggaran sudah memasukkan kegiatan yang responsif gender meski terbatas. Namun, tidak ada penyebutan atau tagging khusus dalam dokumen anggaran. Perempuan dilibatkan secara berkesinambungan dalam proses perencanaan anggaran melalui musrenbang. Diharapkan ada penegasan dan ketentuan yang jelas, seperti Juknis, dalam penyusunan RKA untuk memperjelas posisi anggaran responsif gender.

Beberapa pos anggaran yang responsif gender sudah ada, dan kegiatan di OPD mulai memperhatikan responsif gender. Meskipun ada anggaran untuk PUG, jumlahnya terbatas, sehingga fokus lebih banyak pada kebutuhan yang bersifat mendesak, yang mengurangi perhatian terhadap PUG secara keseluruhan. Misalnya sarana prasarana rumah singgah dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial bagi anak berhadapan hukum yang berada di area yang sama, yang dapat mengarah pada perbedaan penanganan.

Pemantauan PUG dilakukan oleh Bappeda dan Inspektorat Daerah, namun terbatas oleh kecilnya anggaran dan kurangnya kegiatan yang berhubungan langsung dengan PUG. Pemantauan dan evaluasi dari Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pusat juga terbatas, mengurangi perhatian terhadap pelaksanaan PUG. Pemahaman Pemerintah Kota Banda Aceh tentang PUG masih terbatas dan tidak ada pelatihan atau peningkatan kapasitas yang terfokus pada PUG. Sosialisasi terkait PUG kurang, dan perangkat daerah belum memiliki roadmap atau perhatian yang cukup terhadap PUG.

Inovasi PUG yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu:

- Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (MUSRENA): Melibatkan perempuan dan kelompok rentan serta telah ada alokasi anggaran khusus sejak 2009.
- Sistem Informasi Rehabilitasi Sosial (SIRESOS): Dinas Sosial sedang mengembangkan sistem ini untuk rehabilitasi sosial, yang diharapkan segera diterapkan.

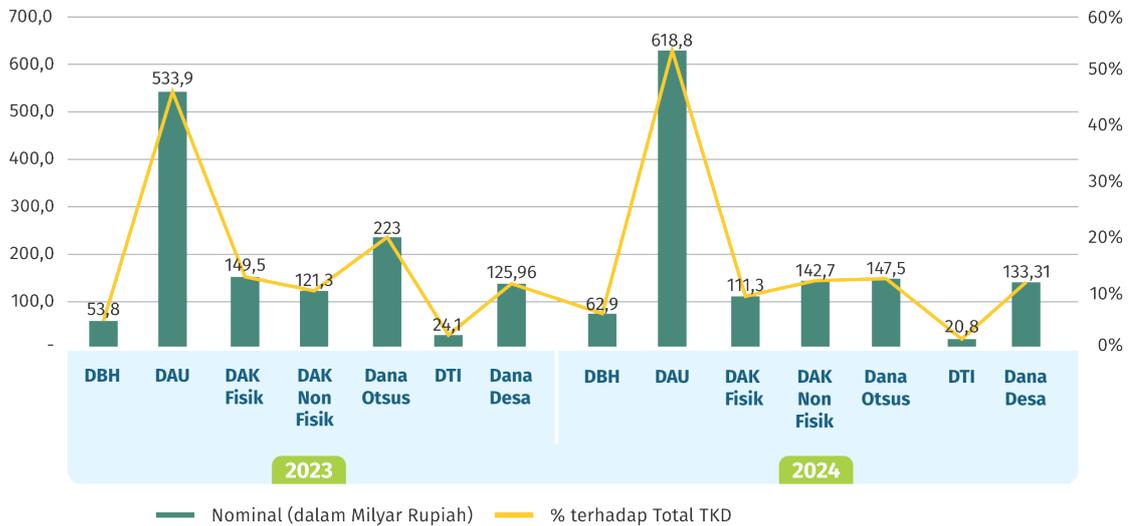
#### **h. Kabupaten Manokwari**

Kabupaten Manokwari memperoleh agregat skor 1,73 dari skala 1 sampai 5 dan menduduki peringkat terakhir dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Skor Kabupaten Manokwari tersebut merupakan akumulasi skor dari: 1,31 untuk aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 3,33 untuk aspek Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, 1,25 untuk aspek Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, serta 1,25 untuk aspek Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*.

Kabupaten Manokwari menerima dana TKD rata-rata sebesar Rp1,23 triliun pada tahun anggaran 2023-2024. TKD tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata sebesar Rp58,37 milyar (5%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp576,36 milyar (46%), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp130,37

milyar (11%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp132,04 milyar (11%), Hibah Ke Daerah Rp0,30 milyar (0,02%), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp190,20 milyar (15%), Dana Tambahan Infrastruktur Rp22,42 milyar (2%), dan Dana Desa sebesar Rp129,64 milyar (10%) dari rerata Total TKD. Berikut adalah grafik TKD Kabupaten Manokwari TA. 2023-2024.

Grafik 19: Tren TKD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023 – 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Bila dirinci lebih jauh, potensi TKD yang dapat digunakan untuk mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Manokwari, antara lain: Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, Kabupaten Manokwari tidak mendapatkan DBH-CHT dua tahun terakhir. Potensi lainnya adalah dari DAU *Spesific Grant* Bidang Pendidikan sebesar Rp66,78 milyar (11%), Kesehatan Rp33,45 milyar (6%), dan Pekerjaan Umum (Infrastruktur) Rp27,41 milyar (5%) dari Total DAU; DAK Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp43,63 milyar (33%) dan Kesehatan Rp16,63 milyar (13%). Kabupaten Manokwari tidak mendapatkan DAU Bidang Air Minum dan Sanitasi pada dua tahun terakhir. Berikut adalah Tabel TKD Kabupaten Manokwari TA. 2023-2024 yang potensial mendukung PUG:

Tabel 22 – TKD Responsif Gender Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023-2024

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis TKD	2023	%	2024	%	Rerata	
<b>DBH</b>	<b>53,80</b>	<b>4%</b>	<b>62,93</b>	<b>5%</b>	<b>58,37</b>	<b>5%</b>
DBH-CHT	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAU</b>	<b>533,93</b>	<b>43%</b>	<b>618,79</b>	<b>50%</b>	<b>576,36</b>	<b>46%</b>
Pendidikan	55,16	10%	78,39	13%	66,78	11%
Kesehatan	39,26	7%	27,65	4%	33,45	6%
Pekerjaan Umum	31,57	6%	23,26	4%	27,41	5%
<b>DAK Fisik</b>	<b>149,46</b>	<b>12%</b>	<b>111,28</b>	<b>9%</b>	<b>130,37</b>	<b>11%</b>
Pendidikan	55,66	37%	31,59	28%	43,63	33%
Kesehatan	17,67	12%	16,19	15%	16,93	13%
Air Minum	-	0%	-	0%	-	0%

Sanitasi	-	0%	-	0%	-	0%
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>121,34</b>	<b>10%</b>	<b>142,74</b>	<b>12%</b>	<b>132,04</b>	<b>11%</b>
BOS Pendidikan	57,88	48%	59,96	42%	58,92	45%
BOK	25,75	21%	25,92	18%	25,83	20%
BOKB	3,81	3%	4,46	3%	4,13	3%
Peningkatan KUMK	0,41	0,3%	-	0%	0,20	0%
Pelayanan PPPA	-	0%	0,52	0,4%	0,26	0,2%
<b>Hibah Ke Daerah</b>	<b>0,60</b>	<b>0,05%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0,30</b>	<b>0,02%</b>
<b>Insentif Fiskal</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Dana Otsus</b>	<b>257,01</b>	<b>21%</b>	<b>168,23</b>	<b>14%</b>	<b>212,62</b>	<b>17%</b>
<b>Dana Otsus Papua</b>	<b>232,95</b>	<b>19%</b>	<b>147,45</b>	<b>12%</b>	<b>190,20</b>	<b>15%</b>
a. Penerimaan Umum	103,53	44%	64,19	44%	83,86	44%
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	129,42	56%	83,27	56%	106,34	56%
<b>Dana Tambahan Infrastruktur</b>	<b>24,06</b>	<b>2%</b>	<b>20,78</b>	<b>2%</b>	<b>22,42</b>	<b>2%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>125,96</b>	<b>10%</b>	<b>133,31</b>	<b>11%</b>	<b>129,64</b>	<b>10%</b>
<b>Total TKD</b>	<b>1.242,10</b>		<b>1.237,28</b>		<b>1.239,69</b>	

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023-2024, diolah

Terdapat TKD yang bersumber dari DAK Non-Fisik yang potensial mendukung PUG, yakni BOS Pendidikan Rp58,92 milyar (45%), BOK Rp25,83 (20%), dan BOKB Rp4,13 milyar (3%), Peningkatan Koperasi dan UMKM Rp0,20 (0,01%), serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Rp0,26 milyar (0,02%). Ada juga Dana Desa sebesar Rp129,64 milyar (10%) yang bisa didorong untuk mendukung PUG di level Desa.

Skor dan peringkat Kabupaten Manokwari dalam implementasi HKPD tercermin dalam beberapa potret berikut, bahwa PUG belum masuk dalam visi dan misi Kepala Daerah, tetapi dalam RPJMD Kabupaten Manokwari telah menargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 90 pada 2026, dengan fokus pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Kabupaten Manokwari sudah melakukan pendataan gender, namun belum mampu disusun menjadi Profil Gender. Tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam dokumen RKA belum dilakukan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) oleh Perangkat Daerah.

DAK Fisik digunakan untuk sektor kesehatan, air minum, dan sanitasi, dengan beberapa kegiatan responsif gender seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil. DAK Non-fisik digunakan untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dana Desa digunakan untuk kegiatan responsif gender, seperti pengobatan malaria dan pemberian makanan bergizi. PAD digunakan untuk kegiatan responsif gender, seperti pengadaan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, seperti kawasan bebas rokok.

Perempuan dan kelompok rentan dilibatkan dalam forum konsultasi publik dan musrenbang, namun keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program masih terbatas. Inspektorat Daerah mengetahui kewajiban pemantauan

terhadap anggaran responsif gender, namun evaluasi pelaksanaan baru akan dimulai pada tahun 2024. Kabupaten Manokwari belum memiliki Kelompok Kerja PUG (Pengarusutamaan Gender). Pelaporan anggaran responsif gender belum dilakukan secara khusus, hanya dilakukan review penggunaan anggaran secara umum.

Pemahaman terkait PUG terbatas hanya di Dinas PPPA, sedangkan OPD lain belum memiliki pemahaman tentang TKD (Transfer ke Daerah) untuk mendukung PUG. Kabupaten Manokwari telah mengikuti sosialisasi terkait PUG, namun belum ada implementasi GAP/GBS atau gender tagging dalam pemanfaatan TKD. Beberapa inovasi PUG, seperti penyediaan toilet disabilitas, ruang bermain, dan rumah aman, telah dilakukan. Kabupaten Manokwari juga telah melaksanakan kegiatan seperti membuat kue, namun belum ada skema atau insentif untuk inovasi pemanfaatan TKD untuk PUG.



Monitoring Implementasi TKD pada Layanan Umum Daerah di Manokwari, Papua Barat

## LAPORAN MONITORING

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# BAB IV

# Penutup



# BAB IV

## Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang responsif gender merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang responsif gender dapat mendorong program-program yang lebih inklusif dan memberdayakan perempuan. Namun dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama antara lain berkenaan dari sisi regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran Pembangunan yang bertemakan responsif gender, ketiadaan insentif sebagai enabler pelaksanaan kebijakan HKPD yang responsif gender, penguatan kelembagaan PUG di daerah yang mendukung kebijakan HKPD yang responsif gender, dan penguatan kapasitas.

Diharapkan bahwa kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang responsif gender dan pemanfaatan alokasi transfer ke daerahnya dapat berjalan dengan baik, apabila didukung proses oleh kelembagaan penggerak dan pelaksana pengarusutamaan gender dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan Monitoring Implementasi HKPD Responsif Gender yang dilakukan di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di atas, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

#### a. Pemerintah Pusat.

Memperkuat komunikasi dan koordinasi Kementerian Penggerak PUG dalam rangka Implementasi HKPD Responsif Gender (Bappenas, Kemen-PPPA, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa);

- Menyusun dan memperkuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan TKD agar lebih responsif gender (Kementerian Keuangan);
- Menyempurnakan Pedoman dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi HKPD Responsif Gender yang terintegrasi pada pelaksanaan pendanaan desentralisasi (Kementerian Keuangan);
- Memperkuat Kapasitas Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi HKPD Responsif Gender (Kementerian Keuangan dan Kementerian Penggerak PUG)

#### b. Pemerintah Daerah

- Memperkuat Kelembagaan PUG Daerah terutama Pokja PUG di Daerah (Bappeda);
- Memastikan implementasi Dana TKD – baik DBH, DAU, DAK, Insentif Fiskal, Dana Otsus, dan Dana Desa, lebih responsif gender dan inklusif (Pokja PUG Daerah);
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TKD Responsif Gender bagi Provinsi kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya.

## LAPORAN MONITORING

Implementasi Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Responsif Gender Tahun Anggaran 2023-2024

Studi Kasus di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Indonesia

# Lampiran



# LAMPIRAN

## Penilaian/Skoring 8 Provinsi dan 8 Kota/Kabupaten

### 1. PROVINSI ACEH

#### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Aceh

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	4
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	5
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	5
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	4
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	4
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	3
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	3
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	3
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	4

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Aceh

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	4
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	3
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	1
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	3
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	3
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Aceh

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	4
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	5
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	4
5	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	4
6	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	4
7	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3

8	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reuiu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reuiu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	4
9	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

### Area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* Provinsi Aceh

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	4
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	2

## 2. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	4
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	4
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	5
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	5
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4

10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	2
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	4
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	2
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	5
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	5
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	5
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	2
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	5
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	2
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	5
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	4

9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	5
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	5

#### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	5
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	5
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	5
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	3
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	4
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	4
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

#### Area Kapasitas SDM, Inovasi dan *Continuous Improvement* Provinsi Kalimantan Utara

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	5
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	5
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	5
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	5
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	2
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	4
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	3

### 3. PROVINSI GORONTALO

#### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	5
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	5
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	3
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	4
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	3
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	3
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	4
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	4
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	5
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	2
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4

3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	4
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	3
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	5
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	4
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	3
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

#### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	2
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	3
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	2
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	2
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	2
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	2
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*  
Provinsi Gorontalo

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	4
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	4
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	1
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
7	Apakah ada penilaian dan kompetensi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	3

#### 4. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	4
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	3
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	4
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	1
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	4
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	4
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	4
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	4

13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	2
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	4
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	4
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	3
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	3
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	3
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	4
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	3
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	4
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	4
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	3

3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	2
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	3
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	3

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Provinsi NTB

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	2
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki di atas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	3
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	2
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1

## 5. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	3
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	3
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	4
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	4
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	3
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	3

8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	3
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	2
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	4
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	1
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	3
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	5
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	1
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	-
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	-
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	4
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	3
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh:Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	3
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1

9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	5
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

### Area Monitoring Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	2
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	4
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	2
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	2
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	1
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1

## 6. PROVINSI MALUKU

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Maluku

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	5
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	4
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	4
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	2
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	1
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	2
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	-
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	-
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	5
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	5
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	5
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	3

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Maluku

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	4
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	2
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	2
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	2
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	

Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*  
Provinsi Maluku

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	3
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki di atas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	4

## 7. PROVINSI PAPUA

Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	2
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	4
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	2
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	3
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	2
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	2
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	2
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	2
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	3

12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	3
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	1
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	4

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua

No	Kuesioner/ Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	2
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	2
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	3
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	2
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	2
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh:Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	1
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	3
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	1

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Papua

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	4
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	4
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	2
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	2
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	3
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Provinsi Papua

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	3
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	3
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	4

## 8. PROVINSI PAPUA BARAT

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	1
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	2
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	4
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	5
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	2
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	1
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	1
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	1
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	1
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	2

## Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	1
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	3
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	3
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	3
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	5
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	2
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

## Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	1
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	1
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	1
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	1
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	1
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*  
Provinsi Papua Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	4
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	3
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	3
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1

## 9. KOTA BANDA ACEH

Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Banda Aceh

No.	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	4
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	3
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	3
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	2
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	2
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	3
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	1
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	2
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	2
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3

13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	3
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	1
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	1
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh

No.	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	3
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	3
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	1
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	3
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	3
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kota Banda Aceh

No.	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	2
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	2
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	1
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	1
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	2
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya revidi inspektorat terhadap GAP dan GBS, revidi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	1
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kota Banda Aceh

No.	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	3
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki di atas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	5
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	3

## 10. KOTA TARAKAN

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Tarakan

No	Kuesioner	Score
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	4
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	3
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	5
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	5
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	3
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	3
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	2
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	4
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	2
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	4
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	4

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Tarakan

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	5
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	5
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	2
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	5
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	2
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	5
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	4
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	5
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	5

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kota Tarakan

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	5
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	5
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	5
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	3
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	4
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	5
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*  
Kota Tarakan

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	4
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	5
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	5
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	5
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	2
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	2
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	2
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	4

## 11. KOTA BONE BOLANGO

Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	5
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	4
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	1
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	5
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	3
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5

14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	2
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	2
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	5
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	5
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	5
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	5
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	4
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	1
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	3
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	5
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	5
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	3

3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	2
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	4
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya revidu inspektorat terhadap GAP dan GBS, revidu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	4
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kabupaten Bone Bolango

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	4
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	4
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	4
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetensi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	4
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	2

## 12. KABUPATEN LOMBOK BARAT

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	5
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	1
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	3
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	4
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	5

8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	4
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	4
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	4
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	4
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	5
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	5
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	4
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	2
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	3
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	4

8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	3
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	4
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	5

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	4
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	4
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	3
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	5
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reuiu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reuiu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	4
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	4

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kabupaten Lombok Barat

No	Kuesioner	Score
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	2
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	3
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	2
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1

### 13. KOTA KUPANG

#### Skor Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Kupang

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	3
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat - rapat pembahasan anggaran daerah?	3
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	4
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	1
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	3
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	4
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	2
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	2
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	4
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	2
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	-
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	3
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	1
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	3

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Kupang

No	Kuesioner	Score
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	-
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	-
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4

4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	-
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	4
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	-
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	5
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	4
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	5

#### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kota Kupang

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	3
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	3
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	3
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	4
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	4
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	2
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	2

## Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kota Kupang

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	1
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	3
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	3

## 14. KOTA AMBON

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Ambon

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	4
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	2
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	5
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	5
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	2
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	1
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	1
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	5
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5

13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	5
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	-
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	-
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Ambon

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	-
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	5
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	-
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	-
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	3
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	-
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh: Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	-
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	-
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	-
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	-

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kota Ambon

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	4
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	2
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	2

4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	2
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	-
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	4
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya revidi inspektorat terhadap GAP dan GBS, revidi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	1
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

#### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kota Ambon

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	2
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki di atas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	-
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	1
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1

## 15. KABUPATEN JAYAPURA

#### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	5
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	3
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	5
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	1
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	1
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	2
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	2
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	2

9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	2
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	3
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	3
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	3
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	5

#### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Kuesioner/ Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	-
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	-
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	-
4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	3
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	1
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	-
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh:Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	4

8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	4
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	3

### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	2
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	2
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	2
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	3
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	3
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	3
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	2
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	3

### Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement* Kabupaten Jayapura

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	4
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	4
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	2
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	4
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	3
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	3
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	3
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	4

## 16. KABUPATEN MANOKWARI

### Area Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Manokwari

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah terdapat perspektif kesetaraan gender dalam visi misi Kepala daerah?	1
2	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari pokok bahasan dalam rapat antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran daerah?	2
3	Apakah terdapat narasi Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD?	4
4	Apakah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG?	1
5	Apakah Daerah menyusun Profil Gender?	1
6	Apakah Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD?	1
7	Apakah terdapat tagging ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)?	1
8	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GAP (Gender Analysis Pathway) dalam perencanaan daerah?	1
9	Apakah Daerah memahami dan mengimplementasikan GBS (Gender Budget Statement)/ GAB (Gender Action Budget) dalam proses penyusunan anggaran daerah?	1
10	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
11	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mempertimbangkan responsif gender?	1
12	Bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
13	Bagaimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) serta pencegahan dan penurunan stunting telah mempertimbangkan responsif gender?	1
14	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DAU telah mempertimbangkan responsif gender?	1
15	Bagaimana perencanaan dan penggunaan sebagian DBH CHT dalam peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak telah mempertimbangkan responsif gender?	-
16	Apakah PAD dari earmark Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat?	2
17	Apakah Daerah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan (musrenbang) dan penganggaran (konsultasi publik)?	1

### Area Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Manokwari

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi untuk penanganan stunting?	4
2	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak?	4
3	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional PAUD untuk penanganan stunting?	4

4	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim (BLT Desa) dan pencegahan dan penurunan stunting?	3
5	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sebagian DAU? (DAU yang digunakan untuk PUG baik block grant atau spesifik grant (misalnya DAU untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan - PMK 110/2023)	5
6	Bagaimana kinerja realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari DBH CHT untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan anak?	-
7	Bagaimana realisasi dan pemanfaatan anggaran responsif gender yang berasal dari sumber pendanaan lain selain Transfer ke Daerah misal dari PAD, Pinjaman dll? (Contoh:Earmark PDRD untuk peningkatan Kesehatan, Pelaksanaan pinjaman untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan anak)	4
8	Apakah terdapat insentif/kompensasi (pengurangan/potongan) pajak dan retribusi daerah bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas di daerah?	1
9	Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan?	1
10	Pada praktek pelaksanaan di lapangan apakah alokasi Transfer ke Daerah dapat membantu pelaksanaan subkegiatan responsif gender?	4

#### Area Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Manokwari

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran responsif gender yang meliputi target dan capaian output? (caranya, waktunya, siapa yang melakukan, kualitasnya, kendala)	2
2	Bagaimana peran kelompok kerja PUG di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas mengorganisir program dan kegiatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG?	1
3	Bagaimana penanganan kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	1
4	Apa saja sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Tahun 2023 telah berkontribusi dalam pengarusutamaan gender?	2
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan anggaran responsif gender di Daerah?	1
6	Bagaimana pemerintah daerah mencantumkan implementasi PUG dalam Laporan Kinerja (LAKIN) -nya?	1
7	Bagaimana peran Inspektorat Daerah terhadap pengawasan penggunaan anggaran responsif gender dan PUG di daerah? (misalnya reviu inspektorat terhadap GAP dan GBS, reviu terhadap kesesuaian penggunaan anggaran responsif gender)	1
8	Bagaimana pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan pemeriksa pusat (BPK, BPKP) terhadap anggaran responsif gender?	1

Area Monitoring Kapasitas SDM, Inovasi, dan *Continuous Improvement*  
Kabupaten Manokwari

No	Kuesioner/Pertanyaan	Skor/Nilai
1	Apakah Pemda memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
2	Apakah Pemda mendapatkan pelatihan atau penguatan kapasitas sebagai berikut: Analisa Gender; GAP/GBS; Data terpilah, Gender tagging dalam pemanfaatan TKD?	1
3	Apakah Pemahaman dan Kapasitas yang dimiliki diatas diterapkan menjadi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung PUG?	1
4	Apakah Pemda mempunyai inovasi yang mendorong implementasi PUG dengan pemanfaatan TKD?	3
5	Apakah ada skema atau insentif untuk inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG?	1
6	Apakah Pemda melakukan benchmarking ke daerah lain yang melakukan Inovasi pemanfaatan TKD untuk mendukung PUG?	1
7	Apakah ada penilaian dan kompetisi inovasi Pemanfaatan TKD untuk PUG secara rutin/berkala/tahunan?	1
8	Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk inovasi langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?	1



**SKALA**

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



[skala.or.id](http://skala.or.id)



[communications@skala.or.id](mailto:communications@skala.or.id)

